KETERLIBATAN PEMUDA DALAM GERAKAN JARINGAN NU SUMENEP UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:

Sulton Nul Arifin
NIM. F520915029

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sulton Nul Arifin

NIM : F520915029

Program : Magister

Intitusi : Pascasarjana UIN SunanAmpel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 65943AFF324879609 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sulton Nul Arifin

PERSETUJUAN

Tesis Sulton Nul Arifin ini telah disetujui

Pada tanggal 05 Juli 2017

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Ibnu Anshori, S.H., M.A.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sulton Nul Arifin ini telah diuji

Pada tanggal 25 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil.I. (Ketua / Penguji) .....
2. Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.A. (Penguji Utama) .....
3. Dr. H. Ibnu Anshori, S.H., M.A. (Pembimbing / Penguji) .....

Surabaya, 25 Juli 2017

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag.
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sulton Nul Arifin
NIM : F520915029
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address : frozi0844@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KETERLIBATAN PEMUDA DALAM GERAKAN JARINGAN NU SUMENEP UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10, April. 2019

Penulis

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Fenomena pembelian tanah besar-besaran yang tengah terjadi di Sumenep yang diikuti dengan pengalihfungsian lahan menjadi industri tambak ternyata mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Berbagai respon baik yang pro atau kontra bermunculan atas peristiwa tersebut yang tidak jarang menabrak nilai sosio-kultural masyarakat seperti misalnya pembongkaran makan keramat demi kepentingan tambak. Diantara sekian banyak elemen yang melakukan perlawanan adalah BATAN (Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh). Sebuah wadah jaringan NU Sumenep yang menyatukan aktor-aktor dari berbagai lapisan masyarakat NU, baik secara perorangan atau kelembagaan. Elemen NU tersebut terdiri dari PMII, PPS, Kemunitas Eman Nak Potoh (KEN) Aktor-aktor Ansor dan Aktor pengurus NU Sumenep.

Berbagai elemen NU lintas generasi dan latarbelakang melebur dalam satu gerakan melawan upaya penguasaan tanah –meminjam istilah aktor gerakan- oleh investor. Oleh sebab itu menarik untuk meneliti lebih dalam apa bentuk dan motif atau faktor yang mendorong keterlibatan aktor-aktor NU khususnya para pemuda untuk melakukan upaya perlawanan bersama-sama dengan elemen NU lainnya. Di satu sisi, fenomena pembelian tanah besar-besaran banyak melibatkan orang-orang lokal Sumenep baik dari unsur oknum-oknum pemerintah desa, tokoh agama maupun *bajing*. Pada taraf tertentu gerakan harus berhadapan dengan pemerintah kabupaten. Lalu bagaimana strategi yang digunakan oleh gerakan jaringan NU untuk mencapai tujuannya melindungi tanah Sumenep dari kepemilikan pihak luar dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat tanpa harus melepas hak milik atas tanah.

Penelitian ini bertujuan memahami apa bentuk dan motif keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU Sumenep mempertahankan tanah serta bagaimana strategi yang ditempuh gerakan jaringan NU untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Secara sederhana, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU Sumenep bermacam-macam, mulai dari investigasi, pengumpulan informasi, pendampingan masyarakat hingga demonstrasi dan audiensi atau dialog dengan pemerintah kabupaten. Motif keterlibatan pemuda yang sangat dominan adalah identitas kolektif sebagai orang Sumenep dan sebagai aktifis yang memunculkan solidaritas dan perasaan *moral oblgation*. Namun pada taraf tertentu, pertimbangan prestis, harga diri, pengakuan hingga cap penghianat dan bentuk *social sanction and reward* lainnya juga menjadi faktor pemuda tetap berkomitmen pada gerakan. Sedangkan strategi yang digunakan meliputi strategi struktural dan kultural. Strategi struktural merujuk pada upaya perlindungan tanah melalui mekanisme hukum, dan strategi kultural merujuk pada pendekatan masyarakat lewat sosialisasi, penyadaran dan langkah-langkah persuasif untuk lebih peduli terhadap makna tanah dan nasib generasi selanjutnya. Dari kedua strategi tersebut, selalu ada kontribusi pemuda dalam berbagai bentuk seperti dijelaskan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK ix
UCAPAN TERIMA KASIH x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Identifikasi dan Batasan Masalah** 12
- **C. Rumusan Masalah** 13
- **D. Tujuan Penelitian** 13
- **E. Kegunaan Penelitian** 14
- **F. Kajian Teori** 15
- **G. Penelitian Terdahulu** 19
- **H. Metode Penelitian** 20
- **I. Sistematika Pembahasan** 26

BAB II KAJIAN TEORI
- **A. Diskursus Gerakan Sosial** 27
- **B. Ragam Gerakan Sosial** 29
- **C. Historisitas dan Macam-Macam Teori Gerakan Sosial** 33
- **D. Hubungan *Networking* dan Partisipasi** 41
- **E. Motif-Motif Partisipasi** 50
- **F. Identitas Kolektif** 54
- **G. Keberlanjutan Lingkungan Dalam Islam** 69
- **H. Keberlanjutan Keturunan Dalam Islam** 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 79

1. Kondisi Geografis Kabupaten Sumenep 79

2. Kondisi Penduduk 80

3. Kondisi Pendidikan 86

B. Sosial Budaya Masyarakat Sumenep 88

C. Pesantren dan Relasi Patron Klien 92

D. Praktek Jual Beli Tanah 97

E. Makna Tanah dan Pergeserannya 105

BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN PEMUDA DALAM GERAKAN JARINGAN NU UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH

A. Respon NU 110

B. Kemunculan Komunitas-Komunitas 112

1. Komunitas *Eman Nak Potoh* (KEN) 112

2. Pemuda Peduli Sumenep (PPS) 116

3. Barisan *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* (BATAN) 118

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumenep (PC PMII) . 125

5. Sastra Melawan 130

C. Bentuk Keterlibatan Pemuda 132

D. Motif Keterlibatan Pemuda 138

E. Strategi Gerakan 154

F. Makna Tanah dalam Perspektif Gerakan Jaringan NU 162

BAB V

A. Kesimpulan 165

B. Saran 170

DAFTAR PUSTAKA 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tanah dalam beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian masyarakat madura, khususnya Kabupaten Sumenep. Pelepasan dan penjualan tanah di kabupaten Sumenep tersebut berhubungan erat dengan isu industrialisasi yang akan dibangun di kabupaten Sumenep. Pelepasan dan penjualan tanah menjadi problem bagi sebagian masyarakat Sumenep karena dilepas pada orang asing, baik yang berasal dari luar madura atau yang berasal dari warga negara asing (WNA). Beberapa daerah yang telah melepas lahan secara massif diantaranya adalah, Kombang, Talango, Andulang, Lapa Dayah, Lombeng, Dependeh, Dasuk, Ambunten dan Batu Putih.[1]

Indikasi tentang pelepasan dan penjualan tanah secara massif di lapisan masyarakat bawah semakin menguat berdasarkan keterangan Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaaan Badan Pertanahan Nasional (BPN)[2] setempat. Berdasarkan keterangannya, ia membenarkan tentang penjualan tanah yang massif tersebut. Fenomena ini terjadi di beberapa daerah seperti;[3] Kecamatan Kota Sumenep, Gapura, Kalianget dan Manding.

Jumlah tanah yang sudah dilepas juga tidak bisa dikatakan sedikit. Dari investigasi yang dilakukan oleh pegiat lingkungan dan tanah, (Daulat Hijau) sudah sekitar 500 hektar tanah beralih kepemilikan, yang diduga oleh mereka bahwa tanah

---

[1]http://www.daulathijau.org/?p=906

[2]Pernyataan ini disampaikan dalam acara seminar dan launching Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FKNSDA) dengan tema "Agama Tanah, Ajaga Nak Potoh" (Agama Tanah, Menjaga Anak Cucu) di Aula PCNU Setempat.

[3]http://www.nu.or.id/post/read/63292/pcnu-sumenep-ada-upaya-mengasingkan-masyarakat-dari-tanahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut beralih kepemilikan kepada investor dan pengusaha asing (orang dari luar Madura, atau warga negara asing). Data yang dikumpulkan oleh Daulat Hijau memberikan informasi tentang jumlah dan luasan tanah yang telah berpindah kepemilikan. Berikut adalah rinciannya, Talango 5 hektar, Andulang 14 hektar, Lapa Dayah 13 hektar, Lombang 20 hektar.

Sedangkan daerah Dependeh, Dasuk, Ambunten, Batu Putih masih dalam proses validasi data.[4] Daftar kecamatan dan desa yang mengalami fenomena penjualan tanah secara massif rata-rata secara geografis terletak di area pantai dan pesisir. Hanya kecamatan Manding dan Lenteng yang letaknya sedikit berada di pedalaman. Sedangkan sisanya adalah kecamatan yang memiliki wilayah bibir pantai. Bahkan Talangoh merupakan sebuah pulau tersendiri, hal ini berarti Talangoh dikelillingi oleh pantai yang tentunya mempunyai kekayaan sumberdaya alam khususnya laut yang tidak sedikit.

Fakta tentang daerah yang menjadi sasaran para investor berdekatan dengan pantai juga berkorelasi dengan informasi bahwa sekitar 700 Ha tanah di daratan pantura (pantai utara) Sumenep telah beralih kepemlikan.[5] Jika dikaitkan dengan temuan yang terdahulu yang menunjukkan pembelian tanah besar-besaran banyak terjadi di sekitar pantai seperti Ambunten, Lombang, Kalianget, Gapura, maka hal tersebut mendukung informasi diatas.

---

[4]http://www.daulathijau.org/?p=906
[5]http://suaraindonesia-news.com/penjualan-tanah-kepada-investor-asing-marak-tokoh-ulama-sumenep-adakan-pertemuan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daya tarik para pengusaha atau investor pada lahan Sumenep, terutama yang terletak di kecamatan-kecamatan yang memiliki area pesisir terungkap di kemudian hari mayoritas dikarenakan kebutuhan untuk penyediaan lahan tambak udang. Dalam laporan sebuah harian online, sekitar 50 Ha tanah bahkan telah mendapatkan izin dari pihak Pemerintah Daerah Sumenep mengenai operasional tambak udang.[6] Di samping itu, menurut pengakuan beberapa warga, harga penjualan tanah berkisar hanya di angka 25.000 per meter dan 35.000.[7]

Para pembeli (diduga adalah para pengusaha dan investor) dalam upaya melancarkan tujuan pembelian tanah warga, menurut pengakuan beberapa warga setempat ternyata tidak dilakukan langsung oleh mereka sendiri. Mereka melibatkan warga setempat dan juga tokoh masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah.[8] Fenomena penjualan tanah secara massif ini dalam pertimbangan beberapa warga

[6] http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/08/04/2669/larang-investor-luar-beli-lahan-pertanian/3
[7] http://www.nu.or.id/post/read/63292/pcnu-sumenep-ada-upaya-mengasingkan-masyarakat-dari-tanahnya
[8] http://www.nu.or.id/post/read/63292/pcnu-sumenep-ada-upaya-mengasingkan-masyarakat-dari-tanahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat juga disebabkan penawaran yang mereka anggap relatif tinggi dan pertimbangan produktifitas tanah yang rendah.[9]

Fenomena pelepasan dan penjualan tanah secara massif ini pada gilirannya menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat Sumenep. Pada satu sisi, rencana industrialisasi (sementara ini tambak udang) akan meningkatkan pemasukan Pemerintah Daerah Sumenep, di samping itu, industrialisasi juga diproyeksikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Syarat mutlak industrialisasi adalah ketersediaan lahan tanah. Karena itu, sikap pemerintah daerah Sumenep juga akan menentukan laju rencana industrialisasi tersebut. Tingkat kemudahan perijinan operasi sebuah industri akan berbanding lurus dengan tingginya minat investor, yang pada gilirannya akan mendorong praktek pembelian tanah secara massif.

Di sisi lain, pembelian tanah secara massif ini menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat. Mayoritas pihak yang merasa khawatir karena fenomena tersebut berakar pada masyarakat dengan kultur Nahdatul Ulama (NU). Di samping masyarakat lapisan bawah, fenomena ini juga mendapat sorotan dari salah seorang anggota DPRD Komisi II Sumenep yang juga meragukan kemanfaatan keberadaan industri tambak udang tersebut bagi masyarakat sekitar. Dia mempertanyakan keterlibatan masyarakat setempat dalam proses industrialisasi tersebut. Politisi partai Nasdem tersebut misalnya memberikan contoh untuk tenaga kerja kasar pun, pihak investor masih mempekerjakan orang dari luar.[10]

Fenomena pelepasan dan penjualan tanah dengan skala besar yang sedang terjadi di Sumenep kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh pola pikir dan kehidupan sosio-kultural masyarakat Madura, terutama sekali yang bersangkutan

[9] Alif, Wawancara, 14 Januari 2017
[10] http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/08/25/3292/desak-perketat-izin-tambak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan persoalan ekologi. Dalam sejarahnya, masyarakat Madura memiliki tatanan sosio-kultural yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Kekhasan masyarakat Madura ada hubungannya dengan kondisi ekologi atau tanah yang pada gilirannya ikut mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat madura. Ekologi tegal-seperti yang disebutkan Kuntowijoyo-merupakan salah satu faktor yang ikut membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat Madura, mereka adalah masyarakat yang lebih dekat dengan tipe *individual-centered*, daripada *socio-centered*. Masyarakat Madura cenderung membentuk sebuah komunitas yang terdiri dari satu keluarga tersendiri dan jauh dari kelompok keluarga lainnya. Sehingga pola pemukiman orang Madura cenderung terpencar dan terpisah-pisah.[11]

Kegelisahan masyarakat Sumenep terlihat dari gerakan dalam tubuh NU. Banyak respon muncul dari kalangan NU yang mayoritas menyesalkan fenomena penjualan tanah secara massif. Respon yang sedikit banyak bernada penolakan (meskipun tidak sepenuhnya) dapat dipahami jika diletakkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang, perlindungan lingkungan dan kelangsungan hidup generasi berikutnya, begitupula struktur kehidupan sosio-kultural masyarakat, bukan semata-mata kepentingan ekonomi.

Pada dasarnya, keresahan terhadap fenomena pembelian tanah secara besar-besaran sudah lama muncul di kalangan orang-orang NU struktural. Mereka sudah sering membahas kemungkinan tersebut dalam perbincangan non formal. Bagi mereka, fenomena ini akan membawa akibat jangka panjang, yaitu penguasaan tanah oleh orang di luar Sumenep, Industrialisasi yang sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kondisi sosio-kultural masyarakat setempat[12]. Selain itu, penjualan tanah secara massif dipandang merugikan khususnya bagi generasi berikutnya, dan

[11] Kuntowijoyo, *Madura; Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris 1850-1940*, (Yogyakarta; Mata Bangsa Press, 2002), 588.
[12] K. Dardiri Zubairi, Wawancara, 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sebagaimana telah jamak, bahwa industrialisasi akan mencemari lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, kalangan NU muda ini menduga adanya kepentingan terselubung pihak pengusaha atau investor. Mereka khawatir bahwa sebenarnya yang menjadi agenda besar dan utama pembelian tanah tersebut adalah sumber daya alam yang berada di bawah tanah, bukan tanah di permukaan. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan sikap para pembeli tanah yang tidak mau berterus terang tentang potensi alam dari tanah yang dibeli.

Respon dari masyarakat terhadap praktek jual-beli tanah sebenarnya sudah ada, namun hanya bersifat sporadis dan tidak terlalu terorganisir dengan baik. Biasanya respon tersebut muncul setelah masyarakat menyaksikan akibat dari peralihan lahan pada investor yang menabrak kondisi-kondisi sosio-kultural masyarakat, seperti penolakan terhadap penggusuran Tanah Kuburan di daerah Dasuk oleh Investor. Bagi masyarakat, area kuburan tersebut merupakan area sakral. Karenanya tidak bisa digusur hanya dengan alasan pembangunan tambak.

Namun, dalam perkembangannya, sudah mulai bermunculan gerakan penolakan yang terorganisir terhadap praktek jual-beli tanah terutama kepada orang asing. Kelompok KEN (Komunitas Eman Nak Potoh) di daerah Dapenda misalnya, adalah bukti nyata organisasi masyarakat yang secara tegas menolak praktek jual-beli tanah untuk kepentingan pembangunan tambak oleh investor. Komunitas ini berkomposisikan terutama sekali orang-orang pesantren, kebanyakan dari anggotanya adalah alumni An-nuqoyah Guluk-Guluk. Seiring berjalan waktu, kemunculan gerakan perlawanan yang terorganisir dari masyarakat Sumenep, terutama generasi mudanya semakin banyak.

Bentuk penolakan yang datang dari kalangan muda Sumenep juga beragam. Sebagian ada yang menggunakan cara-cara persuasif, tapi ada juga yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demonstrasi pada pemerintah daerah. Cara-cara persuasif misalnya dilakukan dalam bentuk seminar, sosialisasi urgensi menjaga tanah. Selain bentuk acara formal, mereka juga menggunakan media atau acara dimana masyarakat biasanya berkumpul, seperti memanfaatkan waktu pengajian, tahlilan dan ritual-ritual keagamaan sebagaimana lazim di Madura dengan menitipkan isu tanah pada orang yang memimpin pengajian, perkumpulan dan ritus-ritus keagamaan. Merespon fenomena penjualan tanah besar-besaran tersebut, dinamika dalam internal tubuh NU pada gilirannya melahirkan perkumpulan, paguyuban atau organisasi yang konsentrasi memperhatikan masalah tanah, sebagian ada yang telah eksis jauh sebelum fenomena penjualan tanah besar-besaran ini menyita perhatian, sebagian ada yang didirikan setelah kejadian. Diantara organisasi dan perkumpulan tersebut adalah, FNKSDA (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam), BATAN (*Barisan Ajaga Tana Na' Potoh*), *Tera' Bulan*, ada pula KEN (*Komunitas Eman Nak Potoh*).[13]

Dalam perkembangannya, fenomena penjualan tanah di Sumenep akhirnya menjadi perhatian petinggi, para sesepuh NU dan pengurus struktural NU Sumenep. Mereka pada umumnya juga mengkhawatirkan nasib masyarakat Sumenep khususnya nasib generasi berikutnya dan kehidupan sosio-kultural masyarakat yang sudah mentradisi. Respon dari masyarakat NU Sumenep direpresentasikan melalui berbagai langkah. Mulai dari perkumpulan atau pengajian yang membahas tentang kondisi

[13] Barisan Ajaga Tana Nak Potoh (Barisan Menjaga Tanah Anak Cucu), Tera' Bulan (Terang Bulan), Komunitas Eman Nak Potoh (Komunitas Sayang Anak Cucu) adalah perkumpulan yang terbentuk melalui inisiatif masyarakat setempat dalam merespon fenomena jual-beli tanah di sumenep. Aktor-aktor di dalamnya terdiri dari para pemuda setempat yang secara kultural berafiliasi terhadap NU. Selain mereka, elemen NU yang ikut bergabung adalah GP. Ansor dan belakangan PMII. Sedangkan untuk BATAN, ia merupakan wadah yang menyatukan berbagai elemen jaringan tersebut diatas. (K. Dardiri Zubairi, Wawancara, 15 Januari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah saat itu, seperti Halaqoh Kedaulatan Tanah[14], hingga yang bersifat himbauan "Larangan" transaksi.[15]

Strategi yang ditempuh oleh masyarakat NU yang banyak melibatkan ritual-ritual keagamaan seperti pengajian, persis sama dengan yang dilakukan pada masa awal berdirinya NU dan era dimana NU terlibat persaingan politik sebelum masa reformasi. Tradisi ritual keagamaan seperti pengajian adalah instrumen yang sering diapakai oleh lapisan NU. Pada masa-masa awal berdirinya NU, Kiai Hasyim Asy'ari sering menegaskan arti penting persatuan umat Islam Indonesia untuk berhadap-hadapan dengan musuh Islam, baik yang berasal dari luar atau asing maupun musuh dari dalam tubuh rakyat Indonesia sendiri. Pesan-pesan tersebut sering disampaikan oleh Pendiri NU tersebut dalam pengajian-pengajian dan acara peresmian cabang-cabang NU di Surabaya atau sekitar Jombang.[16]

Gejolak penolakan yang muncul di masyarakat menunjukkan beberapa hal. Pertama, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep kurang melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah belum membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Sehingga tidak jarang kebijakan yang dihasilkan bersinggungan dengan budaya tradisi dan kepentingan masyarakat Sumenep sendiri. Kejadian penggusuran area makam oleh investor untuk dibangun lahan tambak udang menjadi contoh kongkrit bagaimana kepentingan, tradisi dan nilai-nilai masyarakat masih belum terakomodir dalam desain kebijakan pemerintah daerah kabupaten

[14]http://www.timesindonesia.co.id/baca/125440/20160515/145917/nu-sumenep-minta-libatkan-warga-dalam-perumusan-perda-rtrw/
[15]https://m.tempo.co/read/news/2015/12/14/058727519/nu-larang-warga-sumenep-jual-tanah-kepada-orang-asing
[16] M. Ali Haidar, *Nahdaltul Ulama dan Islam Di Indonesia*,(Sidoarjo, Al-Maktabah, 2011), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep pada khususnya maupun pemerintah pusat pada umumnya. Sehingga akibat dari kealpaan partisipasi masyarakat itu adalah penolakan bahkan kericuhan.[17]

Problem tanah dan lingkungan yang awalnya hanya menjadi perhatian sebagian kecil kalangan masyarakat NU hingga menjadi perhatian warga NU lebih luas mendorong mereka bergerak untuk mencegah problem semakin meruncing. Jaringan NU mengambil langkah preventif sebelum lebih banyak lagi tanah-tanah dikuasai para pemodal asing. Salah satu contohnya adalah penyadaran masyarakat, pemberian wawasan tentang tanah, lingkungan dan masa depan anak keturunan selanjutnya, semua itu berkaitan dengan eksistensi tanah.

Langkah dan strategi erat kaitannya dengan para pemuda atau warga NU yang masih relatif muda. Mereka mengadakan seminar, halaqoh atau perkumpulan untuk memberikan wawasan tentang tanah. Komunitas *Tera' Bulan* yang awalnya adalah wadah pengajian merupakan satu contoh langkah dan strategi yang dipakai NU. *Tera' Bulan* dijalankan dan diprakarsai oleh para pemuda, di sini peran pemuda sangat sentral dalam memuluskan langkah penyadaran terhadap masyarakat tentang urgensi kepemilikan tanah dan sebagainya dengan cara membangun kesepahaman dengan pihak yang memiliki pengaruh dan otoritas kultural di masyarakat seperti para pemimpin *kompolan* dan pengajian. Keterlibatan pemuda dalam gerakan yang berjalan diatas jejaring NU ini sebenarnya bervariasi. Sebagian dari mereka melibatkan diri dalam bentuk pengumpulan informasi-informasi jual-beli tanah, sebagian lainnya mengawali langkah pendekatan terhadap tokoh-tokoh NU lokal untuk membangun kesepahaman dan memberikan penyadaran terhadap warga setempat agar tidak mudah menjual tanah mereka. Dengan demikian, pihak yang

[17]http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/08/15/3008/demi-tambak-udang-pengusaha-bakal-gusur-puluhan-kuburan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling penting dalam pelaksanaan langkah kultural ini adalah para kiai *kampong* yang memimpin *kompolan*, pengajian dan ritual-ritual keagamaan lain[18]

Berbeda dengan keterlibatan pemuda di desa Dapendah, Komunitas *Eman Nak Potoh* (KEN) melakukan langkah yang lebih bersentuhan langsung dengan para pemilik tanah yang menjadi target pembelian. Para aktor KEN "menculik" (istilah untuk mengundang pemilik tanah secara diam-diam) para pemilik tanah untuk kemudian diberikan penyadaran dan wawasan tentang tanah, keberlangsungan hidup generasi berikutnya, bahaya penjualan tanah pada investor dengan harapan para pemilik tanah tersebut tidak mudah menjual tanahnya. Seringkali dalam melaksanakan gerakannya, para anggota KEN harus berhadapan dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa hingga *Bajing* yang menurut mereka adalah kaki-tangan Investor.[19]

Kekhawatiran akan ancaman penguasaan tanah oleh orang dari luar Madura seringkali menjadi faktor yang mendorong pemuda untuk memutuskan ikut dalam gerakan. Isu bahwa etnis Cina merupakan aktor di balik jual-beli tanah yang menguat di masyarakat mengindikasikan bahwa kesadaran etnis dan rasa solidaritas sebagai orang Madura memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan gerakan dan keterlibatan anggota-anggotanya. Bagi kesadaran masyarakat, pihak yang membeli tanah tersebut seringkali diasosiasikan pada etnis Cina yang memakai jasa penduduk setempat untuk memuluskan rencananya.[20]

Selain isu Cina, nilai-nilai tradisional tentang *tana sangkol* juga mempunyai peran tersendiri dalam mengubah sikap pemilik tanah. Seperti yang terjadi dalam rutinitas pengajian *tera' bulan*. Si penceramah yang telah dititipi isu oleh aktor gerakan melakukan penafsiran ulang terhadap konsep durhaka pada orang-tua,

[18] K. Dardiri Zubairi, Wawancara, 15 Januari 2017
[19] Royhan, Wawancara, 16 Januari 2017
[20] Royhan, Wawancara, 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut penafsirannya, bentuk durhaka pada orang tua pada zaman sekarang salah satunya berbentuk penjualan tanah warisan.[21] Dengan demikian, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Madura pada umumnya dan mayarakat Sumenep pada khususnya seringkali menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan terlibat dalam gerakan atau mengafirmasi ide yang sama dengan gerakan

Persoalan tanah seperti digambarkan diatas seketika menunjukkan bagaimana pembentukan peraturan perundangan di tingkat daerah masih belum melibatkan masyarakat secara luas. Tidak heran jika misalnya, jaringan masyarakat NU juga menuntut untuk dilibatkan dalam penyusunan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) karena merasa pemerintah tidak memberikan cukup ruang partisipasi yang sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang.[22] Akibatnya, terjadi persinggungan antara kepentingan pemerintah atau pihak ketiga dengan kepentingan masyarakat setempat.

Bertolak dari paparan mengenai gerakan jaringan masyarakat NU Sumenep yang melibatkan elemen pemuda dalam merespon fenomena jual-beli tanah, menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keterlibatan pemuda dalam gerakan yang dilakukan di Sumenep serta langkah-langkah dan strategi yang diambil dan bagaimana gerakan tersebut bekerja. Sehingga isu tentang tanah menjadi perhatian para elit lokal dan masyarakat secara luas, serta menyadarkan dan menggiring masyarakat ke dalam pihak yang sejalan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan judul **“Keterlibatan Pemuda Dalam Gerakan Jaringan NU Sumenep Untuk Mempertahankan Tanah”.**

[21] K. Dardiri Zubairi, Wawancara, 15 Januari 2017
[22] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sekilas ilustrasi tentang gerakan pemuda dan gejolak di masyarakat NU pada umumnya terhadap persoalan tanah memunculkan beberapa hal yang patut menjadi pertanyaan. Kegelisahan akademik mengenai persoalan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan keterangan yang sudah lalu, setidaknya dapat ditemukan beberapa persoalan diantaranya sebagai berikut;

1. Bagaimana sikap dan respon pemuda NU secara umum terhadap penjualan tanah secara massif di Kabupaten Sumenep?
2. Apa yang mendorong dan memotivasi pemuda NU untuk melakukan upaya-upaya perlindungan tanah di kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana sikap masyarakat pemilik tanah kabupaten Sumenep mengenai fenomena pembelian tanah secara massif?
4. Bagaimana langkah dan strategi Pemuda NU dalam melakukan upaya perlindungan tanah masyarakat Sumenep?
5. Bagaimana langkah dan strategi Pemuda NU untuk memperoleh dukungan elit NU dan masyarakat?
6. Apa saja yang menyebabkan munculnya gerakan masyarakat NU terkait perlindungan tanah?
7. Bagaimana gerakan Pemuda NU berdampak pada kebijakan pemerintah kebupaten Sumenep?
8. Bagaimana dampak gerakan Pemuda NU terhadap perilaku jual-beli tanah masyarakat Sumenep?

Beberapa persoalan diatas menggambarkan betapa kompleksnya persoalan tanah yang pada akhirnya menimbulkan gejolak dan gerakan perlawanan dari pemuda NU dan masyarakat NU secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertolak dari kompleksitas persoalan tersebut, penting untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini akan lebih difokuskan pada persoalan seputar peran pemuda NU dalam perlawanan terhadap persoalan tanah, langkah-langkah dan strategi yang diambil dalam upaya perlindungan serta mengkaji bagaimana isu perlindungan tanah mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat NU Sumenep secara umum hingga menciptakan gerakan masyarakat NU Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengungkap daya gedor gerakan tersebut terhadap desain kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep serta terhadap masyarakat Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Demi tercapainya tujuan penulisan yang baik dan terarah, perlu untuk mengajukan rumusan masalah yang lebih tersusun lagi. Dalam kasus penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut;

1. Apa bentuk dan motif keterlibatan Pemuda dalam gerakan jaringan NU Sumenep untuk mempertahankan tanah?
2. Bagaimana strategi gerakan jaringan NU untuk mempertahankan tanah di Sumenep?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah penulisan penelitian. Tujuan penelitian adalah usaha penulis menyajikan deskripsi dan identifikasi empirik mengenai beberapa hal seputar pemuda, gerakan dan persoalan tanah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hal-hal tersebut adalah;

1. Untuk mengetahui bentuk dan motif keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU mempertahankan tanah di Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui langkah dan strategi gerakan jaringan NU dalam mempertahankan tanah di Sumenep

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini setidaknya akan memberikan kontribusi terhadap kajian kepemudaan, gerakan masyarakat atau *social movement* dan persoalan tanah. Secara garis besar beberapa manfaat penulisan penelitian ini sebagai berikut;

1. Secara teoretis, kajian dalam penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan wacana tentang kepemudaan dan gerakan sosial, khususnya gerakan yang *concern* terhadap persoalan tanah.
2. Secara ptaktis, penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana seharusnya sebuah pergerakan yang *concern* terhadap tanah dirumuskan, sehingga memberikan akibat positif terhadap masa depan tanah agar lebih bermakna secara sosial. Karena persoalan tanah selalu saja kebanyakan mengorbankan kepentingan rakyat dalam jangka panjang. lebih jauh lagi, penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang desain kebijakan pemerintah terkait pertanahan yang sering menjadi obyek sengketa antara masyarakat dengan pemerintah.

F. Kajian Teori

Pijakan teori yang akan dijadikan titik berangkat dalam membaca keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU mempertahankan tanah serta pola gerakannya adalah teori-teori gerakan sosial atau *social movement*. Teori ini secara garis besar terbagi dalam dua arus besar, yaitu teori-teori yang mengakar pada psikologi sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan teori-teori yang mengakar pada teori organisasi. Diantara teori-teori seputar pembacaan terhadap gerakan sosial adalah *Resource Mobilization Theory, Relative Deprivation Theory, Political Opportonity, Framing Theory* hingga *Collective Identity*.[23]

Teori-teori yang mengakar pada psikologi sosial berasumsi gerakan sosial muncul sebagai akibat dari kondisi-kondisi psikis setiap individu baik karena keterasingan atau alienasi yang dialami masyarakat atau juga bisa karena kekecewaan masyarakat. Seperti misalnya *Relative Deprivation Theory* dimana masyarakat mengalami deprivasi dan berakibat pada kekecewaan sehingga menimbulkan protes dari masyarakat.[24] Sedangkan teori seperti *Resource Mobilization Theory* dan *Political Opportunity* adalah respon terhadap teori yang menekankan kondisi-kondisi psikologis. Teori yang kedua ini berasumsi bahwa gerakan dan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial adalah bentuk rasionalitas atau keputusan dan pertimbangan rasional para aktornya. Teori ini lebih menekankan aspek politik, kepemimpinan dan sumber daya dalam membaca gerakan-gerakan dan mobilisasi massa terkait kemunculan dan kesuksesannya.[25] Teori yang akan berkontribusi secara signifikan untuk membaca isu-isu yang dipakai gerakan adalah *Framing Theory*. Teori Framing menekankan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam gerakan dengan membingkai isu-isu yang bisa menarik dukungan dari masyarakat.[26]

Untuk mengetahui partisipasi dalam gerakan jaringan NU Sumenep dalam arti fakor yang mendorong individu terlibat dan bagaimana partisipasi tersebut bertahan atau berkembang pada skala yang lebih inten, peneliti menggunakan kerangka teoretik

---

[23] Jonathan Cristiansen, *The Sociology reference Guide: Theories Of Social Movements*, (California; Salim Press, 2011), 15
[24] Ibid, 67
[25] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ter, Alimandan (Jakarta; Prenada, 2011), 325k
[26] Jonathan Cristiansen, *The Sociology reference Guide: Theories Of Social Movements*, (California; Salim Press, 2011), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identitas Kolektif (*collective identity*) dan konsep Jaringan sosial (*social networking*) sebagai pendekatan untuk memahami keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU Sumenep. Namun, hal ini tidak berarti menjadi variabel mutlak, apabila dibutuhkan, kerangka pendekatan lain akan digunakan untuk membantu menjelaskan keterlibatan pemuda dalam gerakan, seperti misalnya konsep *selective incentive.*

Identitas kolektif muncul sebagai salah satu alternatif penjelasan selain *Resource Mobilization Theory* dan *Political Process* yang sangat dominan. Mengutip Jasper dan Poletta, kedua teori diatas yang sangat menekankan faktor struktural dan lebih banyak fokus pada bagaimana mobilisasi terjadi daripada mengapa mobilisasi terjadi membatasi kemampuannya dalam menjelaskan beberapa dimensi dalam gerakan sosial. Kehadiran konsep Identitas Kolektif setidaknya akan menjawab empat persoalan. Salah satunya yaitu mengenai motivasi orang-orang untuk beraksi bersama sebuah gerakan. Diantara kelemahan pendekatan-pendekatan yang terlalu rasional adalah ketidakmampuannya dalam menjelaskan keterlibatan individu dalam gerakan walau tanpa adanya keuntungan material. Dalam hal ini, identitas kolektif tampak menjadi penjelas lain atas keterlibatan individu dalam gerakan.[27]

Selain itu, identitas kolektif juga menjadi alat teoretis untuk menjelaskan bagaimana sebuha kepentingan muncul yang pada gilirannya mendorong lahirnya sebuah gerakan sosial, sehingga kepentingan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang *given*.[28] Dalam kasus Gerakan Jaringan NU Sumenep, peneliti menduga kepentingan melindungi Identitas Ke-Madura-an secara sosio-kultural dari kemungkinan penguasaan oleh pihak luar menjadi pendorong bergeraknya elemen masyarakat NU dan Pemuda Sumenep.

---

[27] Francesca Polletta dan James J. Jasper, "Collective Identity and Social Movement", *Annual Review of Sociology*, 2001, 284

[28] Francesca Polletta dan James J. Jasper, "Collective Identity and Social Movement", *Annual Review of Sociology*, 2001, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *networking* digunakan dalam peneltian ini karena pertimbangan adanya jaringan sosial yang menghubungkan antara aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa *networking* memiliki efek positif dalm hal partisipasi. Merujuk pada Mario Diani yang mengutip Doug McAdam ikatan sosial yang telah ada sebelumnya dimana ia menjadi basis bagi rekrutmen dan bahwa *setting* sosial yang mapan merupakan lokus kemunculan gerakan adalah temuan yang cukup konsisten dalam laporan-laporan gerakan sosial. *Networking* dapat berfungsi sebagai *channel* yang memfasilitasi calon peserta lebih dekat dengan sebuah gerakan melalui sirkulasi informasi tentang aktifitas gerakan yang sedang berlangsung dan organisasi yang telah ada. [29]

Peran *networking* biasanya juga sangat besar dalam memfasilitasi rekrutmen untuk aktivisme yang beresiko tinggi. Mengutip Quintan Wiktorowics bahwa hubungan sosial akan menyediakan ikatan solidaritas dan kepercayaan bagi individu untuk terlibat dalam aktivisme yang beresiko tinggi. *Networking* seringkali menjadi sumber-sumber informal untuk mobilisasi, di saat sumber-sumber formal tidak banyak tersedia karena berbagai alasan keamanan. Biasanya, saat sebuah gerakan berada di bawah pemerintahan yang represif dan otoriter, maka *networking* muncul sebagai alternatif sumber informal.[30]

Pada dasarnya, sebagaimana dipaparkan oleh Carrie Rosefsky Wickham, untuk membaca proses rekrutmen dan keterlibatan dalam sebuah gerakan, terdapat dua arus teoretik utama. Maisng-masing berangkat dari asumsi yang berbeda. Pertama adalah model "*rational- actor of human behaviour*. Model ini menyatakan bahwa

---

[29] Mario Diani," Introduction: Social Movements, Contentious Actions, and Social Networks: 'From Metaphor to Substance", dalam *Social Movement and Network;Relational Approach To Collevtive Action*, ed. Mario Diani dan Doug McAdam, (New York; Oxford University Press, 2003). 7-8

[30] Quintan Wictorowicz, "Introduction; Islamic Activism and Social Movement Theory", dalam *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*, ed. Quintan Wiktorowicz, (Indiana; Indiana University Press, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah gerakan merekrut dan menarik anggota dan pendukung baru dengan menarik kepentingan individu. Gerakan melakukannya dengan cara menyediakan-mengutip bahasa Carrie- "*selective incentives*" (keuntungan materi, psikologis dan atau emosional). Dengan demikian akses terhadap keuntungan dapat mendorong rekrutmen potensial untuk bergabung atau setidaknya mendukung. Sedangkan model yang kedua lebih menekankan bahwa individu seringkali bergabung pada suatu kelompok atau gerakan untuk mengekspresikan komitmen, nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang secara mendalam daripada sekedar kepentingan diri yang sempit. Dengan demikian, si pemimpin gerakan dapat menggerakkan partisipan.[31]

Membaca keterlibatan pihak-pihak dalam gerakan tertentu juga telah menjadi kajian teoretikus-teoretikus *social movement*. Seperti misalnya juga teori *organizational commitment* yang pernah dipakai oleh Helen Rose Ebaugh untuk mencari penjelasan mengenai perkembangan dan antusiame terhadap *Gulen Movement* di Turki. Teori ini berasumsi bahwa mekanisme organisasi dapat menghadirkan komitmen anggotanya. Rosabeth Kanter memperlihatkan bahwa seseorang berkomitmen pada sebuah hubungan atau kelompok karena ia melihat itu sebagai "mengekspresikan" atau dapat memenuhi beberapa bagian fundamental dirinya.[32]

G. Penelitian Terdahulu

Persoalan seputar gerakan sosial dan kajian yang berkaitan dengan Madura sebenarnya sudah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian seputar gerakan sosial terkait persoalan tanah di Madura masih terbatas. Diantara

[31] Carrie Rosefsky Wickham, "Interest, Ideas and Islamist Outreach in Egypt", dalam *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*, ed. Quintan Wiktorowicz, (Indiana; Indiana University Press, 2004), 232.
[32] Helen Rose Ebaugh, *The Gulen Movement*, (London dan New York; Spinger, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian-kajian gerakan sosial yang terjadi di Madura adalah penelitian Imam Bonjol Juhari tentang *"Gerakan Sosial Islam Lokal Madura (Studi Gerakan Protes Islam Sunni Terhadap Ideologi Syi'ah Di Sampang)"*. Penelitian ini membahas tentang munculnya gerakan protes Sunni Sampang terhadap ideologi Syi'ah. Peneliti menemukan di lapangan bahwa penyebab munculnya gerakan protes sangat kompleks salah satunya adalah permasalahan ideologi. Selain itu, ideologi tersebut berkait-mengait dengan budaya dan sosial masyarakat Madura.

Penelitian penting lainnya adalah penelitian Carrie Rosefsky Wickham yang berjudul "*Interest, Ideas and Islamist Outreach In Egypt*". Penulis membedah bagaimana aktivitas islamisme tumbuh subur di kalangan kelompok muda terpelajar Urban di Kairo Mesir. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa kebangkitan aktivisme islam di Mesir tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu model penjelasan. Sebaliknya, rangkaian faktor utama baik yang bersifat kepentingan/keuntungan dan ide-ide saling berkelindan dalam memotivasi untuk ikut serta dalam aktivisme Islam. Baik *Selective Incentive* yang ditekankan oleh penjelasan model aktor-rasional dari aksi kolektif maupun *Frames* (kewajiban moral)-yang ditekankan oleh para sarjana yang tertarik pada peran ide-ide dalam mobilisasi-memiliki peran sama dalam memotivasi para pemuda urban terdidik Kairo untuk terlibat gerakan Islam.[33]

Studi seputar gerakan sosial juga pernah ditulis oleh Muhammad Romdloni, Mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Teologi Petani; Peran Islam dalam Radikalisme Gerakan Petani pada Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NB).* Studi ini berupaya

[33] Carrie Rosefsky Wickham, "Interest, Ideas and Islamist Outreach In Egypt", 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkap kondisi petani dalam gerakan sosial yang didasari oleh aspek ekonomi, sejarah kepemilikan tanah, budaya dan agama.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian penulis memiliki signifikansi dalam menyingkap faktor motif keterlibatan pemuda dalam gerakan serta mendeskripsikan bentuk partisipasinya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menyajikan strategi dan langkah yang diambil oleh gerakan masyarakat dalam menarik perhatian dan dukungan basis-basis kuat masyarakat, khususnya bagaimana gerakan membingkai isu-isu sehingga megundang dukungan masyarakat luas serta Bagaimana gerakan memiliki dampak pada kesadaran dan perilaku masyarakat terkait problematika tanah di Sumenep.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Istilah Metode Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data demi kepentingan tujuan dan kegunaan tertentu. Dimaksudkan dengan cara ilmiah yaitu penelitian bersendikan karakter keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.[34] Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan memberikan data-data dalam bentuk deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan) yang berasal dari obyek yang menjadi sasaran (orang dan perilakunya).[35]

Penelitian yang menggunakan jenis kualitatif sebagaimana penjelasan Lexy Moloeng berarti penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku,

[34] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2008), 2-3
[35] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara menyeluruh melalui deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[36]

Selanjutnya, penelitian ini akan mempekerjakan pendekatan fenomenologi, khususnya fenomenologi empiris (*empirical phenomenology*). Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi didefinisikan oleh Creswell sebagai pendekatan dalam riset yang berfokus pada upaya mendeskripsikan pengalaman bersama yang dimiliki oleh partisipan terhadap sebuah fenomena.[37] Pendekatan fenomenologi memiliki ide dasar melihat pengalaman partisipan sebagaimana yang mereka alami. Dengan begitu, peneliti diharap untuk mengabaikan terlebih dahulu penilaian berdasar perspektifnya dan membiarkan data berbicara sendiri.[38]

2. Sumber Data

Penelitian ini akan membutuhkan berbagai sumber-sumber data yang tersedia. Sumber data berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua yaitu sumber literatur dan sumber lapangan.

a. Data primer dalam *Field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, dalam kasus ini dengan cara terjun langsung ke beberapa desa di Sumenep yang menjadi tempat operasi gerakan mempertahankan tanah dimana pemuda terlibat di dalamnya. Sumber data ini yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti.[39]

---

[36] Ibid, 6.
[37] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*, (Los Angeles; Sage Publication, 2013), 77.
[38] Ibid, 80.
[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualtatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2007), 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pemuda-pemuda yang terlibat dalam gerakan mempertahankan tanah di Sumenep, partisipan lainnya dalam gerakan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat yang terlibat.

b. Data sekunder berupa sumber literatur (field literature), yaitu sumber data yang digunakan untuk mencari landasan teori tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan buku-buku, jurnal, majalah, internet dan lainnya. Dalam kasus penelitian ini, literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian-kajian gerakan sosial (*social movement*), kajian-kajian yang membahas partisipasi serta motif keterlibatan dalam gerakan. Termasuk juga dalam data sekunder adalah dalam sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya keterangan atau publikasi selain data primer di atas seperti keterangan dari pemerintah Sumenep, publikasi dari berbagai media, keterangan masyarakat yang terlibat tidak secara langsung dan seterusnya. Data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.[40]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, merupakan hal yang penting untuk memperhatikan prosedur pengumpulan data yang meliputi teknik dan instrumen pengumpulan data yang relevan. Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh

[40] Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung; Tarsito, 1994), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data-data yang obyektif. Adapun Teknik atau metode pengumpulan data penelitian ini yaitu;

a. Observasi

Observasi dipahami sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada obyek penelitian. Cara yang paling efektif dalam metode observasi adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamtan sebagai instrumen. Oleh sebab itu, dengan metode ini dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam skala bertingkat.[41]

b. Wawancara/Interview

Wawncara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewarancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban.[42] Dalam literatur lain, wawancara diartikan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[43] Wawancara terbagi menjadi *structured interview* dan *unstructured inetrview*. Yang pertama adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

[41] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008), 73
[42] Lexy J, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), 187
[43] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara yang tersusun secara sistematis.[44] Sedangkan yang kedua wawancara yang terstruktur dimana pewawancara sudah menyusun dan memiliki pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan secara runtut.[45]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[46] Dokumentasi yang dapat digunakan meliputi gambar (foto), tulisan (buletin, majalah dan sejenisnya), rekaman dan video yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Prosedur analisis data dalam penelitian fenomenologi berjalan melalui langkah-langkah sebagai berikut;

1. *Horizontalization*, yaitu tindakan membarikan *highlight* pernyataan atau statemen penting yang telah didapat melalui interview. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana partisipan mengalami sebuah fenomena
2. *Developing clusters of meaning*, upaya pengelompokan statemen dan pernyataan penting dalam tema yang serupa
3. *Textural description*, yaitu mendeskripsikan pengalaman partisipan mengenai suatu fenomena

[44] Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2008), 74.
[45] Ibid, 73
[46] Ibid, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Structural description*, adalah upaya deskripsi situasi atau konteks yang memengaruhi partisipan dalam mengalami sebuah fenomena
5. *Essentialization*, adalah menulis laporan yang berbentuk esensi pengalaman partisipan terhadap sebuah fenomena berdasarkan *textural* dan *structural description*.[47]

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian tesis ini terdiri dari lima bab. Adapun bab yang pertama terdiri dari; latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang gerakan sosial, yang terdiri dari; ragam teori gerakan sosial, patisipasi dan faktor-faktor pendorong keterlibatan individu dalam sebuah gerakan serta Pandangan Islam tentang keberlangsungan lingkungan dan kuturunan.

Bab ketiga adalah gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari; Kondisi geografis, Kondisi demografis penduduk, kondisi pendidikan, sosial budaya masyarakat, Praktek Jula-beli hingga makna tanah dan pergeserannya.

Bab keempat adalah analisis dan pembahasan penelitian yang terdiri dari Respon NU, kemunculan komunitas-komunitas, bentuk keterlibatan pemuda dalam

[47] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*, (Los Angeles; Sage Publication, 2013), 82. Lihat Juga Ian Dey, *Qualitative Data Analysis*, (London; Routledge, 1993), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan jaringan NU, motif keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU dan strategi gerakan jaringan NU untuk mempertahankan tanah.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari; kesimpulan, serta rekomendasi. Daftar pustaka serta daftar riwayat hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari tesis ini ditempatkan pada bagian akhir dari pembahasan penelitian tesis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Diskursus Gerakan Sosial

. Kajian gerakan sosial tidak lagi didominasi oleh negara-negara barat, namun juga telah menjadi fokus kajian negara-negara dunia ketiga dengan meminjam teori-teori yang sudah ada atau melakukan modifikasi untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial di negara tersebut.[1] Tidak mudah mendefinisikan Gerakan Sosial secara menyeluruh. Kenyataan bahwa gerakan sosial selalu lahir dengan latar dan *setting* berbeda di setiap dimensi ruang dan waktunya masing-masing menyulitkan penyusunan sebuah pengertian definitif yang universal. Beberapa ilmuan berusaha untuk mendefinisikan gerakan sosial sesuai dengan pendekatannya. Misalnya Piotr Sztompka yang mengatakan;[2]

> definisi yang memadai harus dapat membedakan fenomena gerakan sosial ini dari kategori lain, dan dari warga lain dari kategori yang sama. Jadi definisinya harus terdiri dari kompnen sebagai berikut; 1) kolektivitas orang yang bertindak bersama; 2) tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama; 3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal; 4) tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional. Jadi gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasikan perubahan dalam masyarakat mereka.

Piotr melanjutkan bahwa definisi tentang gerakan sosial juga diformulasikan oleh beberapa ilmuan lain; 1) Upaya Kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru (Blumer); 2) Tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau

---

[1] Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), hal. 1

[2] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ter, Alimandan (Jakarta; Prenada, 2011), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat tersebut (Turner&Killian).

Pakar lainnya mengemukakan ciri gerakan sosial yang lebih luas sebagai berikut; 1) wujud kesukaan untuk berubah di kalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan atau mendorong atau menghambat perubahan (Zald&Berger); 2) jenis khusus kelompok yang bertindak dengan persetujuan bersama; usianya lebih lama dan lebih kompak daripada segerombolan orang ramai, massa dan kerumunan, tetapi tak terorganisir seperti kelompok politik dan asosiasi lainnya (Heberle dalam Blanks); 3) rentetan interaksi yang terus menerus antara pemegang kekuasaan nasional dan organisasi yang berhasil menyatakan diri berbicara mengatasnamakan perwakilan yang kurang formal; dalam interaksi tersebut organisasi ini mengajukan tuntutan perubahan distribusi atau pelaksanaan kekuasaan dan kembali menuntut bersama pengunjuk rasa pendukungnya (Tilly).[3]

Keberagaman pendapat dalam memandang gerakan sosial juga diakui oleh James M Jasper. Dia berusaha menyederhanakan dengan mengatakan bahwa pemakaian umum menggambarkan gerakan sosial sebagai upaya-upaya yang terus-menerus dan sengaja yang dimaksudkan untuk mendorong atau memperlambat perubahan-perubahan sosial, terutama yang diluar kanal-kanal institusional yang normal yang didorong atau digalakkan oleh otoritas-otoritas yang berkuasa. Jasper menggarisbawahi anasir yang bisa memberikan karakteristik terhadap gerakan sosial, sehingga ia berbeda dengan “yang lain”. *Sustained* (terus menerus) memberikan arti sebuah “gerakan” berdeda dari

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa-peritiwa tunggal semisal kerusuhan atau huru-hara dan kerumunan unjuk rasa sesaat. Kegigihan dan keteguhan mereka seringkali membuat mereka berkembang menjadi organisasi formal, namun demikian, mereka juga bisa beroperasi melalui jejaring-jejaring sosial yang bersifat informal. *Intentional* (disengaja atau dimaksudkan) menghubungkan gerakan pada kultur dan strategi, hal ini bisa diterangkan sebagai berikut; masyarakat memiliki ide-ide tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana untuk memperolehnya. Sebuah gerakan memiliki tujuan, walaupun tujuan itu hanya berhubungan transformasi anggota dalam kelompok daripada dunia di luar gerakan. *Foster* dan *retard* yaitu gerakan sosial sebagai kekuatan yang mampu mengembangkan atau menghambat sesuatu. *Non Institutional* berarti gerakan sosial adalah entitas berbeda dari partai politik dan kelompok kepentingan reguler yang merupakan bagian utama dari banyak sistem politik. Meskipun harus diakui bahwa gerakan sosial seringkali menciptakan dan menjalin hubungan dekat dengan kedua entitas diatas.[4]

B. Ragam Gerakan Sosial

Persoalan gerakan sosial yang lahir dan muncul akibat dari beragam konteks, terlebih lagi tujuan dan misi gerakan sosial yang berbeda satu sama lain membuat upaya pengklasifikasian gerakan sosial menjadi beragam pula tergantung pada tolak ukur yang akan dipakai. Salah satu pemetaan yang cukup populer adalah pemetaan yang dilakukan oleh seorang antropolog David Aberle dalam bukunya *"The Peyote Religion Among The Navaho"*. Dia memperkenalkan

[4] James M. Jasper, "Social Movement", *Philososiologhy;The Blackwell Encyclopeia Of Sociology*, 4, ed. George Ritzer, et al. (Oxford; Blackwell Publishing, 2009), 4451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipologi gerakan sosial berdasarkan tolok ukur cakupan perubahan yang dimaksudkan, adapun kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut;[5]

1. Alternative Movement
2. Redemtive Movement
3. Reformative Movement
4. Revolutionary model Movement/Transformatif

Gerakan revolusioner atau transformatif dikonsepsikan sebagai sebuah gerakan yang bekerja untuk perubahan struktural yang menyeluruh. Tidak jarang mereka juga menggunakan aksi kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan ini misalnya direpresentasikan dalam gerakan keagamaan radikal. Kemudian gerakan reformasi (*reformative movement*) bekerja untuk menciptakan perubahan sosial yang bersifat parsial untuk merubah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Biasanya gerakan reformasi berangkat dari satu isu yang menjadi fokusnya. Namun demikian, dalam banyak kasus, isu tunggal tersebut menjadi batu loncatan untuk memulai *platform* perubahan yang lebih luas lagi. Sedangkan *redemtive movement* bekerja demi sebuah perubahan total pada level individu. Terakhir adalah *alternative movement*, yaitu kebalikan dari kategori yang ketiga dimana wilayah kerjanya mengenai perubahan parsial dalam individu-individu.[6]

Menurut Peter Burke tipe gerakan sosial dapat disederhanakan menjadi dua bagian. *Pertama* gerakan sosial untuk memulai perubahan dan *kedua* gerakan sosial sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi. Berkaitan dengan jenis gerakan sosial yang bervariasi sesuai dengan tolok ukurnya, Usman Kolip dalam bukunya

[5] Simon I. Flynn, *Narrative and Social Movement, In Sociology Reference Guide Theories Of Social Movements,* (California; Salem Press, 2011), 29
[6] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantar sosiologi politik mendasarkan tolok ukurnya pada enam variabel, yaitu; 1) Ruang Lingkup; 2) Jenis Perubahan; 3) Target Gerakan; 4) Metode Kerja; 5) Gerakan Lama dan Baru; 6) Jangkauan Gerakan. Berdasarkan ruang lingkup jenis gerakan sosial dibagi menjadi dua. *Pertama* gerakan reformasi yang didedikasikan untuk melakukan perubahan mengenai beberapa norma. Contoh gerakan semacam ini adalah gerakan buruh yang menuntut perubahan atau peningkatan hak-hak pekerja, gerakan lingkungan atau gerakan hijau yang menuntut perubahan hukum ekologi, atau bisa juga perubahan norma yang dimaksud termasuk juga norma agama seperti penolakan terhadap pornografi. Selain persoalan isu atau masalah, gerakan ini juga ditandai oleh metode gerakan yang kemungkinan menggunakan sikap reformis non-radikal untuk mencapai tujuan akhir. *Kedua* gerakan radikal yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sistem nilai secara segera melalui perubahan-perubahan substansi dan mendasar. Contohnya adalah gerakan hak sipil Amerika yang menuntut penuh hak-hak sipil dan persamaan dibawah hukum untuk semua orang Amerika. Kasus lain adalah gerakan solidaritas di Polandia yang melewati batas Ras, dimana mereka menginginkan transformasi tata nilai politik Stalinisme menuju tata nilai sistem politik demokratis, atau juga di Afrika Selatan terdapat gerakan penghuni gubuk Abahlali Base Mjondolo yang melakukan tuntutan dimasukkannya para penghuni gubuk secara penuh pada penghunian kehidupan kota.[7]

Gerakan sosial diukur dari jenis perubahannya terbagi pada dua kategori. *Pertama* gerakan inovasi yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai tertentu yang tidak umum. *Kedua* adalah gerakan konservatif, gerakan yang

[7] Usman Kolip, Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta; Kencana, 2013), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk menjaga norman-norma, nilai yang ada dan sebagainya. Contohnya adalah gerakan modern menentang penyebaran makanan transgenik yang bertujuan melawan perubahan toknologi secara spesifik. Selanjutnya gerakan sosial dilihat dari target gerakan terbagi dalam dua bagian pula. *Pertama* gerakan fokus berkelompok yaitu sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk memberikan efek pengaruh pada kelompok atau masyarakat pada umumnya, misalnya gerakan yang menganjurkan perubahan sistem politik. *Kedua* adalah gerakan fokus individu yang fokus gerakannya bersifat individu, dengan kata lain memberikan efek pengaruh pada tingkat personal, diantara gerakan semacam ini adalah gerakan-gerakan keagamaan.[8]

Selanjutnya gerakan sosial dilihat dari metode kerjanya juga terbagi pada dua macam. *Pertama* gerakan damai yaitu gerakan yang tidak memakai kekerasan dalam mencapai tujuannya dan berdiri dengan kontras terhadap gerakan "kekerasan". Contohnya adalah gerakan hak-hak sipil Amerika, gerakan Solidaritas Polandia. *Kedua* adalah gerakan kekerasan yang pada umumnya berisikan gerakan bersenjata seperti contoh tentara pembebasan nasional Zapatista dan gerakan pemberontakan lainnya. Gerakan Sosial juga bisa dikategorikan menjadi gerakan lama dan gerakan baru. *Pertama* gerakan lama bisa diidentifikasi pada gerakan-gerakan massa pada abad ke 19 yang berjuang untuk kelompok sosial tertentu, misalnya kelas pekrja, petani, orang kulit putih, orang kulit hitam. Biasanya pusat perhatian gerakan abad 19 berkisar pada tujuan materialis seperti peningkatan standart kehidupan, otonomi politik kelas pekerja dan sejenisnya. *Kedua* gerakan baru. Sedangkan gerakan baru menjadi gerakan yang dominan

[8] Ibid, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar paruh kedua abad ke 20 misalnya gerakan feminis, gerakan *pro-choice*, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan, gerakan anti-nuklir gerakan perdamaian dan semacamnya. Gerakan sosial juga bisa dibaca melalui jangkauan gerakan. Dalam hal ini gerakan terbagi dalam tiga macam. *Pertama* gerakan secara internasional yang memiliki tujuan dan sasaran dalam skala global. Gerakan semacam ini pertama kali bisa dirujuk pada aliran Marx. *Kedua* gerakan lokal, yang didasarkan pada tujuan lokal atau regional, seperti gerakan melindungi alam tertentu, mempertahankan bangunan yang akan dihancurkan. *Ketiga* gerakan semua tingkatan, yaitu gerakan sosial yang berkaitan dengan kompleksitas pemerintahan pada abad ke 21 dan bertujuan memiliki pengaruh di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.[9]

C. Historisitas dan Macam-Macam Teori Gerakan Sosial

Studi tentang gerakan sosial mulai mendapatkan perhatian dan berkembang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Gerakan sosial mulai diteorisasikan dan dikonseptualisasikan awalnya sekitar tahun 1940 an. perkembangan teori dan konsep seputar gerakan sosial dapat dikategorisasikan dalam tiga periode. Periode pertama yang dimulai pada tahun 1940 an memiliki kecenderungan melihat gerakan sosial dalam aspek irasional. Sedangkan pada periode kedua, yaitu sekitar tahun 1960 an, terjadi pergeseran kecenderungan. Pada periode kedua ini, gerakan sosial sudah mulai dipandang dalam kerangka gerakan kemasyarakatan sebagai aktor rasional dalam sebuah struktur sosial.

[9] Ibid, 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya trend pada periode ketiga yang terjadi sekitar tahun 1970 an mengalihkan fokusnya pada dekonstruksi gerakan sosial.[10]

Pandangan yang mendominasi periode pertama tentang gerakan sosial, lebih melihatnya secara negatif, dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Perangkat ini digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti perkumpulan massa (*mass action*), kerusuhan, dan lain-lain. Robert Mirsel menggambarkan periode pertama kajian gerakan sosial sebagai era yang lebih meyoroti aspek-aspek keterlibatan individu dalam gerakan, fenomena perkumpulan massa, tingkah laku kolektif dan perlawanan terhadap institusi lain yang dianggap ancaman. Periode kedua kajian gerakan sosial didasarkan pada pandangan yang lebih positif, gerakan sosial diposisikan sebagai gerakan yang terorganisasi serta memiliki strategi yang rasional untuk mengubah kondisi-kondisi struktural tertentu seperti gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan kemerdekaan dan anti kolonial, gerakan anti-komunis , gerakan mahasiswa. Dalam penjelasan Robert Mirsel, periode kedua ini lebih fokus pada aspek-aspek organisasi, perilaku organisatoris, tujuan dan cita-cita, mobilisasi, strategi penggalangan, perilaku kolektif, aksi-aksi dalam struktural, keterkaitan perilaku dan aksi dan perilaku gerakan. Periode ketiga disebut dekonstruksi. Para sosiolog periode ketiga ini menanggapi kenyataan dan pemikiran baru yang menyertai perkembangan gerakan sosial dengan teori dan konsep kebudayaan, pembingkaian (*framing*) dan konstruksi

[10] Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Nusantara*; *Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta; Kencana, 2013), 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas. Pada periode ketiga ini, fokus kajian digeser pada aspek ideologi dan kepercayaan yang menyertai kebangkitan gerakan sosial.[11]

Sepanjang sejarah kajian gerakan sosial, telah banyak teori-teori yang dilahirkan ilmuan-ilmuan sosial untuk menganalisis gerakan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Joe Fowereker bahwa kebanyakan teori gerakan sosial dihasilkan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Meskipun telah banyak teori yang dihasilkan, masih ada pertanyaan besar tentang kapasitas teori-teori tersebut dalam menjelaskan gerakan sosial di tempat dan waktu yang berbeda. Joe dalam pendahuluan menyatakan "can this theory truly address the properties of social mobilization in very different political dan cultural contexs? In other word, does the theory travel well".[12] Terlepas dari pertanyaan tersebut, keberagaman teori dan pendekatan menjadi nilai lebih yang menyediakan pilihan teori untuk melakukan analisis terhadap gejala gerakan sosial. Beberapa teori diantaranya yaitu;[13]

1. New Social Movement Theory
2. Value-Added theory
3. Structural-Strain Theory
4. Relative Deprivation Theory
5. Resource Mobilization Theory
6. Maas society theory

[11] Ibid, 313-317
[12] Joe Foweraker, *Theorizing Social Movement In Latin America*, (London; Pluto Press, 1995), 3
[13] Simon I. Flynn, *Narrative and Social Movement, In Sociology Reference Guide Theories Of Social Movements*, (California; Salem Press, 2011), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori-teori diatas menggambarkan tradisi pendekatan dalam mengkaji peristiwa gerakan sosial. Syarifudin Jurdi berusaha mengelompokkan beberapa teori dalam tiga arus pendekatan. Pertama teori perpecahan masyarakat. Kedua adalah teori mobilisasi sumber daya. Dan terakhir yang ketiga adalah teori berorientasi-identitas. Dua arus teori terakhir merepresentasikan dua kutub keilmuan, yaitu tradisi teori Mobilisasi Sumber Daya dan teori berorientasi-identitas. Yang pertama lahir dari tradisi intelektual Amerika, sedangkan yang kedua lahir dan berkembang dalam tradisi intelektual eropa.

Resource MobilizationTheory (RMT) lahir sebagai respon terhadap tradisi *Mass Society Theory* yang mendominasi kajian gerakan sosial di awal era sebelumnya. Ekspresi ketidakpuasan terhadap kerangka berfikir *Mass Society Theory* ini tampak menonjol dari asumsi dasar RMT sebagai titik berangkat sebuah teori. RMT menolak asumsi dasar tentang perasaan (*feeling*), ketidakpuasan (*grievances*) dan berbagai keterlibatan elemen-elemen psikologis dalam mengkaji gerakan sosial. Para teoretisi dalam arus ini mempertanyakan asumsi bahwa keterlibatan orang-orang dalam sebuah gerakan didasarkan atas predisposisi psikologis. Gerakan sosial kontemporer dalam keyakinan RMT mensyaratkan sejumlah komunikasi dan organisasi yang canggih daripada sekedar faktor-faktor yang bersifat psikis. Dalam tradisi RMT perhatian lebih difokuskan pada aspek politik dan ekonomi yang oleh para pengkritiknya dipandang bersifat *materialism*. Keterlibatan dalam sebuah gerakan dinilai sebagai sebuah keputusan dari proses rasional partisipan daripada aspek psikis. Dengan demikian, RMT dapat dikatakan sebagai upaya penelusuran basis rasionalitas gerakan sosial. RMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memfokuskan pada proses sosial yang memungkinkan gerakan sosial muncul dan mengalami kesuksesan atau kegagalan.[14]

Untuk menelusuri basis rasionalitas gerakan sosial, para teoretisi RMT mengaplikasikan berbagai model analisis. Olson misalnya mengaplikasikan model Utilitarian dalam menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dengan menganalisis konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*). Biaya (*cost*) disini meliputi; waktu, uang keamanan personal, hilangnya pekerjaan. Dengan begitu menurut Olson, gerakan Sosial harus mampu menawarkan pilihan insentif, misalnya prestise, gaji, kepemimpinan agar bisa menarik partisipasi orang dalam sebuah aktivitas kolektif. Sedangkan Oberschall lebih berkonsentrasi pada kekuatan-kekuatan yang berkontribusi terhadap kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Perkembangan dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan baik bersifat internal (*leadership, level of available resource, group size, degree of internal organization*) maupun eksternal (*the level of societal reppression, extent of external sympathizers, number and strength of polity groups*). Pichardo menyatakan bahwa interaksi berbagai faktor dan elemen tersebut menjadi faktor determinan dalam kesuksesan sebuah gerakan sosial. Phicardo kemudian melihat ada tiga elemen dasar teori RMT tentang terjadinya sebuah gerkana sosial, sumberdaya, motivasi dan lingkungan politik. Pendekatan ini menganalisis seputar pengembangan strategi, pengambilan keputusan oleh aktor gerakan dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Kemunculan dan capaian

[14] Oman Sukmana "Konvergensi *Resource Mobilization Theory* dan *Identity-Oriented Theory*" Sosiologi Reflektif, Vol. 08, No. 01, 2013, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivisme gerakan dipandang sebagai hasil proses terbuka yang dipengaruhi oleh serangkaian taktik, strategi dan keputusan para aktor dalam kontek relasi kuasan dan interaksi konfliktualnya.[15]

Selanjutnya dalam tradisi RMT dikembangkan pula model analisis yang berbeda. Pertama adalah *The Political-Interactive model (The political-process model)*. Model analisis proses politik meletakkan gerakan sosial, negara dan sistem politik yang berlangsung sebagai faktor determinan eksistensi serta eskalasi gerakan sosial. Model ini memandang penting perubahan struktur kesempatan untuk keberadaan aksi kolektif. Perubahan struktur kesempatan tidak bekerja sendiri, keberadaan jejaring (*networking*), hubungan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas menjadi komponen pelengkap untuk kesuksesan gerakan sosial. Dengan kata lain, kecenderungan negara apakah represif atau tidak juga ikut menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial.[16] Penggunaan model analisis proses politik atau kesempatan politik yang meletakkan perubahan struktur sistem politik sebagai pemicu gerakan pertama kali diaplikasikan oleh Peter Eisinger dalam artikel *American Political Science Review* untuk menjelaskan gerakan sosial, revolusi dan nasionalisme. Situmorang mencatat bahwa Eisinger meminjam konsep Tocqueville dimana revolusi terjadi bukan pada saat masyarakat tertentu tertekan. Tetapi aksi kolektif muncul kepermukaan ketika sebuah sistem yang tertutup mengalami keterbukaan.

[15] Ibid, 44
[16] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara teoretisi yang berada dalam kelompok model ini adalah Oberschall, Tlly, Gamson dan McAdam.[17]

Sementara model kedua adalah *The Organizational-enterpreneur model (The Professional Organizer Model)*. Model analisis ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini lebih cenderung meletakkan dinamika oraganisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya sebagai faktor yang signifikan dalam keberhasilan sebuah gerakan. Model ini pada dasarnya mengembangkan teori pengembangan organisasi dan memandang bahwa organisasi adalah *Carrier of Social Movement*. Organisasi gerakan sosial diharapkan mampu mengelola sumber-sumber (*jobs, income, savings, authority,moral commitment, trust, frienship, skill*) yang tersedia.[18]

Di lain pihak teori Berorientasi-Identitas muncul sebagai reaksi atas kegagalan teori RMT dalam menjelaskan beberapa peristiwa gerakan sosial kontemporer. Para teoretisi pendukung tori Berorientasi-Identitas yang hidup dalam tradisi intelektual Eropa memandang RMT yang terlalu rasionalistik dan materialistik gagal dalam memberikan eksplanasi pada gerakan-gerakan baru seperti ekologi, fenimisme, perlucutan senjata dan perdamaian.[19] Gerakan semacam ini dipandang sebagai aktor aksi kolektif yang sadar berjuang dan meletakkan dirinya berhadap-hadapan dalam bingkai relasi kekuasaan untuk

[17] Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan,* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), 4
[18] Oman Sukmana "Konvergensi *Resource Mobilization Theory* dan *Identity-Oriented Theory*" Sosiologi Reflektif, Vol. 08, No. 01, 2013, 45.
[19] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun identitas baru, menciptakan ruang demokratis bagi aksi sosial otonom.[20]

Sebagai oposisi terhadap RMT, teori Berorientasi-Identitas menaruh perhatian seputar integrasi dan solidaritas kelompok yang terlibat aksi kolektif. Para teoretisi Orientasi-Identitas pada satu sisi mengadopsi beberapa konsep Marxist seperti perjuangan, mobilisasi, kesadaran dan solidaritas untuk konstruksi teoretis mereka. Di sisi lain, mereka menolak tesis reduksionisme dan deterministik materialisme karena redundansi teoretis mereka. Pranata dan formasi sosial, gerakan sosial baru di era kontemporer sudah melampaui ide tentang kelas dan melewati batas kondisi material. Partisipan Gerakan Sosial Baru menyatakan diri mereka bertindak bukan untuk memperjuangkan nilai tenaga kerja (*Labour Values*), lebih dari mereka lebih tertarik dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Maka, dapat dikatakan bahwa teori Berorientasi-Identitas adalah teori yang berorientasi *post-marxist*. Konsep teori Berorientasi-Identitas memandang hubungan antara gerakan berorintasi-identitas dan tindakan kolektif adalah upaya penelusuran terhadap identitas, otonomi dan pengakuan manusia.[21]

Identitas kolektif dalam perkembangannya, telah menjadi pusat sehubungan dengan kajian gerakan sosial. Pasalnya, identitas kolektif dipandang selalu menyertai aksi kolektif, baik posisinya sebagai prasyarat sebuah gerakan atau sebagai produk dari gerakan atau aksi kolektif. Identitas kolektif lebih jauh bahkan menjadi alat analisis bagi kemunculan, lintasan, dampak gerakan. Lebih

[20] Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Nusantara*; *Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta; Kencana, 2013), 335
[21] Oman Sukmana "Konvergensi *Resource Mobilization Theory* dan *Identity-Oriented Theory*" Sosiologi Reflektif, Vol. 08, No. 01, 2013, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh lagi kajian tentang identitas juga mewarnai dimensi analisis bangunan masalah ketidakpuasan, proses pembingkaian, motivasi keikutsertaan, pilihan taktik, hasil dan emosi. Pada kasus Gerakan Sosial Baru misalnya yang terjadi dalam masyarakat pasca-industri (memiliki perbedaan dengan gerakan terdahulu dalam terminologi ideologi, sumber, struktur, gaya dan tujuan), identitas kolektif menggantikan kesadaran kelas (*class conciousness*) sebagai faktor yang menyebabkan mobilisasi dan keterlibatan individu dalam sebuah gerakan.[22]

Akhirnya, teori tentang aksi kolektif harus menjelaskan konsep sistemis meliputi identitas kolektif (*collective identity*), solidaritas (*solidarity*), komitment (*commitment*). Identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan, nilai, perasaan dan tujuan bersama. Solidaritas memberikan perhatian pada tingkat kohesivitas sosial yang ada dalam dan bersama kelompok. Solidaritas melakukan eksplorasi tentang hubungan individu dan kolektivitas. Komitmen lebih fokus pada investasi individu dalam garis aksi individu yang konsisten dengan garis aksi yang diunculkan oleh kolektivitas, dengan perhatian utama aktivitas individu.[23]

D. Hubungan *Networking* dan Partisipasi

Konsep jaringan (*Networking*) dalam pembahasan gerakan sosial dikaitkan secara khusus dengan partisipasi atau rekrutmen gerakan sosial. Sekitar tahun 1970, tinjauan akademis yang telah mapan masih memandang keterlibatan individu dalam sebuah gerakan sosial lebih sebagai akumulasi dari penyimpangan pribadi dan kekacauan sosial di tengah masyarakat, "*mix of personal pathology*

[22] Ibid, 49
[23] Ibid, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

and social disorganization". Anggapan ini menjelaskan keterlibatan individu dalam aktivisme protes pada tingkat mikro disebabkan oleh lokasi individu tersebut yang marjinal dan tidak adanya integrasi dalam lingkungan pergaulan mereka. Sedangkan pada tingkat makro, didorong oleh kekacauan dalam susunan sosial keseharian mereka seiring dengan proses-proses perubahan radikal dan faktor modernisasi.[24]

Sebaliknya, partisipasi dalam sebuah gerakan dilihat khususnya oleh para teoretikus dan para simpatisan yang terlibat langsung dalam gerakan bukanlah perilaku yang disfungsi, karena menurut pandangan mereka, orang-orang yang terlibat dalam sebuah gerakan adalah mereka yang kaya sumber-sumber kognitif, skil enterpreneur dan politik. Hal yang penting adalah mereka merupakan individu-individu yang kaya akan sumber-sumber relasional yang memungkinkan untuk berintegrasi dengan lingkungan sosial dan kelompok-kelompoknya, terlibat secara mendalam dengan sejumlah organisasi yang luas, baik yang bersifat politik, kerelawanan atau kelompok-kelompok komunitas.[25]

Argumen-argumen teoretis tentang *networking* dan rekrutmen ini mendorong beberapa investigasi empiris, penelitian Snow melaporkan bahwa jaringan sosial mempengaruhi 60%-90% anggota berbagai kelompok keagamaan dan politik dengan pengecualian kelompok Hare Khrisna. Senada dengan Snow, hasil investigasi Strak dan Bainbridge (1980) menunjukkan bahwa ikatan personal yang kuat dengan pemimpin-pemimpin atau anggota yang berpengaruh sebagai penentu yang kuat untuk rekrutmen menjadi keanggotaan atau anggota sepanjang

[24] Mario Diani, "Network and Participation", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006) 340.
[25] Ibid, 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa dalam sekte keagamaan. *Networking* juga menjadi perantara penting keterkaitan seorang dengan kelompok agama tertentu dan keyakinan-keyakinan konvensional. Selain kelompok keagamaan, Diani dan Lodi juga mencatat bahwa 78% para aktifis lingkungan di Milan Italia direkrut melalui jaringan-jaringan pribadi atau asosiasi.[26]

Peran *Networking* dalam partisipasi sebuah gerakan sosial dikonfirmasi oleh temuan McAdam yang menekankan bahwa bergabungnya individu dalam sebuah gerakan berkorelasi dengan tiga faktor; 1) jumlah individu-individu organisasi adalah anggota-anggota kelompok khususnya politik; 2) jumlah pengalaman-pengalaman aksi kolektif sebelumnya; 3) hubungan-hubungan dengan individu-individu lain yang telah terlibat dalam kampanye atau gerakan tersebut. Sejalan dengan McAdam, Della Porta juga menemukan fakta keterlibatan dalam kelompok-kelompok teroris sayap kiri di Italia ternyata dijembatani oleh hubungan-hubungan interpersonal yang kuat, dalam temuan Della Porta, orang-orang yang terlibat dalam kelompok sayap kiri Italia diatas kebanyakan merupakan teman dekat dan kerabatnya.[27]

Kekuatan *Networking* sebagai pendorong keterlibatan dalam sebuah gerakan atau aksi kolektif terasa nyata saat dikaitkan dengan bentuk aksi dan gerakan dimana individu akan terlibat. Seperti perbedaan saat seorang bergabung dengan sebuah sekte keagamaan yang bertentangan dengan dunia sekular mungkin tidak memerlukan jaringan kuat, hal sebaliknya terjadi pada organisasi politik yang radikal. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa semakin

[26] Ibid, 342
[27] Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya dan merugikan (mahal) sebuah gerakan atau aksi kolektif, maka semakin kuat dan banyak ikatan yang jadi prasyarat seseorang untuk berpartisipasi, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian McAdam seputar rekrutmen proyek HAM yang dikenal dengan *Freedom Summer* dimana ia bertujuan untuk menuntut partisipasi orang-orang kulit hitam di negara-negara Amerika Serikat selatan pada tahun 1960 an.[28]

Namun demikian, menjelaskan persoalan rekrutmen dan partisipasi dengan variabel *networking* tidak selamanya relevan. Tidak sedikit temuan yang mengidektifikasi peristiwa mobilisasi terjadi diluar hubungan *networking*, atau juga mobilisasi tidak terjadi walaupun di sana terdapat jaringan sosial. Luker misalnya menyajikan data tentang mobilisasi anti aborsi di California yang hanya memuat 1-4% peserta yang direkrut melalui *networking*. Contoh lain adalah anggota sekte Hare Krishna yang mayoritas bergabung dalam kelompok tersebut dengan tanpa adanya ikatan atau hubungan sebelumnya. Keberadaan kontak antar individu yang banyak juga tidak serta merta menjamin orang untuk bergabung, sebagaimana temuan Mullin pada komunitas lokal Brisbane berkaitan dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan (Tol) yang melewati lingkungan mereka, dalam kasus ini, meskipun jaringan sosial terbangun antar warga Brisbane, namun tidak terjadi mobilisasi.[29]

Ketersediaan *networking* yang tidak selalu menjadi penjamin partisipasi dalam sebuah gerakan atau aksi kolektif pada akhirnya memancing para teoretisi untuk melakukan kualifikasi poin-poin. Upaya ini berusaha untuk menjawab

[28] Ibid, 117.
[29] Mario Diani, "Network and Participation", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006) 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan seperti, *"which network explain what?"* atau semacam *"under what conditions do specific network become relevant"*. Dalam hal ini, McAdam dam Paulsen mencoba menentukan dimensi-dimensi ikatan sosial yang penting dan bagaimana corak-corak ikatan yang berbeda tersebut dapat membentuk hasil keputusan orang untuk ikut berpartisipasi atau tidak. Ia menjelaskan keterpaduan dalam hubungan organisasi, memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang telah bergabung secara suka rela tidak selalu bisa memprediksi partisipasi seorang. Lebih dari hal tersebut, yang menjadi penting adalah persoalan komitmen yang kuat terhadap identitas tertentu yang ditempa dan diteguhkan melalui ikatan-ikatan baik yang bersifat organisasi atau ikatan-ikatan privat lainnya. Seperti misalnya seorang yang menjadi anggota kelompok "Sayap-Kiri" pada masa lalunya tidak bisa meramalkan partisipasi dalam gerakan *Freedom Summer*, tanpa dibarengi dengan identifikasi subjektif yang kuat dengan lingkungan tersebut. Sebutlah juga misalnya orang yang terhubung secara langsung dengan orang lain yang sudah lebih dulu bergabung dalam suatu gerakan atau aksi kolektif mungkin saja tidak dapat menjadi prasyarat untuk rekrutmen. Sebaliknya, orang bisa saja bergabung dengan sebuah gerakan atau aksi kolektif yang telah berpadu dalam jaringan organisasi jika merasa cocok dan sesuai dengan kampanye atau organisasi tersebut, walaupun tanpa adanya ikatan secara langsung dengan orang yang telah lebih dulu bergabung.[30]

Pada akhirnya yang lebih harus diperhatikan adalah persoalan mekanisme daripada korelasi. Jadi, penelitian sebaiknya diarahkan untuk menerangkan

[30] Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana sebenarnya *neworking* bekerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa teoretikus yang burusaha menawarkan penjelasan bagaimana mekanisme dan dinamika *networking* bekerja. Kitts misalnya membangun penjelasannya dengan membedakan tiga mekanisme dari *networking*, yaitu *information, identity* dan *exchange*. Sedangkan McAdam mengidentifikasi empat unsur mekanisme meliputi, *recruitment attempts, identity-movement linkages, positive and negative influence attempts*.

Upaya yang paling mutakhir dilakukan oleh Florence Passy, ia membangun penjelasannya tentang mekanisme kerja *networking* di atas konsepnya yang membedakan tiga fungsi *networking* dalam proses mobilisasi. Adapun ketiganya adalah; 1) *socialization*; 2) *structural-connection*; 3) *decision-shaping*. Dalam ulasannya tersebut Passy memperlihatkan bagaimana fungsi-fungsi *networking* mewujud dalam bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan karakter organisasi yang tengah mencoba melakukan rekrutmen dan jarak penglihatannya dalam ruang-ruang publik.[31]

Ketiga fungsi *networking* diatas bekerja sepanjang proses partisipasi seseorang pada sebuah gerakan atau aksi kolektif dalam ruang-waktu yang berbeda-beda. Pada tahapan awal, *networking* bekerja dengan cara menciptakan kecenderungan awal (*initial disposition*) untuk berpartisipasi. Ia bekerja sebagai medium sosialisasi seseorang yang pada gilirannya akan membantu pembentukan dan penguatan identitasnya (identifikasi). Mengutip Donatella dan Mario Diani *"Identity emerges from the processes of self-identification and external*

[31] Mario Diani, "Network and Participation", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

recognition" yang secara sederhana menunjukkan identitas adalah proses identifikasi diri dan pengakuan eksternal.[32] Identitas dibentuk dan mewujud melalui relasi sosial yang berinteraksi terus-menerus, sehingga identitas mengalami penguatan. Hal ini memberikan individu kesadaran (politis) yang akan membawanya lebih dekat secara ideologis pada isu yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, *networking* sosial mengambil peran yang urgen sebagai ruang interaksi sosial, meskipun interaksi sosial bukan satu-satunya medium pembentukan identitas dan kesadaran politik, Namun interaksi sosial tetap memainkan peran kunci. Selain interaksi sosial, identitas dapat terbentuk melalui media sosialisasi lain, misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu. Selain itu, orientasi kultural seseorang berjalan dan berkembang lewat jejaring interaksi sosialnya. Dalam hal ini, jejaring sosial sekali lagi menjadi ruang interaksi dimana transmisi makna-makna (simbol, ritual dan narasi-narasi) berlangsung. Orientasi kultural ini akan membangun dan semakin membuat solid identitas sekaligus kerangka kognitif individu yang akan membantunya menafsirkan realitas sosialnya. Pada dimensi ini, keterlibatan dalam sebuah gerakan atau aksi kolektif adalah proses identifikasi. Orang yang terlibat dalam aksi kolektif biasanya adalah mereka yang berbagi norma dan nilai tertentu. Saat seseorang terlibat dalam jejaring formal atau informal, maka dia telah masuk dalam struktur interaktif yang akan membuat mereka dapat melakukan definisi-redefinisi kerangka

[32] Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interpretatifnya. Pada gilirannya, hal ini akan membantu proses pembentukan dan penguatan identitas dan membuat kesadaran politisnya semakin solid.[33]

Pada tahap selanjutnya *social networking* bekerja sebagai bagian mekanisme partisipasi dalam aksi kolektif secara nyata. Kecenderungan awal -melalui identifikasi- tidak cukup sebagai prasyarat keterlibatan seorang dalam aktivisme secara nyata. Ia akan tetap menjadi kecenderungan awal selama tidak ada kesempatan (*opportunity*) untuk mewujudkannya dalam aksi nyata. Dalam tataran ini, ikatan-ikatan sosial menjadi satu kanal utama yang menyediakan kesempatan bagi para partisipan potensial untuk mewujudkan kecenderungan awalnya dalam sebuah aktivisme. Walaupun –sekali lagi- ikatan sosial bukan satu-satunya medium yang dapat menyambungkan para aktor-aktor potensial dengan kesempatan tersebut, masih ada medium lain seperti aksi atau iklan gerakan itu sendiri dan laporan-laporan media tentang gerakan yang dapat menarik para partisipan potensial. Jadi, jejaring sosial ini memfasilitasi para aktor yang prospek pada kesempatan untuk mobilisasi dan merubah kesadaran politisnya dalam bentuk aksi nyata, dalam ungkapan lain, *structural-connection* beroperasi sebelum partisipan bergabung secara nyata dalam gerakan sosial.[34] Hubungan dengan aktor yang telah lebih dulu bergabung dalam gerakan menjadi fakttor penting juga telah terkonfirmasi dalam beberapa penelitian.[35]

Tahapan selanjutnya dan terakhir dari mekanisme kerja *social networking* dalam persoalan partisipasi dan rekrutmen adalah kapasitasnya dalam membentuk

---

[33] Florence Passy, "Individual Network", dalam, *Social Movement and Network; Relational Approaches to Collective Action*, ed. Mario Diani dan Doug McAdam, (New York; Oxford University Press, 2003), 24.
[34] Ibid, 24
[35] Ibid, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan seseorang atau *decision-making function*. Sebelum seorang benar-benar mengaktualisasikan dirinya dalam partisipasi nyata pada sebuah gerakan atau aksi tertentu, maka ia membuat serangkaian keputusan-keputusan setelah lebih dulu mengalami faktor-faktor pendorong (sosialisasi , hubungan struktural pada kesempatan mobilisasi). Pada tahap ini *social networking* mengambil peran dalam tahap akhir proses partisipasi individu dengan pembentukan preferensi-preferensi dan persepsi-persepsi yang akan membantu proses pengambilan keputusan oleh individu. Dengan cara seperti itu, individu dibawa untuk ikut terlibat dalam sebuah gerakan atau aksi kolektif. Dalam kasus ini, Passy mempertimbangkan kapasitas individu yang dapat melakukan definisi-redefinisi dunia sosialnya maupun posisi dirinya dalam dunia (*self-positioning*) yang setidaknya sebagian akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Disini relasi sosial akan menciptakan dan menopang struktur makna-makna berkontribusi pada proses definisi preferensi-preferensi dan persepsi individu. Persepsi yang berubah-berubah sesuai dengan peristiwa-peristiwa kehidupan seorang, peristiwa-peristiwa eksternal dan juga merupakan hasil dari interaksi kehidupan setiap hari memiliki arti bahwa individu dapat melakukan definisi ulang secara terus-menerus. Dalam proses tersebut, *social networking* bekerja dan membentuk secara luas persepsi dan preferensi individu. Jadi, preferensi-preferensi, persepsi dibentuk melalui interaksi sosial, namun bukan berarti pembentukan ini dideterminasi oleh interaksi sosial. Individu memasukkan interaksi kongkretnya dalam diri mereka dan mengadaptasi pengetahuan sosial yang mereka dapat dari interaksi sebelumnya menjadi informasi baru. Cara mereka merumuskan struktur makna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada proses kreatif *social learning*. Dengan demikian, preferensi-preferensi adalah hasil dari kemampuan individu untuk membuat arti dari pasang-surut interaksi secara terus-menerus. Proses diatas disebut oleh Passy sebagai proses dua arus yang berjalan dalam relasi sosial, yaitu beroperasi di hilir saat jejaring memproduksi makna-makna yang dileburkan oleh individu ke dalam dirinya, dan satu lagi beroperasi di hulu dimana persepsi dikomunikasikan dengan orang lain. Passy mengklaim usahanya tersebut sebagai upaya untuk menjembatani jurang antara tradisi teori-teori yang berakar pada strukturalis dan tradisi teori-teori yang berakar pada rasionalis.[36]

E. Motif-Motif Partisipasi

Berbicara tentang motif-motif yang mendorong partisipasi dalam kajian gerakan sosial banyak melahirkan pendekatan-pendekatan teoretis. Sejauh ini teoretikus sosial-psikologi telah menawarkan tiga macam motif partisipasi, yaitu; 1) *instrumentality*; 2) *identity*; 3) *group-based anger*. Selain tiga di atas terdapat satu motif lagi yang ditambahkan, yaitu *ideology motive*. Motif adalah hasrat untuk mencapai sebuah tujuan.[37] Dalam kasus tertentu, motif-motif tersebut dapat saja saling berinteraksi, sebut saja ideologi yang kuat bisa saja membangun tingkat identifikasi.[38]

---

[36] Ibid, 26

[37] Jacquelin Van Stekelenburg dan B. Klandersmen, "Individual in Movement; A Social Psychology of Contention", dalam, *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, ed. B. Klandermen dan Conny Roggeband, (New York; Spinger, 2007), 179.

[38] B. Klandersmen, "The Demand and Supply od Participation; Social-psychological Correlates of Participation in Social Movements", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama Motif Instrumental yang secara teoretis berakar pada ekspansi teori psikologi-sosial *resource mobilization* memandang bahwa mereka yang berpartisipasi dalam gerakan sosial percaya bahwa situasi dapat dirubah dengan biaya yang terjangkau. Partisipasi dalam sebuah gerakan dipandang sebagai pilihan rasional dari ekspektasi bahwa aksi atau protes akan melahirkan hasil-hasil tertentu dan juga nilai dari hasil-hasil tersebut. motif instrumental ini adalah model yang ditawarkan Klandersmen dari hasil penggabungan teori *expectancy value* dan teori *collective action*. Dalam hal ini, individu diasumsikan sebagai aktor pengambil keputusan yang rasional.

Kedua Motif Identitas yang dibangun di atas sebuah asumsi bahwa; identifikasi yang kuat dengan sebuah kelompok membuat individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif atas nama kelompok tersebut lebih mungkin terjadi. Motif atas dasar identitas memiliki makna kenyataan-kenyataan yang membuat seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan "yang lain" yang terlibat dalam gerakan. Aksi kolektif diposisikan sebagai suatu cara untuk menunjukkan "siapa kita" dan "untuk apa kita berdiri". Jadi, para anggota mempunyai pemikiran bahwa "kita" mengartikan kesamaan dalam banyak hal (keluhan/penderitaan bersama, maksud/arah, nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama). [39]

Motif Kemarahan Berbasis Kelompok. Van Zomeren dan koleganya menawarkan "emosi" ini disamping Instrumental. Karena itu, mereka selanjutnya menawarkan sebuah wacana dua jalan dalam pendekatan meraka atas partisipasi

[39] Jacquelin Van Stekelenburg dan B. Klandersmen, "Individual in Movement; A Social Psychology of Contention", dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, ed. B. Klandersmen dan Conny Roggeband , (New York; Spinger, 2007), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi kolektif. Mereka mengambil *appraisal theory oe emotion* sebagai titik tolak. Teori ini menyusun panilaian, emosi dan aksi sebagai medium masyarakat mengatasi peristiwa-peristiwa dalam dunia sosial mereka. Dalam perkembangannya, teori ini membedakan antara *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping*. Kategori pertama, saat orang memperoleh informasi tentang aksi dan mobilisasi untuk tujuan merubah realitas, maka saat itu orang tersebut telah masuk dalam kategori pertama. Kategori kedua, fungsi *emotion-focused* diarahkan pada mengatur emosi yang berkaitan dengan sebuah situasi. Para pelopor teori ini mengungkapkan para onggota kelompok sebagai orang-orang yang meresa keadaan-keadaan yang merugikan lebih sebagai penilaian kolektif dalam terma kelompok atas peristiwa-peristiwa daripada terma individu. Dalam *problem-focused coping* derajat keberhasilan kelompok (*group efficacy*) dan dukungan aksi menempati posisi penting. *Group efficacy* merujuk pada kepercayaan bahwa masalah yang berkaitan dengan kelompok bisa diatasi dengan usaha kolektif, orang terlibat dalam aksi kolektif karena untuk merubah realitas. Disini, aksi kolektif diartikan sebagai strategi instrumental untuk mengatasi masalah kelompok. Sedangkan dalam *emotion-focused coping* yang kemudian dikenal juga dengan *group-based anger* ketidakadilan dan dukungan opini sosial[40] memegang peran kunci. Ketidakadilan prosedural ditambah opini sosial menjadi mekanisme yang membantu pendefinisian ketidakadilan bersama yang tengah

[40] Opini sosial merujuk pada persepsi bahwa kawan anggota kelompok berbagi kondisi ketidakadilan yang tengah dialami bersama-sama (Lihat B. Klandersmen dan Conny Roggeband, *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, 182).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami. Penilaian ketidakadilan dan opini sosial diyakini dapat mendorong aksi kolektif karena membangkitkan emosi seperti kemarahan.[41]

Motif Ideologi[42] terutama sekali dikembangkan oleh para teoreikus gerakan sosial yang merasa tidak puas dengan pendekatan struktural yang berlebihan dalam teori *resource mobilization* dan *political process*. Sebaliknya, mereka menekankan semacam faktor-faktor kreatif bersifat kultural tentang gerakan sosial, narasi-narasi, emosi-emosi dan kemarahan. Pendekatan ideologi terhadap kajian aksi atau protes merujuk pada nilai-nilai masyarakat dan penilaian mereka tentang terancamnya eksistensi nilai tertentu. Dalam sudut pandang pendekatan ini, keterlibatan seseorang dalam sebuah aksi adalah untuk mengekspresikan pandangan hidup seseorang. Asumsi fundamentalnya biasanya di dasarkan pada penilaian dan persepsi bahwa sebuah peristiwa atau kebijakan (pemerintahan) yang tengah dilawan dipandang tidak memiliki legitimasi dan akan berlawanan dengan nilai-nilai fundamental. Jadi, rangkaian nilai-nilai yang diyakini oleh individu dapat menentukan secara mendalam bagaimana misalnya sebuah kebijakan, baik sarana atau tujuannya akan dinilai dan dievaluasi.[43]

Nilai sebagaimana digambarkan oleh Rokeach adalah keyakinan-keyakinan yang bersifat permanen, ia akan mempengaruhi bagaimana sebuah tindakan atau keadaan akhir akan dinilai dan lebih disukai secara personal dan

---

[41] Jacquelin Van Stekelenburg dan B. Klandersmen, "Individual in Movement; A Social Psychology of Contention", dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, ed. B. Klandermen dan Conny Roggeband, (New York; Spinger, 2007), 182.

[42] Ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan kepercayaan yang relevan untuk aksi sosial, integrasi dan stabilitas. Meskipun demikian terma ideologi juga memiliki banyak makna lain. (Lihat Christoph Henning, dalam *Philosociology*, ed. George Ritzer, 2230).

[43] Jacquelin Van Stekelenburg dan B. Klandersmen, "Individual in Movement; A Social Psychology of Contention", dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, B. Klandermen dan Conny Roggeband, (New York; Spinger, 2007) 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial daripada tindakan yang sebaliknya. Dengan demikian sistem nilai adalah sebuah susunan keyakinan-keyakinan mengenai cara-cara tindakan dan keadaan akhir yang disukai. Schwartz juga menggambarkan nilai-nilai sebagai berikut

> values (1) are concepts of beliefs, (2) pertain to desirable end states or behaviors, (3) transcend specific situations, (4) guide selection or evaluations of behavior and events, and (5) are ordered by relative importance. Values, understood this way, differ from attitudes primarily in their generality or abstractness (feature 3) and in their hierarchical ordering by importance (feature 5).

Lebih lanjut Feldman menjelaskan bahwa *values* lebih sebagai standar-standar yang bersifat general yang digunakan untuk menjadi basis bagi berbabai evaluasi spesifik lintas situasi. Karenaya *value* berbeda dari *attitude*, karena ia hanya berarti evaluasi atas objek spesifik.[44] Sebab itu, ketika nilai-nilai terancam, maka akan muncul pembelaan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. jadi, partisipasi aksi kolektif adalah salah satu reaksi yang mungkin atas pelanggaran nilai-nilai seseorang. Ideologi dalam kajian gerakan sosial oleh beberapa sarjana dipandang memiliki fungsi interpretif dan fungsi motivasi, dengan demikian gerakan sosial oleh sebagian sarjana dikonsepsikan sebagai "*ideologically structured action*".[45]

F. Identitas Kolektif

Wacana *collective identity* (identitas kolektif) dalam kajian gerkan sosial mulai muncul pada kisaran tahun 1980 an, terutama dalam cacatan kerja penelitian Alberto Melucci (1995). Arti identitas kolektif merujuk pada "shared definition of a group that derives from it's members' common interest,

[44] Ibid, 184
[45]David A. Snow, "Framing Processes, Ideology and Discursive Fields", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

experiences and solidarities".[46] Alberto Melucci memperlakukan identitas kolektif lebih sebagai proses daripada sebagai "sesuatu" (*thing*).[47] Ia mendefinisikan identitas kolektif

> I call collective identity this process of "constructing" an action system. Collective identity is an interactive and shared definition produced by several individuals (or groups at a more complex level) and concerned with the orientations of action and the field of opportunities and constraints in which the action takes place. By "interactive and shared" I mean a definition that must be conceived as a process because it is constructed and negotiated through a repeated activation of the relationships that link individuals (or groups).[48]

Lebih lanjut Melucci menerangkan identitas kolektif sebagai sebuah proses dengan melibatkan tiga aspek sebagai berikut. *Pertama* identitas kolektif melibatkan definisi-definisi kognitif yang berkaitan dengan tujuan, sarana dan lapangan aksi. Elemen-elemen berbeda aksi kolektif ini didefinisikan dalam suatu bahasa yang dibagi bersama oleh sebagian atau keseluruhan masyarakat. Mereka disatukan dalam seperangkat ritual, pkatek dan artefak tertentu. Mereka dibingkai dalam cara-cara yang berbeda namun selalu menyediakan semacam kalkulasi antara tujuan dan sarana/cara, antara investasi atau penanaman dan *reward*.[49]

Kedua identitas kolektif sebagai proses merujuk pada jaringan ikatan aktif antara aktor-aktor yang berinteraksi, berkomunikasi, saling mempengaruhi, bernegosiasi dan membuat keputusan. Bentuk organisasi, model kepemimpinan, *channel* komunikasi, teknologi komunikasi adalah bagian konstitutif jejaring relasi ini. *Ketiga* adalah derajat *emotional investmen* tertentu yang dibutuhkan

---

[46] Owen Whooley, "Collective Identity", *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 4. Ed George Ritzer, et al, (Malden USA; Blackwell Publishing, 2009). 586.
[47] Alberto Melucci, "The Process Of Collective Identity", dalam *Social Movement and Culture*, ed. Hank Johnston dan Bert Klandermans, (Minneapolis; University of Minnesota Press, 2004), 50
[48] Ibid, 44
[49] Alberto Melucci, *Challenging The Codes*, (London; Cambridge University Press, tt), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pendefinisian sebuah identitas kolektif. Ini akan membuat individu-individu dapat merasa diri mereka sebagai bagian dari suatu kesatuan bersama. Partisipasi dalam sebuah gerakan aksi kolektif yang diisi dengan makna tidak bisa direduksi pada tataran kalkulasi untung-rugi dan ia selalu dapat memobilisasi emosi-emosi. Karenanya identitas kolektif tidak pernah sepenuhnya dapat dinegosiasikan. Gairah, perasaan, cinta, benci, keyakinan dan ketakutan semuanya adalah bagian sebuah tubuh yang beraksi secara kolektif, terutama pada area-area kehidupan sosial yang kurang terinstitusikan seperti gerakan sosial.[50]

Identitas sebagai sebuah proses juga berarti makna identitas tidak harus merujuk pada objek otonom, tidak pula pada ciri tertentu aktor sosial. Sebaliknya ia adalah suatu proses dimana aktor sosial mengakui dan mengenali diri mereka – juga diakui dan dikenali oleh aktor lainnya- sebagai bagian dari kelompok yang lebih luas. Dalam proses ini, aktor juga mengembangkan keterikatan emosi. Dalam pengertian yang demikian, pengelompokan ini tidak harus didefinisikan dengan merujuk pada ciri-ciri sosial yang spesifik seperti kelas, gender, etnis, orientasi seksual atau pada organisasi spesifik. Misalnya seseorang bisa saja meresa lebih dekat dengan orang yang memiliki pandangan postmaterialis yang sama tanpa menunjukkan kedekatan perasaan kelas, etnis atau gender apapun. Hal serupa juga lebih tepat diterapkan pada konsep identitas kolektif, ia lebih tepat diartikan berdasarkan orientasi bersama, nilia-nilai, perilaku-perilaku, pandangan hidup, gaya hidup maupun pengalaman aksi bersama.[51]

---

[50] Ibid, 71

[51] Donatella memberikan cacatan bahwa ia tidak menafikan identitas juga sering dapat diartikan dalam terma kelas, etnis, gender orientasi seksual tertentu. (Lihat Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, Oxford; Blackwell Publishing, 2006, 92)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada level yang paling dasar, merujuk pada Scott A Hunt dan Robert D. Benford identitas kolektif merupakan perasaan "ke-kita-an" dan agen kolektif bersama. Dengan mengutip Poletta dan Jasper identitas kolektif didefinisikan sebagai berikut;

> Sebuah hubungan kognisi individu, moral dan emosi dengan sebuah komunitas, kategori, praktek atau institusi yang lebih luas. Ia adalah sebuah persepsi status atau relasi bersama yang dapat diimajinasikan daripada dialami secara langsung, ia berbeda dari identitas-identitas personal, walaupun demikian, ia dapat membentuk bagian identitas personal…..identitas kolektif diekspresikan dalam materi-materi kultural – nama-nama, narasi-narasi, simbol-simbol, gaya-gaya verbal, ritual-ritual, baju dan seterusnya- namun tidak semua materi kultural mengekspresikan identitas kolektif. Identitas kolektif tidak berarti perhitungan rasional untuk mengevaluasi pilihan-pilihan, sebagaimana yang terjadi dalam "kepentingan".[52]

Persoalan yang menjadi penting dalam konsep *collective identity* adalah bagaimana membangunnya dan seperti apa formasinya. Identitas kolektif bukan sesuatu yang eksis dan mapan tanpa suatu proses. Dalam persoalan ini ada tiga hal yang bisa menjadi alat piranti untuk memahami konstruksi identitas kolektif yang ditawarkan oleh Taylor dan Whittier. Tiga hal tersebut adalah *Boundaries, Conciousness* dan *Negotiation*. Maisng-masing bekerja dalam proses membangun sebuah identitas kolektif. *Pertama* adalah *Boundaries* yang berarti identitas kolektif memiliki kaitan erat terhadap struktur-struktur sosial, psikologi dan fisik. Struktur-struktur tersebut pada gilirannya akan membuat perbedaan-perbedaan antara kelompok penentang dan kelompok yang ditentang (*dominant group*) berdasarkan penelitiannya terhadap mobilisasi feminis, *boundary* berfungsi untuk semakin meninggikan kesadaran komunalitas kelompok dan bingkai interaksi

[52] Scott A Hunt, "Solidarity, Commitment and Collective Identity", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 440

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara anggota *in-group* dan *out-group*. Lebih lanjut *Boundary* menandai teritori sosial relasi kelompok dengan menekankan *putative* perbedaan moral, kognisi, afeksi, perilaku dan perbedaan atribusi lainnya antara anggota sebuah gerakan dengan jaringan "yang lain" dalam dunia sosial yang diperebutkan. Selain itu, dengan membangun pemahaman terperinci tentang "siapa mereka", para pendukung dan partisipan gerakan pada saat itu juga mengkonstruksi sebuah pemahaman "siapa mereka sebenarnya". Jadi, *Boundary* bekerja membangun dua hal, baik *"collective self"* dan *"collevtive other"*, "kita" dan "mereka".[53]

Selanjutnya konsep *consciousness* merujuk pada kerangka interpretatif yang muncul dari kelompok penentang untuk mendefinisikan dan mewujudkan kepentingannya. Jika *Boundary* berfungsi meletakkan seseorang sebagai anggota sebuah kelompok, maka *group consciousness* (kesadaran-kelompok) adalah bagian yang menanamkan kolektifitas pada taraf signifikansi yang lebih besar.[54] Taylor dan Whittier melihat perkembangan kesadaran sebagai proses yang tengah berlangsung dimana kelompok melakukan evaluasi ulang atas diri mereka, pengalaman subjektif mereka, kesempatan dan kepentingan bersama mereka. Dalam hal ini, Taylor dan Whittier juga mengajukan pemakaian terma *political consciousness* daripada kesadaran kelas. Terma tersebut dipandang lebih berguna karena ia menekankan semua sistem dominasi manusia akan menciptakan kepentingan yang berlawanan (oposisi) yang dapat melahirkan kesadaran politis. Kesadaran tidak hanya memberikan pemahaman tentang posisi struktural bagi kelompok yang marjinal secara sosial dan politik, lebih dari itu ia memberikan

[53] Ibid, 442.
[54] Ibid, 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspektasi baru tentang perlakuan yang sesuai dengan kategori mereka.[55] Pengembangan kesadaran akan mengilhami identitas kolektif dengan tujuan yang lebih besar dengan menanamkannya dalam kerangka ideologis yang menyalahkan ketidakadilan yang memicu mobilisasi.[56]

Kesadaran dapat dibangun melalui berbagai mekanisme, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran terbangun melalui "perbincangan", narasi-narasi, *framing processes*, emosi dan interaksi dengan pihak antagonis dari kelompok lain. Identitas kolektif dapat pula dibentuk –sekaligus membentuk- melalui aksi kolektif dan juga perbincangan persoalan identitas selanjutnya. Dalam keterlibatan dan perbincangan tentang berbagai peristiwa dan aktifitas mobilisasi, makna-makna diproduksi yang pada gilirannya akan memfasilitasi keselarasan identitas kolektif dan personal, konstruksi identitas juga titik-titik pertemuan yang akan mengkondisikan upaya-upaya mikromobilisasi di masa yang akan datang. Partisipan yang sering terlibat dalam perbincangan identitas kemudian cenderung berputar di sekitar empat momen tahapan konstruksi identitas yaitu; menjadi sadar, aktif, berkomitmen dan jemu atau letih. Pada akhirnya, identitas ini akan menyelesaikan beberapa tujuan praktis, setidaknya yaitu pengembangan dan pemeliharaan kesadaran oposisi.[57] Berkaitan dengan kesadaran oposisi, beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa kesadaran oposisi dan solidaritas dapat dibangun dan dilestarikan lewat narasi-narasi dan cerita-

---

[55] Verta Taylor dan Nancy Whittier, "Collective Identity In Social Movement Communities; Lesbian Feminist Mobilization", dalam *Frontiers of Social Movement Theory*, ed. Aldon Morris, (London; Yale University Press, 1992), 114

[56] Owen Whooley, "Collective Identity", *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 4. Ed George Ritzer, et al, (Malden USA; Blackwell Publishing, 2009), 586.

[57] Scott A Hunt "Solidarity, Commitment and Collective Identity", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerita gerakan atau kelompok.[58] Temuan lain juga menberikan informasi bahwa identitas kolektif dapat terbentuk lewat orang-orang diluar kelompok. Kesadaran oposisi adalah langkah pendekatan relasional dalam konstruksi identitas kolektif. Identitas kolektif dengan demikian dapat muncul dalam konteks interaksi konfliktual. Karenanya ia bisa berfungsi sebagai modal kultural yang bisa digunakan untuk perlawanan personal maupun kolektif.[59]

Terakhir adalah *negotiation* yang menjadi ruang aktor-aktor untuk terlibat dan ikut serta dalam gerakan secara terus-menerus yang mendorong identitas kolektif dan bekerja untuk mempengaruhi makna-makna simbolik.[60] Identitas kolektif pada dasarnya bukan hanya atribut individual, lebih dari itu, ia adalah representasi kultural, serangkaian makna-makna bersama yang melewati fase produksi-reproduksi, negosiasi-renegosiasi dalam interkasi individu yang telah menyatu dalam konteks sosio-kultural tertentu. Pembentukan identitas kolektif yang melibatkan proses negosiasi merujuk pada penjelasan Melucci tentang dimensi interaktif dan negosiatif suatu identitas kolektif. Baginya identitas kolektif merupakan definisi bersama yang bersifat interaktif, dihasilkan oleh indiviud-individu yang saling berinteraksi dan peduli dengan orientasi aksi mereka maupun medan peluang dan hambatan dimana aksi terjadi. Konstruksi dan pembentukan identitas kolektif menyediakan basis bagi para aktor untuk

---

[58] Dalam beberapa penelitian, memori kolektif (kebanyakan adalah narasi dan cerita-cerita) melipatkan konstruksi identitas, penyatuan dan keberlanjutan dalam gerakan. Cerita dan narasi juga dapat membentuk solidaritas transnasional. Misalnya cerita Romero uskupp agung Salvador dapat mendongkrak solidaritas antar gereja dan orang kristen Amerika. (lihat Scott A. Hunt, "Solidarity, Commitment and Collective Identity", 446).

[59] Scott A Hunt "Solidarity, Commitment and Collective Identity", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 446.

[60] Owen Whooley, "Collective Identity", *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 4. Ed George Ritzer, et al, (Malden USA; Blackwell Publishing, 2009), 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan harapan dan menghitung aspek untung-rugi aksi mereka. Identitas kolektif dengan demikian adalah proses para aktor melahirkan kerangka kognitif umum yang pada gilirannya membuat mereka dapat mengevaluasi lingkungan mereka dan melakukan kalkulasi atas aksi mereka. Melucci menekankan bahwa definisi yang dihasilkan pada sebagian adalah hasil dari interaksi dan hubungan-hubungan pengaruh yang bernegosiasi, dan buah pengakuan emosional di bagian lain.[61]

Selain melalui interaksi aktor-aktor dalam gerakan, identitas kolektif juga dapat terbangun lewat hubungan dan relasi dengan sekutu, kelompok yang menentang gerakan dan khalayak penonton semacam media cetak dan elektronik yang dalam terma Hunt dan Benford disebut proses *framing, counterframing* dan *reframing* antara pihak protagonis, antagonis dan pihak penonton. Identitas kolektif juga dapat dinegosiasikan selama aksi kolektif sebagaimana temuan beberapa penelitian dalam organisasi buruh di Amerika bahwa praktek-praktek solidaritas dapat membentuk identitas kolektif.[62] Identitas bukanlah sebuah karakter yang dapat abadi, sebaliknya perasaan kepemilikan tertentu dapat terbangun semakin kokoh atau melemah melalui sebuah aksi. Dengan demikian, aksi-aksi kolektif dapat mendorong pendefinisian ulang identitas dan menjadi ruang dimana identitas lahir.[63]

Lalu apakah identitas dapat menjadi piranti untuk memantik aktivisme dan partisipasi individu dalam sebuah gerakan? Aktivisme atau partisipasi dalam

---

[61] Scott A Hunt "Solidarity, Commitment and Collective Identity", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 447.
[62] Ibid, 448.
[63] Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah aksi kolektif atau gerakan memang tidak selalu dipicu oleh identitas, tapi keberadaan identitas kolektif dapat mendorong individu untuk terlibat dalam suatu aksi kolekif. Karl-Dieter menemukan dalam banyak laporan para sarjana, bahwa identitas memiliki efek yang positif terhadap aksi kolektif terutama perilaku protes. Karl-Dieter menyebutnya *identity-proportions* yang dinilai punya dua bentuk, yaitu pada level individu dan pada kelompok. *Pertma* berkaitan dengan level individu, semakin kuat identitas kolektif seorang individu, semakin tinggi kemungkinan dia terlibat dalam perilaku protes. *Kedua* semakin kuat identitas kolektif sebuah kelompok, semakin tinggi kemungkinan kelompok tersebut terlibat dalam sebuah protes. Walaupun identitas kolektif bukanlah faktor independen yang menentukan keputusan individu dalam aktivisme, identitas kolektif tetap merupakan faktor penting. [64]

Berada dalam suatu kategori atau kelompok tertentu misalnya tidak akan berkorelasi dengan perilaku protes atau aksi sebelum dihubungkan dengan faktor *incentive*. Misalnya menjadi bagian dalam kategori orang-orang "pinggiran" akan membuat seorang terintegrasi dalam sebuah aksi yang akan membuka "jaringan" dan insentif lainnya. Dengan demikian, terdapat korelasi antara menjadi kategori tertentu dalam kehidupan sosial dan perilaku aktivisme atau aksi kolektif, yaitu keberadaan insentif. [65]

Konsep *incentive* juga bisa mengatasi problem "*collective good*" yang berakar pada rumusan Mancur Olson bahwa aksi kolektif berkaitan dengan barang

[64] Karl-Dieter, *Theories Of Political Protest and Social Movement; A Multidisciplinary Introduction, Critique and Synthesis*, (New York; Routledge, 2009), 218
[65] Ibid, 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolektif.[66] Agar aksi kolektif terjadi, aktor politik atau organisasi mesti memaksa calon peserta atau mendistribusikan insentif selektif yang memungkinkan peserta menerima manfaat lebih besar daripada mereka yang tidak berpartisipasi. Dalam perkembangannya, beragam reaksi terhadap pernyataan Olson bermunculan. Beberapa sarjana mencoba memperlebar konsep *selective incentive*. Pada dasarnya perluasan konsep ini dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama* adalah insentif eksternal, diantaranya berisi persoalan pengharapan-pengharapan individu dari kelompok dimana individu mereferensikan diri. Hal itu secara umum dapat dilihat berupa penghargaan-penghargaan dan sanksi-sanksi yang dapat digunakan oleh kelompok atau aktor-aktor sosial saat menghadapi sebuah keputusan untuk terlibat atau penolakan terlibat secara kolektif. *Kedua* insentif internal yang terdiri dari mekanisme internal yang dapat membuat individu menghubungkan atau mengatribusikan nilai-nilai normatif tertentu dengan suatu aksi kolektif, atau aksi kolektif tersebut dapat membuat individu merasakan kepuasan atau kesenangan instrinsik atau juga mengalami transformasi katarsis[67]. Kesimpulan ini telah banyak terkonfirmasi melalui berbagai penelitian yang menunjukkan partisipasi individu tidak melulu didorong dan merujuk pada persoalan materi. Sebaliknya partisipasi individu seringkali berkaitan dengan *"selective incentives"* yang

[66] Aksi kolektif akan melahirkan barang kolektif yang bisa dinikmati oleh semua dalam kolektifitas, terlepas dari fakta apakah seorang ikut serta dalam aksi atau tidak. Apabila tujuan aksi tercapai maka yang bisa menikmati hasilnya adalah masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, sulit masuk di akal ketika orang ikut serta dalam aksi dengan harus menanggung resiko kegagalan aksi, padahal di sisi lain dia bisa menikmati capaian aksi apabila berhasil walaupun seorang tersebut tidak ikut berkontribusi. (Lihat Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, 101).

[67] Penyucian diri yang membawa pembaruan rohani dan pelepasan dari ketegangan atau kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan dan pertikaian batin akibat suatu lakuan dramatis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya berupa nilai-nilai dan ikatan-ikatan solidaritas bersama dalam kelompok.[68]

Fireman dan Gamson (1979) juga menemukan hal serupa, orang-orang yang berbagi ikatan atau hubungan sebelumnya dengan orang lain dapat membuat perilaku solidaristik menjadi sebuah harapan yang masuk akal. Sebagaimana dikutip oleh Poletta, Fireman menyatakan

> Seseorang yang hidupnya terjalin dengan kelompok [melalui persahabatan, kekerabatan, keanggotaan organisasi, jaringan pendukung informal, atau hubungan bersama dengan pihak luar)…memiliki kepentingan besar dalam nasib kelompok tersebut. Bila tindakan kolektif sangat mendesak, orang tersebut kemungkinan akan menyumbangkan andilnya/bagiannya meskipun dampak dari andilnya tersebut tidak nyata/terlihat .

Peristiwa-peristiwa aktivisme dan aksi kolektif yang menunjukkan rekrutmen partisipan banyak bekerja lewat hubungan solidaritas yang telah ada sebelumnya adalah gerakan seperti Komune Prancis, Revolusi Rusia, Buddhisme Nichiren Shoshu dan *Mississippi Summer Project*. Berbagai laporan tersebut menunjukkan ikatan yang telah terbangun dapat memotivasi individu dalam aktivisme dan aksi kolektif berdasar pada norma-norma kewajiban dan timbal balik. Jadi, bagi sejumlah penulis, "Identitas kolektif" tak ubahnya singkatan dari hubungan afektif yang dimiliki seorang terhadap anggota-anggota kelompok yang mewajibkan seseorang untuk melakukan demonstrasi bersama atau atas nama mereka.[69]

Namun demikian, kesimpulan diatas bukan tanpa persoalan. Diantara pertanyaan yang banyak itu adalah “Benarkah identitas kolektif terdiri dari

---

[68]Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 101.

[69] F. Polletta dan James M. Jasper “Collective Identity and Social Movement”, *Annual Review of Sociology*, Vol. 27, (2001) 289-290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban moral, altruisme dan kesetiaan personal?" "atau ia bisa jadi merupakan urusan "kepentingan diri" mengenai pendapat orang lain tentangnya?". Dalam hal ini Chong mengatakan bahwa "kepentingan diri" tentang persoalan reputasi dapat memotivasi seorang untuk terlibat gerakan. Keinginan meningkatkan reputasi, seorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dikatakan Sokrates, menjadi seorang yang di inginkan dan dipikirkan oleh orang lain adalah cara termudah membangun reputasi. Demikian juga Friedman McAdam yang menghubungkan identitas kolektif dengan tindakan rasional yang berorientasi pada diri sendiri. Misalnya untuk memperoleh peran atau posisi terhormat dalam suatu komunitas, seseorang disyaratkan terlibat dalam aktivisme. Pada kasus awal-awal gerakan hak-hak sipil misalnya, aktivisme menjadi suatu hal yang penting dan terhormat bagi para pengunjung gereja, atau pada tahun 1960 banyak siswa terkait dengan aktivis, karena ia adalah "identitas sosial yang berharga" dan menjadi insentif selektif untuk berpartisipasi.[70] Dalam bagian lain, Teske berupaya menengahi antara model loyalitas dan kepentingan pribadi bahwa kita keliru dalam melihat tindakan yang mementingkan diri sendiri dan moral sebagai lawan. Aktivisme bagi banyak orang adalah cara untuk membangun sebuah "ke-diri-an" yang diinginkan yang membuat mereka terlibat dalam sebuah gerakan dan aksi.[71]

Temuan menarik lainnya mengenai faktor yang jadi pemantik partisipasi atau keterlibatan dalam aktivisme adalah konsep identitas gerakan, solidaritas, komitmen dan "komunitas" gerakan sosial. Konsep-konsep tersebut memiliki

[70] Ibid, 290
[71] Ibid, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak kesamaan fungsional dengan identitas kolektif yang telah terbangun sebelumya. Beberapa gerakan tampaknya menarik peserta meski tidak ada identitas dan jaringan sebelumnya. Misalnya gerakan atau aksi yang muncul akibat "Guncangan moral" lewat foto binatang yang disiksa atau bencana di Three Mile Island, walaupun orang-orang yang terlibat tidak mengenal satu sama lain atau bahkan penyelenggara aksi. Peserta dapat berbagi ciri demografis atau ekonomi - mereka cenderung kelas menengah, katakanlah, atau kebanyakan laki-laki - tetapi ini tidak menambahkan persepsi tentang "kerelaan" identitas kolektif sebelumnya. Aksi politis itu sudah dapat memupuk solidaritas.[72]

Mengutip Hunt, sudah banyak literatur yang membuktikan bahwa identitas kolektif akan memunculkan konsep seperti solidaritas dan komitmen. Identitas kolektif sebagai proses identifikasi individu, identifikasi dengan, dan keterikatan pada beberapa kolektivitas seperti kognitif, emosional, dan moral. Identitas kolektif erat kaitannya namun berbeda dengan konsep lain seperti ideologi, identitas pribadi, partisipasi, solidaritas, dan komitmen.[73] Dalam prakteknya sebagaimana dijelaskan oleh Gamson, identitas kolektif dan solidaritas adalah dua hal yang saling terkait, namun ia tetap dua hal berbeda. Gamson membuat distingsi analitik untuk membedakan keduanya. Identitas kolektif adalah proses dimana partisipan sebuah kelompok gerakan membangun “ke-kita-an”yang

[72] Ibid, 291.
[73] Scott A Hunt “Solidarity, Commitment and Collective Identity”, dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 448

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda-beda derajatnya pada setiap individu, identitas kolektif juga merupakan bagian dari definisi-diri individu tersebut.[74]

Sedangkan solidaritas mengacu pada kekuatan loyalitas dan komitmen seorang terhadap suatu identitas kolektif sebuah gerakan. Sampai sejauh mana, orang akan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah entitas kolektif layak untuk mendapatkan pengorbanan pribadi, dan seberapa besar hal itu harus diprioritaskan dibandingkan kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari, termasuk kelangsungan hidup? Dalam penelitiannya terhadap gerakan melwan intervensi militer USA di Vietnam dan el Salvador, Gamson menggarisbawahi pentingnya risiko publik sebagai mekanisme dalam menciptakan solidaritas di antara peserta gerakan. Serangan dari luar baik dari pemerintah atau pihak yang berseberangan dapat memperkuat solidaritas. Kemampuan menghubungakan diri mereka dengan entitas kolektif yang diserang merupakan "perangsang" kuat bagi orang lain untuk ikut berpartisipasi. Hirschman juga mengungkap bahwa loyalitas akan membuat seorang lebih memilih bersuara daripada keluar saat dia tidak puas. Ancaman dan perlakuan represif oleh otoritas seringkali menyediakan alasan yang cukup bagi beberapa orang untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok tertentu.[75]

Cara lain yang berguna untuk memahami solidaritas adalah dengan pengertian Blumer tentang *esprit de corps*, yaitu perasaan pengabdian dan antusiasme terhadap kelompok yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pengertian

[74] William A. Gamson, "Commitment and Agency in Social Movement", *Sociological Forum*, Vol. 6. No. 1, (Maret, 1991), 45
[75] Ibid, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, solidaritas mensyaratkan identifikasi terhadap entitas kolektif dan identifikasi partisipan dengan aktor-aktor yang terafiliasi dalam kelompok yang sama.[76]

Hubungan erat antara identitas kolektif dan solidaritas juga ditemukan dalam penelitian Clare Saunders. Identitas kolektif sebagai pemahaman "ke-kita-an" yang diturunkan dari proses dalam level kelompok akan menghasilkan solidaritas sebagai *outcome* yang mungkin. Identitas kolektif tersebut juga melibatkan kultur sebagai tempat dimana identitas kolektif berkembang. Dengan demikian, identitas kolektif muncul melalui kultur organisasi gerakan seperti "norma, kepercayaan, simbol, identitas, narasi-narasi dan sebagainya. Pada gilirannya, identitas kolektif tersebut akan melahirkan solidaritas, memotivasi peserta gerakan dan membangun aksi kolektif. Identitas kolektif yang mengikat kuat dan dinegosiasikan secara komunal akan meningkatkan solidaritas. Kultur organisasi gerakan akan memperkuat *sense of belonging* melalui aktifitas ritual dalam kelompok yang menghasilakan "gelembung kolektifitas".[77]

Namun demikian, solidaritas bisa saja menimbulkan makna "negatif". Identitas kolektif yang sangat kuat bisa saja menimbulkan "solidaritas sektarian". Solidaritas level tinggi tidak jarang harus dibayar dengan kemunculan relasi antagonis dengan pihak *out-group* melalui penajaman distingsi "kita" "mereka". Bahkan dalam kasus sangat ekstrem, kelompok tersebut akan menganggap

[76] Scott A Hunt "Solidarity, Commitment and Collective Identity", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, David Snow, (Victoria; Blackwell Publishing, 2006), 439

[77] Clare Saunders, "Double Edged Swords? Collective Identity and Solidarity in the Environment movement", *The British Journal od Sociology*, Vol. 59, (2008), 232-234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok lain yang memiliki tujuan serupa (*shared concern*) sebagai “musuh dalam selimut” hanya karena perbedaan taktik dan strategi.[78]

Fakta bahwa identitas kolektif yang telah terbangun sebelumnya bukan satu-satunya prasyarat mobilisasi, maka upaya “pembingkaian” identitas secara strategis oleh para aktor gerakan sangat penting dalam proses rekrutmen. Pada tahap ini, "Bingkai" adalah paket interpretif yang dikembangkan aktivis untuk memobilisasi pemeluk dan pendukung yang potensial. Kerja-kerja “Pembingkaian” misalnya membuat kasus yang menarik karena "ketidakadilan" kondisi dan menunjukkan kemungkinan efektivitas "agen" kolektif untuk mengubah kondisi tersebut. Lewat kerja-kerja “pembingkaian” pula, mereka memperjelas "identitas" pihak lawan dan pesaing, membedakan "kita" dari "mereka" dan menggambarkan pihak-pihak lawan (antagonis) sebagai pembuat keputusan manusia daripada kekuatan impersonal semacam urbanisasi.[79]

G. Keberlajutan Lingkungan Dalam Islam

Islam yang dipahami sebagai sebuah sistem petunjuk bagi seluruh umat manusia memiliki arti bahwa Islam menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam khazanah *fiqh* klasik misalnya terdapat beberapa dimensi kehidupan manusia yang diatur sebagaimana lazim dalam literatur-literatur kitab kuning, yaitu; *Rub’u al Ibadat, Rub’u al Muamalat, Rub’u al Munakahat* dan

[78] Ibid, 232-234
[79] F. Polletta dan James M. Jasper “Collective Identity and Social Movement”, *Annual Review of Sociology*, Vol. 27, (2001), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rub'u al Jinayat. Aturan-aturan tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sejahtera, aman, bersih dan sehat baik lahir maupun batin.[80]

Begitu pula dengan persoalan lingkungan secara khusus, sudah banyak dibicarakan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik dari *nash* Al-Qur'an maupun Hadits. Moghul F Moghul dan Samir Safar Aly dalam sebuah tulisannya menyampaikan bahwa kerangka etika hukum Islam menyediakan perhatian dan kesadaran kuat tentang kesejahteraan bumi beserta seluruh ragam isinya. Islam menggarisbawahi eksistensi alam semesta untuk mendukung kehidupan secara keseluruhan dan kehidupan manusia khususnya.[81]

Dalam Islam antara manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan sekitarnya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Sebagaimana ciptaan lainnya, posisi manusia dalam sistem kosmos tetaplah hamba Allah, meskipun di sisi lain, dia diberi keistimewaan sebagai *khalifah*. Tuhan memberikan kehidupan dan kekayaan agar manusia memegang amanah sebagai hamba Allah dan *khalifah*nya. Namun demikian manusia tidak berarti diberikan superioritas dan diijinkan untuk mengeksploitasi alam secara absolut.[82]

Persoalan pelestarian lingkungan dalam ajaran Islam dapat dilacak pada sumber-sumber otoritatif al-Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang lingkungan dan alam sebagaimana hasil penelusuran Tim pesantren dalam pertemuan di Lido Sukabumi untuk menggagas fikih lingkungan diantaranya sebagai berikut;

---

[80] Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta; Tama Printing, 2006), 40.
[81] Umar F. Moghul dan Samir Safar Aly "Green *Sukuk*: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance", *"The Georgetown Int'l Envt,l Law review"* Vol. 27, 12.
[82] Ibid, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya; Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (7:56).[83]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

Artinya; Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Meskipun Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. (1:11).[84]

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

Artinya; Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (7:85).[85]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya; Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (30:41).[86]

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨)

Artinya; Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga)

[83] AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta; Beras, 2014), 157.
[84] Ibid, 11
[85] Ibid, 161
[86] Ibid, 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (6:38).[87]

Ayat-ayat al-Qur'an diatas memberikan informasi bagaimana Islam menyikapi persoalan lingkungan. Selain menggambarkan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia baik di darat maupun lautan, beberapa ayat dalam al-Qur'an juga memberikan larangan perusakan terhadap bumi. Ayat 56 surat al-A'raaf misalnya sebagaimana penafsiran al-Qurtubi menyatakan larangan atas perusakan di muka bumi bersifat mutlak, baik perusakan tersebut sedikit atau banyak. Al-Dlahak lebih tegas lagi menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung arti larangan mencemarkan air, memotong pepohonan yang berbuah dan semacamnya.[88]

Hubungan manusia dengan alam sebagai satu kesatuan sistem kosmos dan bukan sebagai hubungan *superior-inferior* dapat dipahami melalui tujuan-tujuan penciptaan keduanya. Alam diciptakan dengan membawa tujuan dan haknya, beberapa tujuan penciptaan alam dapat dilacak dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut; 1) Tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal (Q.S.3:190); 2) Tanda kekuasaan Allah bagi yang mengetahui (Q.S.30:22); 3) Tanda kekuasaan Allah bagi yang bertaqwa (Q.S.10:6); 4) Tanda kekuasaan Allah bagi yang mendengarkan pelajaran (Q.S.16:65); 5) Tanda kekuasaan Allah bagi yang memikirkan (Q.S.13:3); 6) Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Q.S.2:29); 7) Sebagai suatu rahmat dari Allah (Q.S.45:13); 8) untuk kepentingan manusia (Q.S.31:20); 9) Untuk menyempurnakan nikmat dan ujian bagi semua

---

[87] Ibid, 114
[88] Abu Abdillah al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, juz, IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia (Q.S.11:7); 10) Untuk mengetahui siapa-siapa yang lebih baik amalannya dalam hidup (Q.S.67:2).[89]

Sedangkan tujuan penciptaan manusia dapat dilacak dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut; 1) manusia diciptakan untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan (Q.S.33:72), mengabdikan diri dan beribadah (Q.S.51:56); 2) Sebagai *Khalifah* atau pengelola bumi (Q.S.2:30) dan dibedakan derajatnya satu dengan lainnya sebagai ujian (Q.S.6:165); 3) untuk *amar ma'ruf nahi munkar* (Q.S.3:110) yang diperintah oleh Allah (Q.S.55:31) dan dibebani pertanggungjawaban (Q.S.6:165); 4) Beribadah (Q.S.51:56 dan Q.S.38:26); 5) Membangun peradaban di muka bumi (Q.S.11:61).[90]

Tujuan penciptaan alam dalam beberapa ayat al-Qur'an diatas menegaskan alam sebagai *ayat* atau tanda-tanda Tuhan. Alam sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an adalah tanda eksistensi sesuatu dibalik alam itu sendiri, menunjukkan keberadaan entitas transendental yang memberikan prinsip-prinsip atas dunia dan isinya. Ini berarti alam adalah media komunikasi Tuhan pada manusia.[91]

Sedangkan Tujuan penciptaan manusia sebagai *khalifah* dan salah satu ayat menunjukkan Alam sebagai pendukung kehidupan manusia bukan berarti hal tersebut menjadi dasar legitimasi manusia memperlakukan alam sesuai kehendak mereka, tujuan penciptaan manusia dan alam sama sekali tidak memposisikan alam sebagai entitas *inferior*, ada kesatuan sistemik antara alam dan manusia sebagaimana dalam surat al-An'am ayat 38. Moghul menegaskan ada kadar

---

[89] Ashin Sakho Muhammad dkk, *Fikih Lingkungan*, (Jakata; Conservation International Indonesia, 2006), 17

[90] Ibid, 18.

[91] Umar F. Moghul dan Samir Safar Aly "Green *Sukuk*: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance", "*The Georgetown Int'l Envt,l Law review*" Vol. 27, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran/*qadr* dan keseimbangan/*mizan* dalam kosmos yang secara transendental dipercayakan untuk tidak diganggu dan dirusak oleh kemanusiaan.[92]

Pola hubungan manusia dan alam dalam al-Qur'an yang ingin menghindari perusakan dan sikap kesewenag-wenangan terhadap alam berarti Islam mengajarkan tentang keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, apabila pola hubungan manusia dan alam tidak diposisikan sebagai satu kesatuan kosmos seperti dalam al-Qur'an, kemungkinan perusakan lingkungan semakin besar. Sayyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa krisis ekologi didorong oleh krisis spiritualitas manusia modern. Ia menuding kerusakan lingkungan oleh sains, teknologi dan ekonomi kapitalis berakar pada krisis spiritualitas. Bagi Sayyed Hossein Nasr absennya spiritualitas manusia modern berakibat pada lahirnya pandangan pemakaian segala aset alam tanpa batas sebagai hal yang wajar dan niscaya. Paradigma tersebut merupakan bagian dari identitas paradigma *humanism-antroposentris*. Idelanya tidak seharusnya spiritualitas dipisahkan dari sains, teknologi dan ekonomi sebagai kebutuhan manusia.[93]

Krisis ekologi dunia modern mendapatkan perhatian dari Sarjana-sarjana Islam kontemporer dengan mendasarkan diri pada konsep *maslahah* dan *maqasid syariah* dalam merumuskan hukum seputar pelestarian lingkungan. Selain ayat-ayat diatas, keberlanjutan lingkungan juga dapat didasarkan pada kedua konsep metodologi hukum Islam di atas. Yusuf Qardlawi dan Abu Sway misalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Mudhofir Abdullah menggunakan perspektif *maqasid al-syariah* untuk menyusun wacana konservasi lingkungannya. Mereka

[92] Ibid, 13
[93] Sayyed Hossein, *Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man,* (London: George Allen & Unwin, 1976), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua menggunakan teori-teori *maslahah* dan *maqasid al-syariah* dari para sarjana Islam terdahulu seperti al-Ghazali, al-Syatibi dan al-Syaukani untuk bangunan argumentasi hukumnya tentang pentignya konservasi lingkungan dalam krisis ekologi dunia modern.[94]

Mustafa Abu Sway yang meminjam konsep *maqasid al-syariah* dalam menjelaskan keharusan melindungi lingkungan, lebih tegas lagi, dia berpendapat bahwa memelihara lingkungan merupakan tujuan syariat yang paling tinggi. Kesimpulan tersebut memiliki arti bahwa kegagalan memelihara lingkungan sama dengan hilangnya seluruh makna kehidupan dan ke*khalifah*an manusia di bumi, "*The destruction of the environment prevents the human being from fulfilling the concept of vicegerency on earth. Indeed, the very existence of humanity is at stake here*". Mudlofir Abdullah menerjemahkannya sebagai berikut "Kerusakan lingkungan mencegah manusia untuk memenuhi konsep wakil Tuhan di muka bumi. Sungguh, eksistensi manusia yang paling penting sedang dipertaruhkan".[95] Dengan demikian, Mustafa Abu Sway melihat *kulliyat al-khams* sebagai bagian organik dari upaya menciptakan lingkungan yang ideal. Pada tahap ini, *maslahat* menjadi titik berangkat untuk proteksi lingkungan dalam bingkai *maqasid al-syariah* sebagaimana penjelasan Mudhofir Abdullah.

Ali Yafie seorang sarjana muslim Indonesia dalam rangka merespon krisis ekologi menyusun argumennya dengan mereformasi konsep *kulliyat al-khams* yang sudah mapan. Ia menyusun ulang konsep tersebut dengan mengintrodusir *kulliyat al-sittah*. Selain lima prinsip dasar yang telah lazim dikenal, Ali Yafie

---

[94] Mudhofir Abdullah, "Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif *Usul Fiqh*", *Millah*, (Desember, 2010), 121
[95] Ibid, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menambahkan *hifdz al-bi'ah* sebagai dasar argumentasi kewajiban memelihara lingkungan. Dalam hal ini, menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya mewujudkan *maqasid al-syariah*. Ada unsur kemaslahatan secara wilayah sosial masyarakat dalam kerja-kerja pelertarian lingkungan. Berdasarkan teori yang dibangunnya seputar lingkungan, Ali Yafie sampai pada kesimpulan bahwa memelihara lingkungan adalah bagian dari tanggungjawab kolektif (*fardu kifayah*). Tanggung jawab kolektif tersebut berarti kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat untuk berusaha menyelesaikan persoalan lingkungan, kewajiban ini tidak gugur meskipun sebagian kelompok masyarakat telah bekerja selama persoalan lingkungan belum terselesaikan.[96]

Sedangkan Yusuf Qardlawi membangun argumentasi seputar kewajiban memelihara lingkungan berangkat dari konsepnya yang menyamakan pemeliharaan lingkungan dengan pemeliharaan lima prinsip dasar dalam *maqasid al-syariah* kalsik. Menjaga lingkungan sama nilainya dengan menjaga agama itu sendiri, sebaliknya, nilai perusakan lingkungan sama dengan menodai keberagamaan serta meniadakan tujuan *syariat*. Pada tataran ini, Qardlawi mendasarkan argumennya pada pencapaian *maslahat* dalam arti menjaga keberlangsungan lingkungan dan mencegah hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat dalam sumber-sumber agama secara eksplisit, perusakan lingkungan, industrialisasi, penebangan hutan

[96] Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah", *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2016), 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya yang mengakibatkan tidak tercapainya *maslahat*, maka hal itu menjadi terlarang.[97]

H. Keberlangsungan Keturunan dalam Islam

Menjaga keberlangsungan keturunan dalam Islam dapat dilacak pada konsep *maqasid al-syariah* khususnya tentang *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Kontribusi *hifdz nasl* dalam konsep *maqasid al-syariah* di tengah dunia modern dapat ditemukan dalam kapasitasnya menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara *rigid* dalam sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan *Hadits*. Sebut saja misalnya persoalan kloning manusia, dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah*, legalitas kloning diragukan karena secara embriologi mengacaukan hubungan darah seorang anak, sehingga akan menimbulkan problem lain di kemudian hari.[98]

Kelebihan dari konsep *maqasid al-syariah* terletak pada keterbukaannya untuk diperluas, misalnya saja, konsep *hifdz al-nasl* dapat dijadikan landasan argumentatif untuk memperkokoh pemeliharaan lingkungan. Demi kepentingan menjaga eksistensi dan keberlanjutan anak keturunan, maka pemeliharaan lingkungan adalah suatu hal yang wajib. Kerusakan lingkungan akan menjadi ancaman bagi eksistensi keturunan di masa depan.[99]

Urgensi menjaga dan memelihara keturunan tersebut juga ditunjukkan oleh beberapa sumber dari al-Qur'an dan *hadits* yang melarang seorang

---

[97] Mudhofir Abdullah, "Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif *Usul Fiqh*", *Millah*, (Desember, 2010), 124

[98] La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid Syariah*", *"Asy-Syir'ah"*, Vol. 45, No. 2, (Juli-Desember, 2011), 1265

[99] Ibid, 1266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan *sodaqoh* atau wasiat yang mengancam bagian anak kandungnya. Artinya, perbuatan baik yang mengancam bagian harta anak kandung dinilai tidak benar dalam agama islam. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

> Artinya; Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Dalam Tafsir al-Jalalain dijelaskan bahwa ayat diatas berbicara tentang anak yatim dan seseorang yang khawatir terhadap nasib keturunannya setelah dia meninggal, maka hendaklah dia bertaqawa dan mengatakan sesuatu yang benar pada seorang yang hampir meninggal. Sesuatu yang benar disini ditafsirkan sebagai ucapan atau anjuran pada orang yang hampir meninggal tersebut untuk bersedekah kurang dari sepertiga hartanya. Sehingga sisa hartanya akan diserahkan pada anak keturunannya agar mereka terhindar dari kehidupan yang sengsara dan menderita.[100]

[100] Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Sumenep

Madura sepanjang sejarahnya tidak pernah menjadi wilayah politik yang independen. Madura yang terdiri dari beberapa kerajaan tersebut selalu terlibat persaingan satu samalain. Kerajaan-kerjaan di Madura bergantung terhadap kerajaan-kerajaan di pulau Jawa yang lebih besar. Sejarah mencatat kerajaan-kerajaan di Madura pada kisaran periode antara tahun-tahun 1100 -1700 secara berturut-turut ada di bawah kekuatan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, negara-negara Islam pesisir Demak dan Surabaya, dan kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Wilayah Madura setelah kemunculan VOC diintegrasikan ke dalam negara kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800, dan pada akhirnya menjadi bagian negara Indonesia.[1]

Diantara kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di pulau Madura, adalah Kerajaan yang terletak di Sumenep. Bahkan dalam satu versi cerita, disebutkan bahwa, di Madura timur (Sumenep) telah berdiri suatu pusat pemerintahan di daerah Purwareja atau Mandagara sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Pada era sekarang, daerah Mandagara terdaftar sebagai wilayah yang masuk daerah administratif kecamatan Ambunten kabupaten Sumenep. Pemerintahan tersebut pada waktu itu dikenal dengan Pangeran Rato. Ia juga terkenal dengan nama

[1] Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pangeran Mandagara atau R. Pitutut (1333-1339 M) merujuk pada tempat pemerintahan berada.[2]

Secara geografis, Kabupaten Sumenep berlokasi diujung timur kepulaun Madura, tepatnya yaitu diantara 113°32'54" - 116°16'48" Bujur Timur dan 4°55' - 7°24' Lintang Selatan. Wilayah kabupaten Sumenep berbatasan masing-masing sebagai berikut; Batas selatan adalah Selat Madura; Batas utara adalah Laut Jawa; Batas timur adalah Laut Jawa dan Laut Flores; Batas barat adalah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten yang memiliki kedua wilayah daratan dan laut. Karenanya, kabupaten Sumenep memiliki pulau-pulau yang membentuk gugusan. Tercatat 126 pulau tersebar di kabupaten Sumenep baik berpenghuni atau tidak dengan rincian yang disebut pertama sebanyak 48 pulau sedangkan yang disebut terakhir sebanyak 78 pulau. Kabupaten Sumenep Terdiri dari 18 kecamatan di wilayah daratan dan 9 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Luas wilayah kabupaten Sumenep secara keseluruhan mencapai 2.093,47 Km persegi dengan rincian 54, 79% adalah daerah daratan (1.146,94 Km persegi) dan 45, 21% sisanya merupakan wilayah kepulauan (946,53 Km persegi). Jadi, antara wilayah daratan dan kepulauan tidak jauh berbeda.[3]

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten dengan wilayah geografis terluas di kepulauan Madura tercatat sebanyak 1.072.113 jiwa dengan

---

[2] BindaraAkhmad, *Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi BesertaTokoh di Dalamnya*, (Sumenep: Barokah, 2010), 3.

[3]BPS Kabupaten Sumenep, *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep, tt), 01-02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rincian sebagai berikut, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 509.791, sedangkan sisanya sebanyak 562.322 penduduk berjenis kelamin perempuan. Jika dibandingkan dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Sumenep, maka rata-rata ada sebanyak 512 jiwa penduduk dalam setiap Km persegi. Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Kota Sumenep yang disusul oleh Kecamatan Kalianget di tempat Kedua.[4]

Tabel 1. Banyak Penduduk Dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Rumah Tangga
1	Pragaan	33.382	35.793	69.175	19.223
2	Bluto	22.081	23.744	45.825	12.602
3	Saronggi	16.232	18.469	34.701	11.106
4	Giligenting	13.133	14.932	28.065	8.064
5	Talango	17.671	20.706	38.377	12.525
6	Kalianget	19.527	20.941	40.468	11.425
7	Kota Sumenep	35. 946	38.420	74.366	18.678
8	Batuan	6.290	6.599	12.889	3.503
9	Lenteng	27.357	30.065	57.422	16.988
10	Ganding	17.467	18.968	36.435	10.338
11	Guluk-Guluk	24.893	27.082	51.975	13.569
12	Pasongsongan	20.994	22.695	43.689	12.198
13	Ambunten	17.810	20.303	38.113	12.001
14	Rubaru	17.446	19.422	36.868	9.996
15	Dasuk	14.506	15.740	30.246	8.939
16	Manding	13.587	14.836	28.423	8.458
17	Batuputih	20.317	22.524	42.841	14.369
18	Gapura	17.662	19.426	37.088	11.869

[4] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep, 2016),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19	Batang Batang	24.880	27.604	52.484	15.943
20	Dungkek	16.823	19.476	36.299	13.182
21	Nonggunong	6.167	7.076	13.243	5.409
22	Gayam	15.136	17.305	32.441	12.775
23	Raas	17.974	19.351	37.325	12.851
24	Sapeken	22.493	23.838	46.331	12.923
25	Arjasa	29.208	34.015	63.223	20.031
26	Kayangan	10.266	11.398	21.664	7.184
27	Masalembu	10.543	11.594	22.137	6.244
	Jumlah Total	509.791	562.322	1.072.133	322.393

Penduduk Sumenep tersebar pada berbagai lapangan pekerjaan, namun diantara orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut, pertanian adalah bidang yang paling banyak menyumbangkan angka persentase. Karena merupakan daerah agraris, tidak heran sektor pertanian menjadi yang tertinggi yaitu sekitar 44,90%., disusul sektor perdagangan sebesar 17, 10% dan sektor jasa yang menyumbang angka kesempatan kerja 13, 70%.[5] Lebih rinci lagi, dari jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan sebanyak 631.534 jiwa, sektor pertanian menyerap sekitar 283.559 jiwa (44,90%), sedangkan sektor perdagangan menembus angka 107.992 jiwa (17,10%). Lalu secara berturut turut diikuti oleh bidang jasa sebanyak 86.520 jiwa, industri pengolahan 51.154 jiwa, bangunan 45.470 jiwa, angkutan 30.314 jiwa, bank dan keuangan sebanyak 13.894 jiwa, listrik, gas dan air 6.947 jiwa dan pertambangan 5.684[6]

[5] BPS Kab. Sumenep, *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab, Sumenep), 6
[6] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja tidak terlepas dari kebaradaan geografis Sumenep. Penggunaan lahan pertanian di Sumenep seluas 74% dari total luas wilayah (209.347 Ha), namun demikian, areal pertanian yang berupa lahan sawah hanya 16,27%. Sedangkan areal pertanian sisanya berupa tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat, kolam dan empang.[7] Areal sawah di Kabupaten Sumenep memiliki luas sekitar 25.681,69 Ha dengan rincian irigasi teknis sejumlah 4.650,44 Ha, irigasi setengah teknis sebanyak 1.837,95 Ha, irigasi sederhana seluas 2.028,73 Ha, irigasi desa 173,00 Ha, dan yang terbanyak adalah areal tadah hujan sejumlah 16.991,84 Ha. Selain itu, ada juga area lahan bukan sawah yang keberadaannya digunakan untuk pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, huma, padang rumput, lahan sementara diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak dan kolam. Sebagai Petani masyarakat biasanya juga mempunyai ternak berupa sapi, kambing dan unggas.[8]

Tabel Luas Lahan, Penggunaan, Luas LahanPertanian dan Jenis Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep (Ha)

Kecamatan	Pertanian	Bukan pertanian	Sawah	Bukan Sawah*
Pragaan	4.029	1.755	216	3813
Bluto	3.635	1.490	108	3527
Saroggi	5.533	1.238	687	4846
Giligenting	2.020	1012	-	2020
Talango	3839	1188	-	3839
Kalianget	479	2540	33	446
Kota Sumenep	1706	1078	728	978
Batuan	2181	529	878	1303
Lenteng	6691	450	1154	5537
Ganding	4327	1070	635	3692

[7] BPS Kab. Sumenep, *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 10
[8] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guluk-Guluk	5515	1114	1567	3948
Pasongsongan	10397	1506	365	10032
Ambunten	4550	504	521	4029
Rubaru	7489	957	585	6904
Dasuk	5091	1359	535	4556
Manding	6172	716	1509	4663
Batuputih	9930	1301	327	9599
Gapura	5846	732	1934	3912
Batang-Batang	6357	1679	1360	4996
Dungkek	5384	951	610	4774
Nonggunong	3728	280	300	3428
Gayam	7608	1232	473	7135
Raas	3410	480	256	3154
Sapeken	15642	4547	1417	14225
Arjasa	22402	1797	7731	14797
Kayangan	11367	9101	1758	9609
Masalembu	3230	855	-	3230
Jumlah Total	168.558	41.461	25.687	142.992
*Lahan pertanian bukan sawah bisa berupa Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Sementara tidak diusahakan, Perkebunan, Hutan Rakyat, Tambak, Kolam/Tebat/Empang dll.				

Perkebunan memiliki lahan yang cukup luas, yaitu mencapai 96.169,94 Ha dengan jenis perkebunan paling besar adalah perkebunan kelapa. Luas perkebunan kelapa ini terhitung sebanyak 51.129,37 Ha (atau dalam statistik lain 51.171, 97) disusul perkebunan tembakau. Dengan luas tersebut perkebunan kelapa di Sumenep sanggup memproduksi 1.212,26 Kg/Ha setiap tahun.[9] Sedangkan komoditas lain yang biasanya di tanam masyarakat Sumenep Sumenep meliputi kopi, cengkeh, mente, kapok randu, kemiri, cabe jamu, siwalan, serat nanas, pinang, asam jawa, kakao, nipah, mlinjo dan jarak. Selain perkebunan, sebagai wilayah kepulauan, Sumenep memiliki desa perikanan sebanyak 120 desa, dengan demikian tidak mengherankan apabila jumlah nelayan dan petani

[9] BPS Kab. Sumenep, *Statistik Daerah Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan juga terbilang tinggi. Data Kabupaten mencatat terdapat 41.810 jiwa berprofesi sebagai nelayan.[10] Produksi ikan laut bisa mencapai angka 46.672 ton dengan nilai produksi Rp. 479 milyar, lalu ikanair payau bisa mencapai angka produksi sebesar 1.116 ton dengan nilai produksi Rp. 44,46 milyar.[11]

Tabel Banyaknya Desa Perikanan, Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep					
Kecamatan	Desa Nelayan	Laut	Payau	Tawar	Perairan Umum
Pragaan	9	2223	253	-	5
Bluto	9	1028	-	40	-
Saroggi	8	2119	144	33	22
Giligenting	8	836	116	-	-
Talango	8	2127	-	-	-
Kalianget	6	1216	204	3	-
Kota Sumenep	2	-	-	35	-
Batuan	1	-	-	10	-
Lenteng	3	-	-	7	5
Ganding	3	-	-	3	5
Guluk-Guluk	3	-	-	5	5
Pasongsongan	3	2425	-	7	10
Ambunten	8	3997	-	15	17
Rubaru	2	-	-	72	-
Dasuk	6	1067	-	15	-
Manding	0	-	-	10	-
Batuputih	6	1450	-	-	-
Gapura	4	671	155	13	-
Batang-Batang	6	1695	-	12	-
Dungkek	11	4669	234	13	-
Nonggunong	8	1300	-	-	-
Gayam	10	1618	-	-	-
Raas	9	2838	-	-	-
Sapeken	9	3498	-	-	-
Arjasa	15	1235	132	15	-
Kayangan	9	1043	-	-	-
Masalembu	4	3142	-	-	-
Jumlah Total	170	40.197	1238	307	68

[10] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab.Sumenep), 202
[11] BPS Kab. Sumenep, *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan masyarakat Sumenep difasilitasi oleh berbagai berbagai infrastruktur di bidang pendidikan baik yang dijalankan oleh pemerintahan atau dikenal dengan istilah "instansi negeri" maupun yang dijalankan oleh pihak swasta. Sarana pendidikan di Sumenep sudah banyak tersedia (meskipun tidak merata) mulai tingkat paling rendah hingga perguruan tinggi. Mulai dari TK yang berjumlah Total 362 (2 Negeri, 360 Swasta) sedangkan RA berjumlah 543, pada level pendidikan dasar tercatat ada 583 SD Negeri, 46 SD Swasta sedangkan MI berjumlah 537. Sarana pendidikan menengah pertama juga terdiri dari SLTP dan Mts masing-masing berjumlah 41 SLTP Negeri, 102 SLTP Swasta dan paling banyak Mts dengan jumlah 310. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah atas, komposisi sarana pendidikan terdiri dari SLTA/SMK Negeri SLTA/SMK Swasta dan MA yang masing-masing secara berturut-turut berjumlah 13, 81 dan 141.[12]

Sedangkan untuk perguruan tinggi tercatat sudah ada empat instanti baik negeri maupun swasta yaitu, Universitas Wiraraja, STKIP PGRI, Institut Annuqoyah (INSTIKA) IDIA Pragaan. Selain fasilitas pendidikan formal seperti yang telah disebutkan di atas, masih tersedia pendidikan informal yang diselenggerakan oleh masyarakat setempat. Tercatat di Sumenep ada sekitar 1.170 madrasah diniyah (MD) yang telah terdata oleh pihak kementerian agama, setiap kecamatan rata-rata angka madrasah diniyah mencapai dua digit angka, hanya Kecamatan Batuan yang tidak mencapai angka dua digit tepatnya 6 lembaga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah MD terbanyak adalah Arjasa dengan 98

[12] BPS Kab. Sumenep, *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga disusul Lenteng dan Pragaan masing-masing 79 dan 78. Secara keseluruhan jumlah murid yang mengikuti pendidikan Madrasah Diniyah tercatat dalam kementerian agama adalah 94.903 jiwa dan guru sebanyak 11.551 jiwa.[13]

Selain Madrasah Diniyah, sarana pendidikan informal juga dilaksanakan lewat pendidikan Pondok Pesantren. Lembaga Pondok Pesantren sebagaimana lembaga Madrasah Diniyah sangat populer di tengah-tengah masyarakat Sumenep. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, Pondok Pesantren pada dasarnya adalah lembaga tertua semenjak kedatangan Islam di wilayah nusantara. Sehingga ia sangat mengakar di masyarakat, demikian juga yang terjadi di Sumenep. Tercatat oleh Kementerian Agama Kab. Sumenep jumlah Pondok Pesantren di sumenep yang terdaftar di Kementerian Agama mencapai angka 30.693 instansi yang tersebar ke seluruh pelosok Sumenep. Pondok Pesantren tersebut hampir tersebar secara merata pada setiap kecamatan, hanya Kecamatan Talango saja yang tercatat tidak memiliki Pondok Pesantren. Kecamatan dengan jumlah Pondok Pesantren terbanyak berlokasi di Kecamatan Ganding dengan jumlah 24 disusul Guluk-Guluk sebanyak 23 dan paling sedikit di Kecamatan Ambunten dan Kecamatan Gayam masing-masing 1 Pondok Pesantren. Adapun santri dari keseluruhan pondok pesantren di Sumenep yang terekam oleh Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berjumlah 58.414 dengan rincian laki-laki 30.693 dan perempuan 27.721.[14]

[13] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 121.
[14] BPS Kab. Sumenep, *Sumenep Dalam Angka*, (Sumenep; BPS Kab. Sumenep), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Persebaran Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep		
Kecamatan	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah
Pragaan	4	78
Bluto	15	53
Saroggi	6	34
Giligenting	3	24
Talango	-	48
Kalianget	2	20
Kota Sumenep	14	40
Batuan	2	6
Lenteng	12	79
Ganding	24	45
Guluk-Guluk	23	71
Pasongsongan	8	57
Ambunten	1	29
Rubaru	17	54
Dasuk	8	30
Manding	10	23
Batuputih	11	49
Gapura	9	33
Batang-Batang	12	43
Dungkek	6	31
Nonggunong	3	28
Gayam	1	47
Raas	2	32
Sapeken	13	57
Arjasa	23	98
Kayangan	13	45
Masalembu	9	16
Jumlah Total	254	1.170

B. Sosial Budaya Masyarakat Sumenep

Salah satu elemen sosial budaya masyarakat Sumenep pada khususnya dan Madura secara keseluruhan selain kehormatan atau harga diri[15] adalah agama. Dalam kehidupan sehari-harinya, agama seringkali tercermin yang menunjukkan

[15] Kekerasan dan Keagamaan atau religiusitas adalah dua citra simbolik orang Madura. Keduanya berakar dari makna *Maloh* atau *Todus* yang bekerja pada kesadaran orang Madura. Religiusitas dalam hal ini Islam pada taraf yang lebih tinggi menyatu dengan identitas orang madura dan menjadi bagian dari harga diri orang Madura. (Lihat Abdur Rozaki, *Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura. Kyoto Review Of Southeast Asia Issue, 11. Desember, 2009. Hal 1-2*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana posisi agama telah begitu mengakar dalam alam kesadaran orang-orang Sumenep. Berkaitan dengan Agama masyarakat Sumenep, maka Islam merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat dan sangat mendominasi. Karena itu, Agama bagi masyarakat Sumenep adalah persoalan sakral dan sensitif yang akan membuat masyarakat bersedia berkorban apabila pada saat tertentu Agama mereka dirusak atau terancam. Sedangkan bentuk kongkret Islam yang dianut masyarakat Sumenep pada khususnya dan Madura pada umumnya adalah madzhab *ahlu al-sunnah wa al-jamaah*. Sebagaimana yang ditegaskan oleh K Dardiri Zubairi Bahwa bicara Madura berarti Bicara Agama, Agama bagi orang Madura adalah Islam sebagaimana pernyataannya di bawah ini; [16]

> ketika bicara madura, sebenarnya bicara agama, berbicara suatu wilayah yang dihuni pemeluk Aswaja, itu ngakar banget menurut saya. Ketika mendengar berita-berita yang dipahami mereka bisa mengganggu ideologi keagamaan ini, itu pasti melawan. Makanya meski relatif singkat dan ini saya kira bukan hanya kerjanya teman-teman,tapi banyak juga pihak lain yang bekerja yang nyambung dalam isu bahwa madura terancam, mau ada kepentingan asing masuk, dan itu dipahami mengganggu tidak saja alat produksinya orang madura dalam bentuk tanah lahan pertanian, tetapi juga nalampan kultur masyarakat madura dan pandangan keagamaannya. Itu yang turut membangunkan para kiai termasuk untuk merespon kasus ini.

Pada tataran Organisasi masyarakat, masyarakat Madura mayoritas berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU). Manifestasi dalam ungkapan-ungkapan semacam *abantal syahadat, asapo' iman, pajung Alloh,* menunjukkan bagaimana kuatnya agama bagi orang Madura yang sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat madura berjiwa Islam. maka tidak heran jika agama seringkali dekat dengan konsep harga diri dalam adat orang Madura. Kondisi keberagamaan masyarakat Sumenep ini selaras dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya seputar

[16] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura. Masdar Hilmy mengungkap bahwa belum ditemukan seorang muslim Madura yang berpindah keyakinan, kalaupun ada orang non-muslim di Madura, biasanya mereka pada dasarnya bukan keturunan orang Madura asli, tapi lebih karena aktifitas migrasi dan akhirnya menetap di Madura. Jadi, bagi masyarakat Madura persoalan Islam dan menjadi seorang yang memeluk Islam adalah persoalan identitas simbolik.[17]

Selama setahun misalnya, kehidupan orang Madura banyak diwarnai dengan ritual-ritual keagamaan. Sebut saja ritual untuk mengenang keluarga yang telah meninggal dunia atau *hol-holan*. Kenduri atau ritual bulanan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dalam kalender *hijriyah*, seperti *Tajin sora* yang dilaksanakan pada *bulan Sora* / *Muharrom* (bulan pertama Islam), bulan berikutnya ada *Tajin Safar,* bulan Rabi'ul awal ada ritual *mulodhen* (Maulid Nabi) untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad dengan mengadakan pengajian dan *sholawatan*, dimana pada puncak atau akhir bula tersebut masyarakat berbondong-bondong mendatangi pengajian dan *sholawatan* yang dilaksanakan di desa.[18] Pada bulan Rabi'ul akhir ada ritual *rasolan.* Pada tanggal 27 Rajab ada selametan untuk Isra' Mi'raj Nabi. Saat orang Madura memberikan sedekah *telasan agung,* merayakan akhir puasa. Pada hari ke delapan bulan Syawal ada *telasan ketopa'*. Ada juga istilah *nyabel*. kemudian dalam bulan Dzulhijjah, dilaksanakan perayaan pesta haji dan disebut sedekah *telasan haji*.[19]

---

[17] Masdar Hilmy, Al-Jami'ah; Journal Of Islamic Studies, "*The Political Economy Of Sunni-Shi'ah Conflict In Sampang Madura* ", Vol. 51, No 01, 2015, 30.
[18] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep,15 Januari, 2017
[19] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep 16 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu kentalnya masyarakat Sumenep dengan nuansa keislaman juga tercermin dalam popularitas kelompok-kelompok *kompolan* dan pengajian. Dalam setiap dusun biasanya ada kelompok *kompolan*, sehinnga sebuah Desa di Sumenep bisa mempunyai lebih dari satu kelompok *kompolan*. *Kompolan* adalah sebutan untuk kelompok perkumpulan lokal yang komposisinya terdiri dari belasan hingga puluhan *jemaah* (anggota) dan dipimpin oleh seorang tokoh agama tertentu atau Kiai. Setiap tokoh agama yang memimpin *kompolan* bisa memiliki lebih dari satu kelompok *kompolan*. Biasanya tokoh agama yang memiliki lebih dari satu *kompolan* tersebut karena ia juga menjadi pemimpin atau pemandu *kompolan* di lintas desa.[20]

Dalam prakteknya *Kompolan* diadakan biasanya sekali dalam seminggu, tapi ada pula yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan, keberagman jadwal pelaksanaan tersebut lebih dikarenakan keinginan dan kesepakatan dengan anggota kelompok. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu Kiai;

> Engghy, setiap malam rebbu, jumat, sabtu. Manabi malem rebbu kaintoh sekitar 20 an, manabi malam jum'at kaintoh satu tempat bede se 25 an oreng, terus tempat yang lain bede 70 an, malam jum'at kaintoh bede due', settong e desa Banyuajuh Timur, terus pulangnya saya singgah di Longos, cuma agak malam. Biasanya sholawatan, tahlilan ghellu kaangghuy keselamatan jemaah bhuru tanya-jawab, musyawarah ponapah se ekabhutoh. Tergantung jemaah, kadeng sampe setengah jhemm sajhem.

Pelaksanaan *kompolan* biasanya pada malam hari setelah masyarakat selesai dari rutinitas pekerjaannya yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh., *kompolan* semacam ini berisi tentang kajian atau perbincangan seputar Islam yang tidak begitu formal seperti pada pengajian-pengajian yang membutuhkan moderator atau MC. Kajian atau perbincangan yang berlangsung dalam kelompok

[20] K Mursyid, *Wawancara*, Sumenep, 18 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompolan beragam sesuai tempat, kondisi dan keinginan anggota *kompolan*. Ia bisa berupa acara mambaca sebuah surat al-Qur'an dilanjutkan dengan kajian fikih keseharian, atau juga berupa *sholawatan* dilanjutkan dengan tanya-jawab, isi kajian juga bisa berupa kajian tasawwuf, tafsir, kajiann fikih produk mazhab.[21]

Islam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas ke-Madura-an juga dapat dijumpai pada sektor pendidikan. Data sebelumnya menunjukkan bagaimana Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren tersebar ke seluruh pelosok daerah Sumenep. Eksisnya Pondok Pesantren paling tidak menggambarkan apa yang dicita-citakan masyarakat Sumenep tentang generasi penerusnya serta kecenderungan minat mereka. Dalam sebuah wawancara seorang tokoh agama menyampaikan perihal perilaku masyarakat yang masih menjadikan pendidikan pondok pesantren sebagai tujuan pendidikan anak-anaknya. Bagi masyarakat Sumenep, *mamondhuk anak* (mengirim anak ke pondok) sudah menjadi sebuah tradisi yang lazim.[22]

C. Pesantren dan Relasi Patron-Klien

Kondisi sosial masyarakat Sumenep yang sangat banyak diwarnai oleh ritual keagamaan Islam menciptakan ruang tersendiri bagi aktor keagamaan atau tokoh agama. Dalam hal ini, kyai dan santri-santri memegang peran kunci. Aktor agama dengan sendirinya akan menjadi pimpinan dalam beberapa dimensi kehidupan masyarakat Sumenep. Pada tahap selanjutnya, corak masyarakat Madura yang religius melahirkan konsekwensi kepatuhan dan penghormatan pada

[21] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep, 16 Januari 2017.
[22] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep, 17 Januari, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh atau elit agama. Kiai diposisikan sebagai sosok yang sakral penuh dengan kebijaksanaan, keistimewaan karena memiliki derajat tinggi di sisi Tuhan. Masyarakat Sumenep pada khususnya dan Madura pada Umumnya percaya bahwa *ngabuleh* adalah sebuah jalan untuk mendapatkan *barokah*, sebaliknya berbuat yang tidak semestinya terhadap kiai akan mendatangkan *tola*.[23]

Posisi Kiai dalam ruang kehidupan masyarakat Madura dapat dilihat dalam rumus nilai atau norma *buppa' babbu', guru, rato,* (kedua orang tua, para kyai / guru dan dan penguasa/pemerintah). Ungkapan diatas menggambarkan dimana dan bagaimana posisi guru dalam konteks kehidupan ke-madura-an. Guru yang di kemudian hari sangat identik dengan kiai menempati urutan kedua setelah orang tua. Orang Sumenep sudah terbiasa meminta doa dan ijin kiai selain ibu dan bapak atas suatu perbuatan, doa kiai dianggap manjur karena sebagai orang istimewa di hadapan Tuhan, nasehat dari kiai juga selalu diminta untuk dijadikan pertimbangan.[24]

Kiai juga menjadi rujukan dalam banyak hal bukan hanya persoalan agama, ia seringkali menjadi pihak yang dapat menyelesaikan masalah pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum. Lebih jauh lagi, Kiai juga seringkali menjelma sebagai referensi masyarakat dalam permasalahan politik, ekonomi dan budaya. Dalam politik misalnya, masyarakat tidak jarang menunggu pendapat Kiai panutannya untuk memutuskan akan memilih siapa, begitu pula si calon pemimpin belum merasa lengkap jika tidak *sowan* dan meminta restu dari Kiai. Sedangkan dalam tataran pribadi atau keluarga, seringkali masyarakat Madura

[23] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep, 16 Januari 2017.
[24] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta pertimbangan dan nasehat pada Kiai perihal pendidikan anaknya, apakah akan dikuliahkan diluar atau tetap berada di pondok, begitu juga dengan jodoh dan rencana pernikahannya, tidak jarang juga mereka meminta dicarikan jodoh atau pasrah dan menerima dengan penuh hormat pasangan pilihan Kiainya.[25]

Praktek-praktek yang terjadi di tengah masyarakat Sumenep menunjukkan kapasitas Kyai di Madura sebagai pemimpin informal. Pada tahap selanjutnya, relasi masyarakat dengan Kiai menciptakan kondisi yang menempatkan Kiai sebagai rujukan dan masyarakat sebagai pengikut. Kondisi Patron-Klien ini seringkali tetap dibawa oleh santri yang tidak lagi menetap di pondok pesantren. Hubungan Patron-klien dengan kiai pondoknya biasanya tetap terjaga walaupun si santri telah hidup di tengah masyarakat. Hubungan seperti diatas juga bisa terjadi antara kiai *langgar* dan santrinya, hubungan tersebut seringkali masih terbawa walaupun keduanya sudah tidak berada dalam hubungan belajar-mengajar.[26] Seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber sebagai berikut "*Kaule jhughen mun santre dhibik, nekah epanggil sareng kauleh pas ebeleih masalah tanah nekah*", pernyataan di atas menggambarkan bagaimana seorang kiai menggunakan hubungan guru-murid atau kiai-santri nya untuk mengatasi persoalan tanah.[27]

Kondisi diatas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren yang telah terbangun di tengah masyarakat. Pesantren atau *Pondhuk* (Pondok) memang sangat populer di Sumenep. Ciri dan indikasi bahwa Mayarakat Sumenep pada khususnya dan Madura pada umumnya adalah masyarakat reiligius adalah

[25] K Mursyid, *Wawancara*, Sumenep, 18 Januari 2017
[26] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep, 17 Januari, 2017
[27] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep, 16, Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi pendidikan Islam, dalam hal ini Pesantren dan Madrasah Diniyah. Sebagaimana data demografis tentang lembaga pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya, pesantren menyebar hampir ke seluruh kecamatan di Sumenep, tidak sedikit dalam satu kecamatan jumlah pondok pesantren lebih dari tiga. Jumlah pondok pesantren yang mencapai angka 254 lembaga dan Madrasah Diniyah dengan jumlah 1170 menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam sangat populer. Salah satu sumber menyatakan bahwa mengirim anak ke pondok adalah tradisi bagi masyarakat Sumenep;

> mun neng kaintoh, mamondhuk anak panekah deddhi tradisi, kabhutoan oreng. Tak oning manabih e Bangkalan, pola polanah semma' ke Sorbheje, tak padeh sareng e Sumenep ghy. Mun reng dinnak panekah pengeterronah anak se taoh elmu aghema, taoh tengka, taoh aghulih. Laen bik jhebeh, mun jhebeh kan anak dekremmah sakeranah sebisa'ah olle lakoh, bisa mandiri.[28]

Petikan pernyataan diatas menyiratkan sebuah makna pondok atau pesantren bagi masyarakat Madura, selain agar anak-anak mereka memahami ilmu agama, harapan agar anak-anak mereka dapat mengerti *tengka* atau tata cara bersikap dan bertingkah laku di tengah masyarakat. Jadi, pondok menjadi populer karena bagi masyarakat Madura pendidikan bukan hanya berbicara tentang bagaimana membuat seseorang mempunyai intelektual, skill dan pengetahuan yang dapat menjamin masa depan anak-anak mereka secara material, lebih dari itu adalah membuat anak-anak mengerti agama dan cara bertingkah laku.

Posisi pesantren semakin penting dengan adanya Madrasah Diniyah. Dari seluruh Kecamatan di Sumenep tidak ada setupun yang tidak memiliki Madrasah Diniyah. Rata-rata setiap kecamatan memiliki lebih dari 20 Madrasah Diniyah,

[28] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep, 17 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya Kecamatan Batuan dan Masalembu yang jumlahnya dibawah 20. Merujuk pada keterangan Fahri (Nama Samaran) Guru yang menjadi tenaga pengajar di Madrasah Diniyah biasanya adalah para alumni Pondok Pesantren, baik mereka yang dari Pondok Pesantren di daerah Sumenep sendiri atau alumni dari pondok pesantren di luar Sumenep.[29]

Hegemoni "orang-orang pesantren" tidak hanya bisa ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Diniyah saja. Beberapa organisasi masyarakat, seperti LSM, organisasi kemahasiswaan organisasi kepemudaan juga banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki riwayat *nyantreh* atau belajar di pondok pesantren. Sebut saja misalnya PMII Cabang Sumenep (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), mulai dari awal berdirinya yaitu pada tahun 2000 M, Ketua Umum selalu dipegang oleh orang-orang yang memiliki riwayat *nyantreh* atau belajar di pondok pesantren. Bahkan salah satu cabangnya berada di kawasan pondok pesantren yaitu di Annuqoyah. Organisasi-organisasi masyarakat yang komposisinya juga banyak dari kalangan pesantren tentu adalah NU dan badan-badan otonomnya seperti Gerakan Pemuda Ansor Cabang Sumenep. Selama dua tahun terakhir posisi ketua umum dimenangi oleh orang yang sama, dan dia merupakan santri alumni Annuqoyah Guluk-Guluk.[30]

Dalam konteks organisasi masyarakat, kepemudaan dan kemahasiswaan juga terdapat pola hubungan Patron-Klien meskipun tidak selalu kaku seperti pada hubungan kiai-santri. Kaderisasi (dalam istilah PMII) biasanya akan menghubungkan para junior dalam organisasi dengan senior-senior yang telah

[29] Pendi, *Wawancara*, Sumenep 20 Januari, 2017
[30] Rosyidi, *Wawancara*, Sumenep, 21 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

purna secara struktural dan aktif di organisasi lain. Dalam konteks ini, seringkali anggota organisasi kemahasiswaan (PMII) berhubungan dan menjalin kontak dengan seniornya yang aktif di organisasi lain (GP Ansor).[31]

Dari uraian di atas, bisa dipertegas bahwa hubungan simbolis yang membentuk suatu definisi subyektif bersama bagi orang Madura telah menghasilkan suatu Konsep diri yang khas dan unik tentang siapa sebenarnya "aku" bagi orang Madura. Peneliti melihat "keunikan" inilah sebenarnya yang merupakan konsep diri orang Madura. Keunikan budaya yang khas Madura ini nampaknya bisa ditelusuri dengan mengemukakan pendapat Mead mengenai teori Darwinisme sosial, bahwa suatu organisme terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bahwa melalui proses ini bentuk atau karakteristik organisme mengalami perubahan yang terus menerus.

D. Praktek Jual-Beli Tanah

Peristiwa penjualan dan pembelian tanah secara massif di kabupaten Sumenep, terutama sekali tanah yang letaknya berdekatan dengan pantai diperkirakan mulai terjadi sejak tahun 2014. Menurut laporan data investigasi, sampai akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, ada sekitar 14 desa dari sembilan kecamatan di Sumenep yang tanahnya beralih pada pembeli. Beberapa desa yang berhasil di data diantaranya; 1) desa Andulang Kec. Gapura 14 ha ; 2) Banjar Timur Kec. Gapura 1.1 ha; 3) Gapura Tengah 1 petak tanah; 4) Karang Buddi

[31] Bahir, *Wawancara*, Sumenep, 22 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kec. Gapura 4 ha; 5) Lapa Daya Kec. Batang-Batang 20 ha; Lombang 29 ha; 6) Kombang Kec. Talango 28 ha.[32]

Harga tanah di Sumenep yang d incar oleh pembeli beragam, berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam sebuah laporan investigasi, harga tanah awalnya Rp 6000 hingga 10.000 permeter persegi. Pada tahun 2016 tanah mulai dihargai rata-rata senilai Rp 25.000. Ada beberapa desa yang mematok harga Rp. 200.000 per meter. Seperti pengakuan salah seorang anggota gerakan yang menolak jual-beli tanah berikut;

> Harga tanah itu bermacam-macam, mulai dari 5000, 7000, 10000, 20000 sampai 25000 per meter paling tinggi. Itu ragam harganya. Tiap waktu naik. Tapi Wilayah Dasuk ini kemarin terakhir itu masyarakat pasang harga 200000 rb. Kalau tidak 200000 tidak dikasih, masyarakat mulai cerdas, katanya mun butoh pagghun se ebellih polanah reng cenah.[33]

Pembelian tanah tidak hanya terjadi di desa yang telah disebutkan diatas, masih banyak desa-desa yang tanahnya menjadi incaran pembelian, namun jumlahnya belum diketahui secara pasti, sebut saja, desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk yang dekat dengan akses pantai Slopeng, desa Badur Kecamatan Batuputih dan banyak lagi.

Lokasi Peralihan lahan.[34]	Luas Lahan	Status Lahan	Pemegang Saham		Jumlah Nilai Nominal Saham
			Pemegang Lahan	Peserta Asing	
Andulang (Gapura)	10.66 ha	Tambak Udang	CV. Madura Marina Lestari RP.	-	Rp. 1.450.000.000.00-

[32] Moh. Royhan, "Investor Borong Tanah Sumenep; Penduduk Diancam, Ditakuti Ditipu", *Fajar,* Vol. XIV, (Agustus, 2016), 5.
[33] Royhan, *Wawancara*, Sumenep, 22 Januari 2017
[34] BPPT Kab. Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			1.450.000.000.00,-		
Lombang (Batang-Batang)	11.788 ha	Tambak Udang	CV. Lombang Sejahtera Bersama Rp. 500.000.000.00,-	-	Rp. 1.500.000.000
Lapa Daya (Dungkek)	20 ha	Tambak Udang	Hadi Cokro, PT. Samudera Perkasa (35,00%). Rp. 3.250.000.000.00,-	Yuji Kondo Newbara, Co Ltd. Jepang (65,00%). Rp. 1.750.000.000	Rp. 500.000.000
Kerta Timur (Dasuk)	63.335m2/ 6.335 ha	Tambak Udang	UD. Widya Mandiri	-	Rp. 7.793.630.000

Praktek pembelian tanah ini banyak melibatkan oknum pemerintah desa setempat, orang-orang yang berpengaruh di desa desa setempat. Berdasarkan pengakuan salah satu anggota gerakan penolakan tanah Orang-orang tersebut bisa merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama dan *bajing* (preman) setempat;

> Investor ini banyak caranya, kalo bedeh tanah se eyencer pas tak ekenneng e lombang,seareh bede 4 oreng entar ke romanah itu wajar cek wajarah, kadeng familinah se entar kadeng tokoh agama se entar. Menariknya orang-orang yang datang dalam sehari itu berbeda-beda, disuruh dilepas…Ada ancaman, terutama dari para broker, bisa bajing, bisa klebun, diancam... Persoalannya ada juga tokoh agama yang terlibat.[35]

Mayoritas masyarakat menduga bahwa orang-orang yang membeli tanah sebenarnya bukan orang yang secara langsung mendatangi pemilik tanah, sebaliknya mereka yang datang dan melakukan transaksi adalah para makelar

[35] Royhan, *Wawancara*, Sumenep, 22 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi kaki-tangan dari orang di belakang mereka. Sedangkan pembeli sebenarnya adalah investor yang berasal dari luar Sumenep atau luar madura. Sebagaimana penuturan salah seorang pemilik di tanah di Batang-Batang;

> Saya sendiri ada yang nawar, tapi pembelinya tidak jelas. Dua tahun yang lalu kaule punya azam ibu epamekka'ah, kaule nyoba nyare ca kanca se ampo mellean tanah, nah itu waktu saya tawarkan langsung naber 75, padahal kaule melle taon 90an nekah 2jt setenga. Mereka berani nawar 75. Ukurannya sekitar 0,5 Ha. Kadintoh waktu saya beli tanah tidur, belum dimanfaatkan. Kemudian sareng kaule etameni kajuh. Kaule mencoba ta kanta mataber 100, bahkan ekala'ah, tak ebeghy sareng kauleh, karena pembelinya nekah tidak jelas. Kaule atanya "paserah se melleah", nten toreh pa jellas "engghy nekah bedeh, pak camat" terus ebelli pak camat paserah "ghy korang oneng". Mangken epaburung, burung tak ejueleh. Mun oreng lokal panekah, karena bede se eyabes polanah bede kajuh jati, nekah pon paleng 50 jt. Kemudian dengan harga yang sangat menggiurkan kadintoh, apa tujuan mereka? Kan tak mungkin ben adek tojjoen laen pas eberri' bhenih, umpan, kan tak mungkin. Kan tak mungkin sampean entar ke tasek mata kail nekah tak dikasih aponapah? Kan tak mungkin. Mesti bede tujuan se tersembunyi.[36]

Kecurigaan pemilik tanah didasarkan pada harga normal pembelian tanah oleh masyarakat setempat. Biasanya masyarakat setempat akan menawarkan harga paling tinggi sekitar 50 juta untuk tanah pekarangan dan tegal berukuran 0,5 Ha. Sedangkan orang yang akan membeli tersebut penawaran awal sudah mencapai angka 75 juta. Kemudian pemilik tanah mencoba menawarkan harga 100 juta yang langsung disetujui oleh calon pembeli. Setelah ditelusuri ternyata si pembeli hanya disuruh oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya.

Banyak cara yang digunakan oleh para calon pembeli tanah atau investor meminjam bahasa masyarakat sekitar. Selain memberikan harga tinggi, tidak jarang para calon pembeli tersebut –melalui kaki-tangannya- mengintimidasi pemilik tanah agar bersedia melepas dan menjual tanahnya. Penuturan salah

[36] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep, 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

soerang warga di desa Lapa Daja bahwa dia diancam oleh para makelar investor jika tanahnya tidak dijual, maka dia akan dipersulit aksesnya untuk menuju tanahnya sendiri. Dengan begitu pemilik tanah tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali menjual tanahnya tersebut. pada akhirnya tanah seluas 1400 meter persegi itu dijual dengan harga Rp 25.000 per meter.[37] Hal senada juga ditemukan di desa Dapendah dimana para makelar tanah menggunakan cara intimidasi dan ancaman untuk mendapatkan tanah yang di incarnya;

> Ada ancaman, terutama dari para broker, bisa bajing, bisa klebun, diancam. Misalnya mun tak ebeghy tegelleh ghebeyeh tempat sampah. Mereka yang jual-jual itu tidak ngerti bagaimana nanti 5 tahun ke depan, industri itu orang disetir dengan uang, materi. Agama sepi, para kiai tidak diikuti nanti. Persoalannya ada juga tokoh agama yang terlibat….Investor ini banyak caranya, kalo bedeh tanah se eyencer pas tak ekenneng e lombang, seareh bede 4 oreng entar ke romanah itu wajar cek wajarah, kadeng familinah se entar kadeng tokoh agama se entar. Menariknya orang2 yang datang dalam sehari itu berbeda-beda, disuruh dilepas.[38]

Petikan wawancara di atas juga menyiratkan bagaimana para investor tersebut bekerjasama dengan orang-orang "kuat" setempat untuk membujuk pemilik tanah. Dalam sehari, pemilik tanah bisa di datangi empat orang tokoh masyarakat –tokoh agama, *bajing*, aparat desa, famili sendiri- merupakan kejadian yang wajar, terutama didaerah Lombang. Keterlibatan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam praktek jual-beli tanah salah satunya dipicu oleh honor yang tinggi dari para investor. Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Gapura misalnya menuturkan bahwa peran Kepala Desa sangat sentral dalam persoalan jual-beli

[37] H Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 22 januari 2017
[38] Royhan, *Wawancara*, Sumenep, 22 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah ”*karena sekarang yang banyak pembayarannya di muka itu Kepala Desa*” ungkap Kepala Desa yang tidak mau disebut identitasnya.[39]

Modus praktek-praktek jual beli tanah juga melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seringkali para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat menggunakan ide-ide tantang nilai prestis dan kedudukan istimewa pangkat “Haji” untuk membujuk para pemilik tanah. *Ajjih* atau “Pak Haji” dalam tradisi orang Madura memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses Haji di Sumenep yang selalu melibatkan orang banyak dan jadi tontonan mulai dari pemberangkatan hingga pulang kembali menjadi keinginan setiap orang Islam di Sumenep. Pemanggilan terhadap orang yang sudah Haji berbeda dengan orang yang belum Haji. Dalam aktifitas sosial-keagamaan seperti ritual-ritual *tahlilan, slametan* dan sejenisnya, orang-orang yang baru datang dari ibadah Haji akan di tempatkan di atas *langgar*, seolah telah memiliki tempat duduk tersendiri.[40] Pada tataran yang lebih tinggi Haji menjelma jadi bagian dari parameter ‘Harga Diri” dan “Kehormatan” bagi orang Madura.[41]

---

[39] Royhan, *Wawancara*, Sumenep, 22 Januari 2017

[40] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 15 Januari 2017

[41] Hampir semua varian budaya yang muncul di tengah masyarakat Madura (Naik Haji, Karapan sapi, Adu Ayam hingga Carok) alasan utama kelahirannya adalah Kehormatan.Demi sebuah kehormatan orang Madura bisa melakukan apa saja, bahkan jika harus kehilangan nyawa dalam medan tanding bernama Carok. Bisa melakukan berbagai upaya ekstrim dalam karapan sapi dan adu ayam. Bisa menjual aset apa saja yang penting demi bisa Naik Haji. Seperti banyak diungkapkan oleh para tokoh utama Madura di berbagai media yang pernah saya baca. “Orang Madura bisa apa saja...yang tidak bisa hanyalah mendapat malu”, *maloh* atau *todus* dalam bahasa Maduranya. Bagi orang *‘ango’an pote tolang etembang pote matah’*, artinya lebih baik putih tulang dibandingkan putih mata, lebih baik hidup berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Orang Madura tidak akan sanggup menanggung malu, maka juga tidak akan mempermalukan orang Lain. ‘Hidup itu tidak ada maknanya kalau kehilangan harga diri dan tidak punya kehormatan’. Negasi di dalam “malu” adalah “kehormatan” (Lihat Muhtar Wahyudi “Jurus Ombak dan Angin; Komunikasi Politik Si Pencari Ikan” dalam *Madura; Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*, 03).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ide tentang naik Haji dipakai oleh para makelar untuk memotivasi para pemilik tanah –terutama menengah ke bawah- agar melepaskan tanahnya dan kemudian menunaikan ibadah Haji dengan uang yang di dapat dari penjualan tanah. Salah satu sumber menyatakan bahwa salah seorang tokoh di daerah Lombang dengan terang-terangan menggandengkan penjualan tanah dengan berangkat Haji, "*modusnya panikah ghy akadhi, ayok beknah tana nah jhuel, bekna la toah, ghibe ke Mekkah*". Strategi-strategi yang dekat dengan nilai masyarakat tersebut dinilai sangat efektif untuk memuluskan langkah pelepasan tanah. Salah satu tokoh agama yang memiliki kelompok *kompolan* menueturkan bagaimana ide naik Haji digunakan;[42]

> …jadi bahasa yang mereka sampaikan juga bahasa rakyat, engghy bisa ongghe hajji bisa napah. Penjualannya kan mahal engghy esoro daftar haji. Masyarakat kan biasanya yang punya sepetak pas ebelli saghemik juta kan la pas gempang luh naik hajji… Engghy manabi tekka hajet naik haji disini kan sangat diharapkan oleh mereka. Karena mulai dhimin kan mun tak oreng kaya tak bisa nak haji. Sama makelar dirayu naik haji, dan harga tawarnya tinggi…

Selain menggunakan ide-ide tentang Haji, para tokoh masyarakat juga melakukan transaksi –meliputi pendataan tanah yang bersedia dijual dan penawaran- melalui *kompolan* atau majelis "dadakan". Para tokoh tertentu membuat sebuah kelompok *kompolan* baru, kelompok dzikir atau pengajian baru, dimana di dalamnya juga berisi transaksi jual-beli tanah. Hal seperti disampaikan salah satunya oleh tokoh agama muda juga sering melakukan kontak dengan tokoh agama yang memakai medium *kompolan* dan pengajian untuk melakukan transaksi. Peranan *kompolan* atau kelompok pengajian "dadakan" ini berfungsi sebagai wadah berkumpulnya masyarakat yang sangat kental dengan ritus-ritus

[42] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep, 17 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan. Didukung oleh keberadaan tokoh agama yang menginisiasi kelompok "dadaka" ini semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang dan terlibat. Selanjutnya, pembicaraan mengenai lokasi-lokasi atau pemilik tanah yang berpotensi tanahnya dijual berlangsung.

> masok deri kompolan, dia aghebey kelompok, adhikkir, maca sholawat nariyah. Tapi kemudian setelah itu diantara mereka abhek-rembhek dimana tanah yang mau di jual. Anggap lah ya padenah gerakan-gerakan keagamaan yang lain, bahkan diantara tokoh masyarakat itu sendiri ada yang menjual tanahnya. Itu e Lombang ben kauleh taoh persis, polanah cara pandang sukses semisal e daerah Lapah, Tamansareh termasuk juga Lomabng panekah, Mondhuk (asakolah), pulang ke rumah, Haji. Nah ketika mereka sudah punya status sosial Haji, mereka sudah terhitung sukses. Samangken kan daftar Haji mahal, daftar tunggu abit, lalu ada peluang ajhuel tanah, ayuk kakeh tana nah jhuel, ghige ke Mekkah, nah iming-iming ke Mekkah nekah pas mereka tertarik ajhuel tanah.[43]

Sedangkan para "pemborong" tanah yang sebenarnya di balik para "makelar" tersebut masih belum ditemukan secara pasti. Namun, masyarakat *grassroots* cenderung nmenduga kuat mereka adalah investor-investor Cina, baik yang dimaksud dengan Cina merujuk pada orang Cina yang tinggal dan berkebangsaan Indonesia atau Cina dalam arti yang ada di negera Cina. Namun yang pasti ada kecenderungan masyarakat menilai para pembeli adalah "orang non-muslim". Sebagaimana penyampaian salah satu tokoh masyarakat dan pemilik tanah "Di bawah ya anggapannya orang luar, bahkan luar negeri yang sudah pasti orang tidak Islam… Asing, deri kalangan non-muslim. Karena rata-rata yang menguasai pantai utara nekah mpon cina…".[44] Tokoh yang lain juga menuturkan hal yang serupa

[43] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep, 17 Januari 2017
[44] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep, 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Mereka oneng ampon jhek se melleh nekah benni makelar nekah. Jhek se melle nekah paste reng luar. Pihak luar nekah se terbayang e masyarakat bebe ghy cina. Orang yang punya modal besar dan itu cina. Tak mungkin oreng kaintok melle larang. Kauleh juga biasanah pake contoh e Lapah ”bahwa mereka tak peduli pajhet, kobhuren sangat dikeramatkan oleh kita ghy tak peduli.[45]

Ada semacam *Stereotype* masyarakat bahwa pembeli tanah sebenarnya adalah investor, dan bagi masyarakat Sumenep ada kecenderungan kuat yang menggeneralisir bahwa investor tersebut merupakan orang Cina baik dalam arti sebenarnya atau orang Cina berkebangsaan Indonesia.

E. Makna Tanah dan Pergeserannya

Tanah bagi masyarakat Sumenep merupakan alat produksi yang sangat krusial, selain laut. Fakta ini berkorelasi dengan data-data statistik tentang bidang pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Sumenep. Lahan-lahan pertanian di Sumenep secara keseluruhan juga menunjukkan angka yang signifikan. Dengan demikian, tanah di daerah Sumenep mempunyai arti ekonomi yang besar.

Selain posisinya yang sentral dalam roda perekonomian, tanah juga memiliki makna-makna kultural yang khas bagi masyarakat Sumenep khususnya dan Madura secara keseluruhan. Bagi orang Madura Tanah bukan hanya properti atau komoditas yang hanya sebatas bersifat ekonomi. Lebih dari itu, tanah merupakan *sekep* (jimat rahasia) yang diwariskan oleh leluhur pada generasi

[45] K Mursyid, *Wawancara*, Sumenep, 18 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya. Ada sebuah nilai yang terkandung dalam tanah leluhur yang lebih dari sekedar nilai ekonomi.

Dalam istilah Madura, hal seperti di atas terdapat dalam tanah *sangkol*. Dalam tradisi dan budaya orang Madura, *tana sangkol* merujuk pada tanah atau lahan pemberian dari para orang tua atau leluhur. Maka *sangkolan* adalah aset yang harus dipertahankan, tidak diperkenankan dijual secara sembarangan. Orang-orang dahulu juga masih sering memberikan peringatan tentang tanah sebelum dia meninggal atau *naza', "sengak tana jhek jhuel, areah sekep, pusaka deri sengkok"* yang artinya "awas tanah jangan dijual, ini pusaka dari saya.

K Mursyid menuturkan bahwa "*Enggy korang ngormat ke paparengah reng seppo. Kecuali kangghui naik haji. Karena naik haji termasuk hal yang penting dalam agama tak napah makke sampe ajuel sangkolan reng sepponah*". Menjaga *tana sangkol* dalam sejarah orang Sumenep dulu adalah perwujudan dari bentuk *estoh* pada orang tua. Penghormatan terhadap pemberian orang tua diwujudkan dengan cara merawat *tana sangkol*, sekalipun secara ekonomi tidak terlalu menguntungkan. Sebaliknya menjual *tana sangkol* secara sembarangan berarti tidak menghormati pemberian oran tua. Kalaupun *tana sangkol* harus dijual, maka harus dijual dengan tujuan yang mempunyai kaitannya dengan agama, seperti untuk Naik Haji.[46] Perilaku ini berkorelasi dengan nilai *Bappu, Buppa' Ghuru Ratoh*.

Menjual tanah di Madura sebenarnya adalah perbuatan yang hina. Karena itu, di pedesaan dan pelosok-pelosok Madura pada umumnya dan Sumenep pada khususnya, apabila seseorang terpaksa menjual tanah, biasanya dilakukan secara

[46] K Mursyid, *Wawancara*, Sumenep, 18 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diam-diam agar tidak ketahuan orang ataupun keluarga sendiri. Atau ada pula yang menjualnya ke saudara-saudaranya untuk kemudian di suatu hari akan dibeli kembali.[47]

Bayjuri yang merupakan salah satu penggerak kelompok yang menolak investor di desa Dapendah Kecamatan Batang-Batang juga memaparkan makna *tana sangkol* sebagai berikut;

> Rata-rata madura seperti itu, oreng tua kauleh sampe semangken ngucak, mun bisa tanah riyah jhek jhuel cong, sangkolaghy ke nak potonah polanah tana adek toko nah, rabet, mun ajhueleh tanah ajhuel se laen bhei. Karena biasanah sekaleh ajhuel tanah pas tanah-tanah se laen nekah ikut terjual. Saya lihat seperti itu, mun pon enteng ke tanah ejhuel, nekah enteng ke tanah2 se laen, ikut di jual. Ini memang fakta di bawah, se lebur maghedy tanah nekah akhirnya dijual, se lebur ajhuel akhirnya terjual semua yang mereka miliki tana2 sangkolanah. Dulu orang itu dianggap kaya mun benyak tana nah "aruwah anak sapah? O se benyak tana nah rowa yeh, tak kerah anu jek, jhek benyak tana nah,". Ada semacam memperoleh kasta posisi lebih tinggi. Tapi seiring jaman, se de ngudeh nekah ajhuel ajhuel tana sangkol terro beli mobil. Tanah itu semacam tanda keperkasaan. Dulu tanah dijual mun ghebei haji. Jadi kalo ada orang yang jual tanah bukan karena haji orang yang mendengarnya nyinyir, deddi cak oca'an. kalo haji tak rapah karena menjual aset untuk beribadah.[48]

Pernyataan di atas sekali lagi mempertegas bahwa menjual *tana sangkol* dulu tidak bisa sembarangan. Orang yang suka menjadikan tanah sebagai jaminan penggadaian misalnya ada kemungkinan besar akhirnya dia suka menjual. Jika seorang sudah suka menjual tanah, kemungkinan selanjutnya adalah dia akan menjual semua tanah miliknya. Memiliki tanah bisa membuat strata sosial seseorang lebih tinggi. Menjual tanah sembarangan akan membuat orang-orang yang mendengarnya nyinyir dan tidak diapresiasi. Sebaliknya kalau tanah dijual

[47] KH. Pandji Taufik (Ketua PCNU Sumenep), *Wawancara*, Sumenep, 20 Januari 2017
[48] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep, 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berangkat Haji, maka masyarakat akan menilainya sebagai tindakan yang dapat dimaklumi karena untuk beribadah haji.

Namun, dengan adanya fenomena jual-beli tanah secara besar-besaran yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat Sumenep, mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan cara pandang dalam sebagian masyarakat terhadap komoditas tanah (*tana sangkol*). Disebut sebagian karena masih banyak masyarakat yang menjual tanah karena alasan lain seperti ingin, naik haji, diancam dan intimidasi. Sebagian masyarakat yang menjual tanah beralasan bahwa ia juga ingin sukses dan keluar dari kehidupannya yang serba sulit. Maka dengan adanya investor yang bersedia membeli tanah mereka bahkan diatas harga "biasanya", mereka tidak ragu untuk menjualnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber;

> masyarakat panekah kadheng mun eajhek arembhek pas lajhu ngocak, 'jhek engkok bhuto pesse ghebei majer otang', mun tak ebeghy ejhuel marah belli bik beknah', pas deiyeh, mereka kadang bede se terro soghieh mendadak, tanpa kerja keras, 'jhek engkok padeh terro endi'ah mobil', pas kayak itu, kan repot saya, engkok maleih tak olle pa apah, ekabejhi'ih se bedeh .[49]

Makna Tanah atau *tana sangkol* dengan segala pergeserannya, tidak bisa dipungkiri juga mempengaruhi secara langsung terhadap keputusan masyarakat Sumenep apakah akan menjual tanah atau tidak. Tidak jarang mereka tidak bersedia menjual tanah karena makna *tana sangkol* yang masih kuat. K Mursyid menuturkan

> Ya mahal, tapi kalo yang disini karena sudah ebelei akhirnya tidak jadi. Bede ediyeh sampe esoro ngalak mobil (avanza), soro ngone'eh mobil pemilik tananah, deri 20jt sampe etawareh ke mobil. Ini sudah dikasih informasi. Pas kebetulan orangnya eman polonah tanah sangkol.

[49] Matroni, *Wawancara*, Sumenep, 21 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Eparengeh reng sepponah kassak. Ghebei semacam kenang-kenangan, ghebei jhimat. Bagi mereka nekah, arabet tana sangkol nekah bagian dari keestoan, kesenangan ke reng seppoh.

Kesadaran tentang kedudukan *tana sangkol* dan maknanya bagi orang Sumenep juga menunjukkan kesadaran pentingnya merawat anak cucu. Di desa Lapataman misalnya, menurut penuturan Kepala Desa dan beberapa tokoh agama mengatakan bahwa sudah banyak tawaran yang datang dari investor, tapi desa Lapataman masih tergolong aman dari investor. K Asnan misalnya menuturkan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat Lapataman tetap mempertahankan *tana sangkol* karena kesadaran mereka bahwa *tana sangkol* penting untuk kehidupan mereka dan anak cucunya di masa mendatang. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa diantara tanah dan manusia yang akan berkembang adalah manusia bukan tanah ungkapan populer "*tana ade' tokonah*" seolah menegaskan bahwa orang Sumenep sadar akan tanah sebagai komoditas yang terbatas. Maka penjualan tanah pada investor hanya akan mempersempit ruang kehidupan anak cucu mereka. Sementara manusia akan terus bertambah padat.[50] Di samping itu, desa Lapataman sudah dikaruniai Sumber Daya Alam yang mencukupi masyarakat, mulai dari perkebunan kelapa yang luas, Bonasi Cemara dan tambak udang swadaya warga setempat.[51]

[50] K Asnan, *Wawancara*, Sumenep, 15 Januari 2017
[51] Abu Raera, *Wawancara*, Sumenep, 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KETERLIBATAN PEMUDA DALAM GERAKAN JARINGAN NU UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH

A. Respon NU

Kekhawatiran NU terutama orang-orang NU struktural tentang persoalan agraria di Sumenep pada khsusnya dan Madura pada umumnya telah lama memaksa orang-orang NU membahasnya dalam perbincangan-perbincangan informal. Menurut penuturan K Dardiri Zubairi orang-orang NU terutama yang berada dalam kepengurusan NU cabang Sumenep sudah lama memprediksi bahwa akan ada pembelian tanah secara besar-besaran –terutama tanah-tanah dekat pesisir pantai utara Madura- setelah beroperasinya jembatan Suramadu. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa kekhawatiran itu terjadi lebih cepat dari yang telah diprediksi.[1]

Praktek jual-beli tanah secara besar-besaran sudah mulai terasa sejak tahun 2014. Orang-orang NU meresponnya –meskipun dinilai agak lambat- dengan membawa persoalan tersebut pada rapat-rapat resmi pengurus. Pada gilirannya, disepakati untuk mengadakan seminar tentang darurat agraria. Bersamaan dengan seminar tersebut, juga di dilaksanakan *launching* Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep. Acara yang dilaksanakan pada 1 November 2015 tersebut mengusung, *"Ajaga Tana, Ajaga Na' Potoh"* (Menjaga Tanah, Menjaga Anak Cucu). Selain warga NU,

[1] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara tersebut juga menghadirkan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (BPN). Dalam acara tersebut, banyak pihak yang ikut serta, selain anggota MWC NU se-Sumenep, diantara yang diundang adalah masyarakat dari daerah dimana banyak terjadi praktek jual-beli tanah, anggota Ansor, anggota PMII, Mahasiswa dan tokoh masyarakat non-struktural NU. Pada bulan Juli tahun 2016 juga dilaksanakan *"Khalaqah Kedaulatan Tanah; Upaya Melindungi dan Merawat Tanah Warisan Para Leluhur"* yang diikuti oleh masyarakat NU, Mahasiswa, LSM dan tokoh masyarakat.[2]

Selain itu, NU juga berusaha merepon praktek jual-beli tanah secara massif dengan melakukan kajian *Bahtsul Masail* melalui jaringan MWC NU di setiap Kecamatan. Kajian *Bahsul Masail* juga pernah dilakukan di tingkat kabupaten yang hasilnya "Haram mengalih fungsikan lahan produktif". Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, tokoh tokoh NU tidak segan menegaskan, melarang warga *nahdliyyin* untuk menjual tanahnya pada investor seperti yang pernah dilakukan oleh A. Waris, selaku salah satu pengurus NU Sumenep.[3]

Jauh sebelum upaya formal tersebut, aktor-aktor NU sudah sering melakukan upaya penyadaran dan kesepahaman dengan masyarakat agar tidak menjual tanah secara sembarangan. Salah satunya lewat *Kompolan Tera' Bulan*. Nama *Tera'Bulan* sendiri berasal dari waktu pelaksaan *kompolan* tersebut yang jatuh pada setiap tanggal 13, 14 atau 15 kalender Jawa. Komunitas ini sebenarnya

[2] KH. Pandji Taufik, *Wawancara*, Sumenep 20 Januari 2017
[3] A. Waris, *Wawancara*, Sumenep 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah komunitas pengajian yang berisi *hadrah, sholawatan* serta diikuti dengan diskusi, dialog atau ceramah dengan tema yang berbeda-beda.[4]

B. Kemunculan Komunitas-Komunitas

1. Komunitas Eman Nak Potoh (KEN)

Fenomena "pemborongan" tanah oleh investor ini selain mendapatkan perhatian dari elemen NU struktural, juga memantik respon dari masyarakat Sumenep secara luas. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu kecamatan yang banyak mengalami praktek jual-beli tanah adalah Kecamatan Batang-Batang, sebuah kecamatan dengan wilayah pantai yang cukup luas. Salah satu desa yang berdekatan dengan laut adalah desa Dapenda. Menurut Bayjuri, Dapenda menjadi salah satu daerah yang diincar Investor untuk kepetingan tambak udang. Karena banyak warga yang resah dengan rencana tersebut, akhirnya warga yang tidak setuju dengan rencana pembangunan tambak udang bersama dengan tokoh-tokoh muda Dapenda dan sekitarnya merespon dengan membentuk sebuah Komunitas.

Komunitas tersebut di kemudian hari dikenal dengan KEN (Komunitas *Eman Nak Potoh*). Salah satu pendiri komunitas KEN Masmuni Mahatma menjelaskan bahwa dia mendapat banyak informasi dari saudara, teman dan junior organisasinya di Sumenep, khususnya Dapenda bahwa banyak tanah yang akan dibeli Investor untuk kepentingan tambak udang. Selama periode Januari 2016 dia berkomunikasi secara *inten* dengan saudara, teman dan juniornya. Masmuni Mahatma yang merupakan Ketua GP Ansor Bangka Belitung dan

[4] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan pengurus PMII mendengar kabar tentang problem tanah di tempat asalnya membuatnya tergugah. Diakuinya hal tersebut membangkitkan semangat kedaerahannya. Karena itu meskipun dia sekarang adalah Dosen di sebuah perguruan tinggi di Bangka Belitung, dia dengan suka rela turun kembali ke desa Dapenda untuk memberikan respon dan perlawanan atas pembelian tanah demi kepentingan tambak udang tersebut.[5]

Langkah awal perlawanan dilakukan melalui pernyataan-pernyataan penolakan dan kritik atas pembelian tanah dalam koran lokal seperti Radar Madura. Setelah itu, Masmuni bersama dengan Bayjuri akhirnya memutuskan membentuk Komunitas *Eman Nak Potoh* (KEN) untuk menjadi wadah bersama bagi tokoh, masyarakat luas, guru ngaji, aktifis pemuda dan mahasiswa di Desa Dapenda dan sekitarnya.[6] Upaya-upaya yang dilakukan KEN mempunyai dua model. Pertama sosialisasi dan penyadaran pada masyarakat secara umum dan pada pemilik tanah yang akan dibeli oleh investor. Sedangkan yang kedua adalah langkah pendekatan "struktural" melalui dialog dan advokasi dengan DPRD dan Bupati. Bahkan dia sudah bertemu dengan Bupati secara pribadi sebanyak tiga kali.

Komposisi KEN terdiri dari berbagai kelas dan umur dengan ketua di pegang oleh Masmuni Mahatma dan Bayjuri sebagai Sekretaris. Anggota KEN terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aktifis pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum yang mempunyai kesamaan sikap atas pembelian tanah dan rencana pembangunan tambak udang. Bayjuri menuturkan bahwa kebanyakan

[5] Masmuni Mahatma, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017
[6] Masmuni Mahatma, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang merapat dan bergabung dengan KEN memiliki ikatan-ikatan yang terjalin sebelumnya, dalam hal ini sebagai Alumni pondok pesantren An-nuqoyah Guluk-Guluk. Dengan demikian kebanyakan mereka memiliki identitas santri alumni pondok pesantren An-nuqoyah Guluk-Guluk.[7]

Sebelum mengadakan audiensi, KEN terlebih dahulu melakukan konsolidasi di tingkat bawah dengan para tokoh agama, guru ngaji, pemilik tanah, santri alumni pondok pesantren, aktifis muda, mahasiswa se desa Dapenda dan sekitarnya (Leggung Barat, Leggung Timur, Lombang) yang memiliki sikap serupa. Konsolidasi di tingkat bawah ini di selenggarakan dalam bentuk silaturrahmi dan "*rembheg sa taretanan*" (Musyawarah sesama saudara) untuk sadar akan kepentingan ruang hidup, lingkungan dan peka dengan masa depan *na' potoh* (anak cucu). Konsolidasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 maret 2016 di Musholla Karang Langgar (Listariyadi). Dalam acara tersebut, banyak orang yang memberikan pemahaman tentang bahaya tambak dan arti tanah bagi ruang hidup anak cucu masyarakat setempat. Pemaparan-pemaparan yang bersifat teologis seperti dalam al Qur'an, ekologis seperti kerusakan akibat limbah dan sosiologis seperti perubahan sosial-budaya dan degradasi moral disampaikan oleh anggota KEN.

Konsolidasi dan silaturrahmi ini menghasilkan -meminjam istilah Bayjuri- "pernyataan sikap" bersama. Isi dari pernyataan sikap hasil konsolidasi "*rembheg sa taretanan"* secara sederhana terdiri atas lima himbauan;[8]

1) penyebaran surat himbauan ini demi kemaslahatan *"nak potoh"* (generasi anak cucu), serta lingkungan di wilayah Desa Dapenda dan

[7] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017
[8] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sekitarnya, baik untuk zaman sekarang atau zaman yang akan datang; 2) berharap dengan tulus agar semua masyarakat *ghi' ngeghi'* (berpikir secara mendalam dan teliti) secara jujur atas rencana penjualan lahan yang sudah menyebar untuk dibuat Tambak Udang oleh investor (pembeli). Di samping merugikan warga sekitar, juga pasti memusnahkan pohon cemara udang yang telah turun-temurun jadi pekerjaan sebagian warga Desa Dapenda; 3) mengabarkan pada seluruh warga Dapenda khususnya yang ada di pesisir bahwa dampak tambak udang sangat merusak lingkungan laut maupun darat serta mengganggu kelangsungan hidup *nak potoh* yang ada di desa Dapenda dan sekitarnya; 4) limbah Tambak Udang jika dibuang ke laut sangat merugikan warga terutama warga yang biasa *nyorok* (mencari udang kecil di pinggir pantai), *nyare ninir/nyiser* (mencari bibit udang di pinggir pantai) dan *ngarokat* (mencari ikan kecil di pinggir pantai) dan aktifitas laut yang lain. Jika dibuang ke darat akan merusak kualitas lingkungan baik kejernihan udara atau kualitas air minum dan air mandi warga, terutama yang berdekatan dengan tambak udang; 5) atas segala pertimbangan, Kami dari Komunitas *Eman Nak Potoh* (KEN) menghimbau kepada seluruh masyarakat desa Dapenda, terutama yang berada di pesisir untuk bersama-sama "MENOLAK PEMBANGUNAN TAMBAK UDANG TANPA TERKECUALI DEMI KESELAMATAN NAK POTOH DAN KESEHATAN LINGKUNGAN BUMU DAPENDA SEUTUHNYA.

Audiensi dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016, KEN yang disertai 16 tokoh masyarakat diterima DPRD Sumenep khususnya Komisi III pada jam 10.00-12.00, kemudian bertemu Bupati Sumenep di kantor pemerintah daerah lantai 2 pada jam 14.00. Diantara hal yang disampaikan dalam Audiensi tersebut adalah sikap penolakan KEN bersama masyarakat Dapenda dan sekitarnya atas rencana pembangunan tambak udang, kemudian desakan kepada DPRD Sumenep untuk membuat PERDA perlindungan tanah. Audiensi yang dilakukan KEN sedikit menuai hasil. DPRD khususnya komisi III turun untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan tambak, dan mereka menolak pembangunan terebut. Aksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEN dan peninjauan oleh DPRD Sumenep banyak diliput oleh media lokal baik elektronik dan cetak. [9]

2. Pemuda Peduli Sumenep (PPS)

Kemunculan Pemuda Peduli Sumenep (PPS) erat kaintannya dengan organisasi KEN serta jaringan orang-orang KEN. Kronologi lahirnya PPS murujuk pada keterangan Sayuti bermula dari acara *Istighosah* dan Silaturrahmi yang dilaksanakn oleh Ikatan Almuni An-Nuqoyah daerah Legung (Desa yang berbatasan dengan Dapenda) dan sekitarnya. Sehari sebelum acara tersebut, Sayuti terlebih dahulu mengikuti seminar Daulat Tanah yang bertempat di kantor PCNU Sumenep beberapa hari setelah dia pulang dari Universitas di Ciputat Jakarta. Dalam acara *istighosah* tersebut juga dibahas secara spesifik tentang problem tanah yang tengah melanda Sumenep. Bahkan, KH. Ali Fikri sebagai pengasuh pondok pesantren An-nuqoyah secara khusus menghimbau pada masyarakat agar tidak gampang menjual tanahnya. [10]

Acara *istighosah* dan Silaturrahmi yang dilaksanakan pada "Hari Raya Ketupat" tahun 2016 tersebut dihadiri oleh masyarakat umum, para alumni dan mahasiswa Legung dan sekitarnya yang belajar di perguruan tinggi di berbagai kota besar Jawa. Setelah acara formal selesai, seorang tokoh muda Sumenep sekaligus ketua KEN yaitu Masmuni Mahatma tiba-tiba mencari *Labun* (kain kafan). Selanjutnya ia meminta para alumni dan masyarakat yang hadir untuk memberikan tanda tangan diatas *labun* tersebut. Mengetahui kejadian tersebut

[9] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017
[10] Sayuti, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayuti bertanya untuk apa *labun* yang berisi penuh tandatangan tersebut, Masmuni menjawab yang ditirukan oleh Sayuti "*oh ini akan dibawa diantar ke bupati*". Sayuti kemudian menawarkan diri untuk membawa –meminjam bahasa Sayuti- Petisi tersebut bersama teman-teman mahasiswa lainnya yang kuliah di berbagai kota besar.[11]

Setelah disetujui oleh Masmuni, Sayuti mencoba melakukan komunikasi dengan teman-temannya yang kuliah di berbagai kota besar untuk mendiskusikan rencana "Aksi Damai Mengantarkan Petisi", pada saat itu terkumpul enam orang, dua dari Jogjakarta, dua dari Jakarta, satu dari Surabaya dan satu dari Palu. Data yang diterima dari Bayjuri dikaji selama satu malam penuh oleh mereka. Pada awalnya ada yang meragukan rencana aksi karena jumlah massa tidak sampai sepuluh. Namun setelah melakukan komunikasi dengan jaringan pertemanan baik pertemanan pondok, pertemanan organisasi kedaerahan di kota-kota tempat mereka kuliah atau pertemanan sesama aktifis organisasi kehasiswaan, akhirnya terkumpul sekitar 25 hingga 30 orang pada hari aksi dilaksanakan.[12]

Komposisi para peserta Aksi Damai tersebut terdiri dari berbagai latar belakang organisasi kemahasiswaan, diantaranya HMI Jogjakarta, PMII Ciputat, IPNU. Mereka kebanyakan sudah mempunyai ikatan pertemanan sebelumnya dengan yang lain. Aksi Damai tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016. Selain membawa "Petisi" yang penuh dengan tandatangan, PPS melakukan orasi di depan kantor Bupati secara bergantian dalam menyampaikan aspirasi. Sebelum melakukan aksi, sempat terjadi problem perijinan sebagaimana

[11] Sayuti, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017
[12] Abdillah, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan Sayuti. Polisi setempat mempersoalkan rentang waktu antara permintaan ijin dan waktu pelaksaan aksi, menurut penuturan Sayuti, Polisi menegaskan bahwa ijin harus tiga hari sebelum aksi. Tapi problem tersebut selesai setelah dilakukan lobi dengan kepolisian.[13]

Diantara yang dituntut oleh PPS adalah penolakan terhadap investasi asing yang dinilai merugikan masyarakat Sumenep, memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah, menuntut pemerintah mempersiapkan lapangan pekerjaan dan tuntutan terhadap transparansi Perda Investasi. Abdillah, salah satu orator bercerita bagaimana dia berorasi dan menyampaikan aspirasinya sebagai berikut "Usir investor asing dari sumenep, jangan biarkan investor asing menjajah bumi sumenep". [14]

3. Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh (BATAN)

Luasnya respon penolakan dari berbagai kalangan terhadap fenomena pembelian tanah di Sumenep yang diduga kuat dilakukan oleh investor salah satunya dapat dilihat dari kelahiran Kelompok *Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* (Barisan Menjaga Tanah Menjaga Anak Cucu) yang lebih dikenal dengan BATAN. Kelompok ini terbentuk tidak lama setelah acara *Tera' Bulan* diadakan di daerah Gapura. Acara *Tera' Bulan* yang berisi *hadrah, sholawatan* kemudian diteruskan dengan disukusi, dialog atau ceramah pada saat itu mengangkat tema darurat agraria.

[13] Sayuti, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017
[14] Abdillah, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara *Tera' Bulan* tersebut tepatnya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 yang dihadiri oleh *jema'ah* dari masyarakat setempat, empat Kepala Desa, dan tokoh-tokoh NU diantaranya ketua PCNU Sumenep, pemilik tanah yang diketahui menjari incaran Investor juga diundang, termasuk juga warga desa Tamedung Batang-Batang, terutama para pemuda dan tokoh masyarakat yang menolak kehadiran investor. Kepala Desa Tamedung juga salah satu orang diantara empat kepala desa yang hadir. Acara *Tera' Bulan* pada saat itu menghadirkan penceramah K Muhammad Sholahuddin (An nuqoyah Guluk-Guluk) yang dikenal dengan panggilan Kiai Mamak.

Sebelum acara dimulai, para tokoh tersebut berkumpul di rumah K Dardiri yang juga merupakan pelopor *kompolan Tera' Bulan*. Mereka mendiskusikan konsep dan kampanye mempertahankan tanah seperti apa yang tepat untuk diusung. Lalu seorang dosen muda Al-Karimiyah Sidqi Ahyani mengusulkan *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh*. Sejak muncul di acara *kompolan Tera' Bulan* tersebut, *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* selalu muncul saat berbicara persoalan tanah. Sejak saat itu *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* menjadi *booming*.[15]

Media Sosial atau Medsos seperti Facebook dan grup-grup komunikasi semacam Whatsapp juga ikut membantu dalam menyebarkan ide *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* lewat unggahan-unggahan seputar acara *Tera' Bulan* dan perbincangan-perbincangan lain yang membahas pesoalan jual-beli tanah di Sumenep.

Ide tentang *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* akhirnya membawa kesimpulan bahwa pihak-pihak yang memiliki *concern* terhadap persoalan agraria di Sumenep

[15] K Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep 15 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan wadah untuk berhimpun. Wadah tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, membangun jaringan dan strategi yang lebih terstruktur. Maka muncul Komunitas atau kelompok *Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* (BATAN).

Masih merujuk pada K Dardiri, BATAN di didirikan untuk menjadi wadah berhimpunnya pihak-pihak yang memiliki kesamaan sikap atas fenomena jual-beli tanah. Komposisi BATAN terdiri atas beragam kalangan dan latar belakang, baik secara perorangan atau secara kelembagaan. Diantara pihak-pihak yang bergabung dengan BATAN adalah, Ansor secara perorangan, LPBH NU, LPPNU, FNKSDA, Laskar Hijau, *Tera' Bulan*, PMII Sumenep, Yayasan Berkah Bumi (Anak Yatim), KEN dan perorangan baik sebagai dari pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi yang memiliki pemikiran sama dengan BATAN.

> Batan sangat fleksibel, bisa kelembagaan, bisa perorangan, lembaga pun tidak semua anggota lembaga masuk, biasanya lembaga mengutus orang yang ditugasi untuk concern persoalan agraria, Ansor, LPBH NU, LPPNU, ada Front, Laskar Hijau punya Gus Aa' yang punya Simpul Sumenep, tapi sekarang tidak aktif lag), Terak Bulan, yayasan Berkah Bumi (anak yatim), di tambah perorangan.[16]

Keanggotaan dan bentuk organisasi BATAN yang fleksibel tercermin dari tidak adanya struktur keorganisasian dan kepengurusan yang kaku layaknya organisasi-organisasi pada umumnya. Selain itu, BATAN juga memiliki grup komunikasi seperti *Whatsapp* untuk menunjang sirkulasi dan tukar-menukar informasi seputar tanah antar anggotanya. Hal itu karena sifat keanggotaan BATAN yang berasal dari berbagai profesi, organisasi dan latar belakang berbeda.

[16] K Dardiri, *Wawancara*, Sumenep 21 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping juga karena jarak yang jauh, sebab BATAN adalah “wadah” yang mencakup wilayah Sumenep secara keseluruhan. Ini yang membedakan BATAN dengan KEN yang awalnya hanya beroperasi untuk wilayah Dapenda dan sekitarnya. KEN sendiri akhirnya berjejaring dengan BATAN untuk kepentingan menyuarakan problem jual-beli tanah di seluruh wilayah Sumenep.

Langkah BATAN dalam merespon penjualan tanah secara massif bermacam-macam. Banyak model yang dipakai. Pendekatan terhadap masyarakat secara kultural dan pendekatan secara struktural terhadap pihak pemerimtah daerah dan pemerintah desa semuanya ditempuh. Berbagai model tersebut dipakai menurut K Dardiri dengan pertimbangan BATAN tidak bisa hanya mengandalkan “etiket baik pemerintah”, maka untuk memperkuat gerakan, diperlukan langkah-langkah lewat pendekatan kultural yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput.

Salah satu langkah struktural adalah melalui audiensi dan dialog dengan pihak pemerintah. Sepanjang dua tahun sejak kemunculannya, BATAN telah melakukan dua kali Audiensi dan dialog dengan Bupati Sumenep, KH Busyro yang dikenal dengan sebutan “Buya” terutama di kalangan aktifis muda organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan d Sumenep. Pertama terjadi pada kisaran rentang waktu pertengahan hingga akhir tahun 2016 yang menghasilkan empat kesepatan tidak tertulis. Pada waktu itu audiensi dihadiri Bupati yang melibatkan SKPD, SEKDA, Bagian Hukum, BPPT, BLH dan hadir pula SATPOL PP. sebagaimana yang dikatakan K Dardiri;

> Yang hadir sekitar 15 an orang, saya mas haderi, bayjuri, ca kancah BATAN, waktu itu sudah bernama BATAN pon, Cuma melibatkan banyak pihak BATAN nekah kan tempat meleburnya banyak orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> lembaga. Waktu itu PMII juga ikut. Ada empat kesepakatan waktu itu, satu mau mengkaji kemungkinan ada regulasi tentang perlindungan tanah teppak genikah, muncul pon. Kedua, yang tidak memperoleh izin ditutup, ada plang. Selanjutnya ada sosialisasi bareng antara Pemkap dan PCNU kepada warga tentang pentingnya tanah itu tidak dilakukan. Yang keempat saya lupa.[17]

Pada perkembangannya, diantara kesepakatan-kesepakatan tersebut, yang terlaksana hanya dua. Pertama penutupan tambak atau industri yang tidak atau belum memenuhi aspek perijinan. Namun demikian penutupan tersebut hanya sebatas formalitas, pihak pemerintah memasang papan yang bertuliskan "Dilarang Beroperasi, Karena Belum Berizin" di depan area Tambak, namun kenyataannya di dalam masih beroperasi seperti yang dituturkan K Dardiri "Tape kalau tidak salah yang dilakukan Cuma dua, nutup se tak berijin, aberrik plang lah, mun caknah kauleh, benni notop, mareh aberrik plang ternyata di dalam tetap beroperasi, plang ditutup di depan tidak boleh beroperasi tapi di dalamnya beroperasi".

Kedua adalah tentang kemungkinan adanya mekanisme hukum untuk melindungi tanah agar tidak mudah terjual pada investor yang akan merugikan masyarakat di kemudian hari. Dalam hal ini Perbup menjadi solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah. Wacana Perbup perlindungan tanah tersebut muncul lagi di pertemuan para Kiai, toko masyarakat dan Bupati di Saronggi yang difasilitasi MASSA PONTREN (Masyarakat Alumni Pondok Pesantren). Dalam perkembangannya, Perbup perlindungan tanah di Sumenep tidak dapat diberlakukan karena ditolak oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, dikarenakan isinya melampaui kewenangan pemerintah daerah Kabupaten

[17] K Dardiri, *Wawancara*, Sumenep 21 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep. K Dardiri menegaskan bahwa ide Perbup bukan berasal dari pihak BATAN, karena waktu audiensi dan dialog berlangsung yang dituntut adalah kemungkinan mekanisme hukum yang dapat melindungi tanah agar tidak merugikan rakyat. Sebagaimana yang dikatakan K Dardiri

> "Bagi saya sekarang kalau melihat kontennya, melarang dimaknai ngatur sampe detail, menurut saya kan bukan begitu cara melarangnya, ya pantas lah ditolak karena kontennya. Bagi saya itu Cuma main-main. Karena menutup tapi di dalam aktifitas tetap, yang kedua ini (Perbup) yang kontennya (mengatur hingga detail) ya wajarlah kalau ditolak".[18]

Sedangkan audiensi yang kedua dilaksanakan pada April 2017. Berbeda dengan Audiensi yang pertama, audiensi atau dialog yang kedua ini terlebih dahulu dimulai dengan aksi demo atau unjuk rasa. Pada kesempatan kali ini, pihak-pihak yang tergabung dalam BATAN mencoba mendesak pihak pemerintah untuk tetap mengkaji kemungkinan mekanisme hukum yang dapat melindungi tanah sehingga tidak merugikan masyarakat Sumenep. Pada saat audiensi kedua, peserta yang hadir dalam audiensi relatif banyak karena selain dari unsur pihak-pihak yang tergabung dalam BATAN seperti PMII, aktor-aktor Ansor, aktor-aktor NU, aktor-aktor KEN, juga dihadiri oleh pemilik tanah dan masyarakat terdampak dari sebagian daerah seperti Andulang, Dapenda dan Lapataman.[19]

Setelah menilai bahwa Perda perlindungan tanah yang ditolak oleh pemerintah Porvinsi Jawa Timur bukan langkah yang benar-benar serius untuk melindungi tanah dan masyarakat Sumenep, maka tuntutan terhadap pemerintah adalah melalui pengaturan Zona atau area. K Dardiri menyatakan sebagai berikut;

> Nah waktu itu kita menawarkan tetap ada regulasi. Regulasi itu dalam bentuk mengatur Zonasi. Jadi kawasan, kawasan itu tidak boleh

[18] K Dardiri, *Wawancara*, Sumenep 21 April 2017
[19] Alif, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dialihfungsikan, tidak boleh mengganggu kepentingan ekologis di daerah itu, atau kepentingan sosio-kultural masyarakat setempat. Jadi kalo misalnya lokasi pertanian ya tetapkan lokasi pertanian dan itu tidak boleh dialihfungsikan, kawasan hijau ya tetapkan kawasan hijau. Jadi ngaturnya cerdas, tidak langsung dilarang, tapi diatur.[20]

Di samping itu, mereka juga menawarkan sistem sewa. Tujuannya agar masyarakat dan investor sama-sama memperoleh keuntungan serta masyarakat tidak kehilangan hak atas tanahnya. Sistem sewa juga lebih memudahkan warga untuk melakukan kontrol atas pembangunan manakala dirasa telah bergeser dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Tuntutan yang lain berkaitan dengan pariwisata. Mereka menuntut agar pengembangan pariwisata tidak mengganggu sumber daya alam atau persoalan agraria warga, dengan kata lain pengembangan pariwisata lebih banyak melibatkan dan diserahkan pada warga setempat, bukan dengan menarik investasi secara besar-besaran. Atau dalam bahasa mereka pariwisata berbasis rakyat.

Namun audiensi dan dialog tersebut akhirnya menemui jalan buntu atau *dealdock*. Pad saat itu perdebatan antara BATAN dan pihak pemerintah memakan waktu hingga pukul 5 sore, sehingga Bupati memutuskan untuk melakukan pertemuan dan dialog ulang. Karena keperluan Bupati melaksanakan umroh, pihak pemerintah mengusulkan dialog akan diwakili oleh wakil Bupati dan akan bertempat di kantor BPPT. Pihak BATAN menolak rencana tersebut dan memutuskan menunggu Bupati datang dari umroh. Pertimbangan PMII dan BATAN adalah keterbatasan wakil Bupati dalam pengambilan kebijakan, di

[20] K Dardiri, *Wawancara*, Sumenep 21 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping lokasi yang dinilai tidak netral karena kecurigaan atas kesalahan-kesalahan BPPT dalam penerbitan ijin tambak.[21]

Langkah pendekatan kultural yang dilakukan oleh BATAN banyak melibatkan media *kompolan* dan infrastruktur keagamaan lain, seperti pengajian, relasi guru-murid atau kiai-santri. Salah satu *kompolan* yang sering menjadi media sosialisasi terhadap warga atau pemilik tanah adalah *kompolan Tera' Bulan* sebagaimana telah dijelaskan di atas. BATAN seringkali "menitipkan" pesan pentingya mempertahankan tanah kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki *kompolan*. Selain *kompolan*, ada juga tokoh agama muda yang memanfaatkan waktu setelah sholat Jum'at dalam menyampaikan pesan pentingnya mempertahankan tanah untuk *nak potoh*. Biasanya tokoh tersebut melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan jaringannya di tempat tujuan, baik pertemanan, pengurus MWC NU atau orang yang mempunyai hubungan guru-murid dengan tokoh agama.[22]

4. PMII Sumenep

Sebelum membahas PMII secara organisasi dan menempatkannya dalam dinamika jaringan gerakan BATAN, terlebih dahulu harus dipaparkan dinamika anggota-anggota PMII secara perorangan, dengan kata lain anggota-anggota PMII yang terlibat dalam jaringan gerakan mempertahankan tanah di berbagai daerah di Sumenep sebelum keterlibatan PMII secara organisasi.

[21] Alif, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017
[22] Quraisyi, *Wawancara*, Sumenep 17 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan anggota PMII yang terlibat aktif dalam jaringan gerakan penolakan, awalnya bergerak untuk mencari data, informasi tentang praktek jual-beli tanah di berbagai daerah. Dengan demikian, mereka berhadap-hadapan langsung dengan pemilik tanah, makelar tanah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa, baik yang bersikap pro terhadap "investor" atau yang bersikap kontra. Mereka juga sering berhadapan dengan pihak-pihak pemerintah daerah Sumenep. Biasanya mereka tergabung dalam kelompok lain selain PMII, seperti misalnya himpunan mahasiswa kecamatan tertentu, anggota LPM (lembaga pers mahasiswa) sebuah perguruan tinggi, anggota oganisasi kepemudaan, kemahasiswaan lain seperti IPNU tingakat kecamatan. Selain jaringan keorganisasian, mereka juga seringkali mempunyai relasi dengan orang-orang yang berada dalam jaringan gerakan penolakan di tingkat bawah dan masyarakat akar rumput. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa hubungan senior-junior organisasi, hubungan senior-junior dalam satu pondok pesantren, relasi aktifis satu desa atau kecamatan yang sudah ada sebelumnya.[23]

Selain melakukan investigasi, pengumpulan data baik pada tingkat masyarakat akar rumput atau dari pihak pemerintah daerah, mereka juga membangun informasi lewat Media Sosial tentang dinamika jual-beli tanah dan industrialisasi di Sumenep, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar aktor-aktor dan pihak-pihak yang memiliki kesamaan sikap atas praktek jual-beli tanah secara massif di Sumenep.

Keterlibatan para anggota PMII secara personal dalam jaringan gerakan penolakan di tingkat masyarakat akar rumput pada akhirnya memberikan efek

[23] Rosyidi, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

determinan atas sikap PMII secara kelembagaan. Informasi yang berhasil dikumpulkan oleh para anggota PMII yang terlibat secara personal tersebut akhirnya menjadi perbincangan di tingkat kepengurusan PMII Cabang Sumenep, sehingga mulai terbentuk kecenderungan awal untuk mengambil sikap secara tegas. Peran para anggota PMII sebagai penyuplai informasi membuat PMII semakin memiliki dasar rasional untuk terlibat secara kelembagaan. PMII bergerak bersama-sama dengan BATAN karena merasa memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk menyelamatkan tanah-tanah Sumenep demi kepentingan masyarakat Sumenep. Karena memiliki kepentingan yang sama maka PMII juga bergabung dalam jaringan BATAN. Di samping juga, banyak orang-orang yang memiliki hubungan senior-junior dengan PMII yang telah bergabung dalam jaringan BATAN. [24]

Pada awalnya PMII terlibat secara kelembagaan sejak audiensi pertama dengan jaringan BATAN. Seiring berjalannya waktu dan dinamika problem agraria di Sumenep, keterlibatan PMII semakin tinggi. Langkah yang dilakukan PMII juga kongkret. Demi kepentingan gerakan penolakan atas "Investor", PMII secara khusus merancang sekolah kilat atau pelatihan. Kaderisasi –meminjam istilah PMII- berupa "Training Kader Penggerak" dilaksanakan selama lima hari penuh di daerah Lenteng Sumenep. Pemateri yang di datangkan berasal dari senior PMII yang juga bergabung dalam gerakan penolakan, termasuk diantaranya adalah K Dardiri. Materi yang disampaikan terutama berkaitan dengan kontestasi ideologi dunia, kapitalisme, politik global dan bahaya kekuatan Modal. Training

[24] Alif, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kader Penggerak diikuti oleh empat Komisariat PMII se-Sumenep dimana masing-masing mengirimkan lima perwakilannya.[25]

Peran PMII dalam jaringan BATAN semakin sentral terutama pada saat Audiensi Kedua yang terjadi pada bulan April 2017. Aksi demo dan teatrikal bersama dengan warga dari berbagai daerah terdampak yang terjadi sehari sebelum audiensi adalah hasil konsolidasi –meminjam istilah PMII- PMII dengan tokoh masyarakat di bawah, sehingga mereka berhasil memobilisasi massa. Sebelum melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan para tokoh masyarakat yang berpengaruh, terlebih dahulu dilakukan pemetaan wilayah untuk mengetahui daerah-daerah yang memiliki kesamaan sikap berdasarkan data yang dimiliki oleh PMII dan informasi dari jaringan BATAN. Pada saat aksi, warga yang ikut serta "turun ke jalan" berjumlah sekitar 300-400 orang. Diantara mereka ada yang berangkat menggunakan motor, ada juga yang menggunakan mobil hasil sumbangan masyarakat.

Urgensi PMII dalam jaringan BATAN sendiri, selain menjadi penyuplai data dan informasi melalui anggotanya juga meliputi pelaksanaan strategi atau pendekatan struktural pada pihak pemerintah daerah Sumenep. Secara organisasi, PMII yang membangun komunikasi dengan pihak pemerintah. PMII yang "mewadahi" kepentingan jaringan BATAN apabila menyangkut urusan prosedur dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan secara formal.

Sebelum aksi dan audiensi yang kedua, PMII selalu datang pada rapat-rapat yang diadakan dengan jaringan BATAN. Pada saai itu, pertemuan diadakan hampir setiap minggu antara pihak-pihak yang tergabung dalam BATAN. Lokasi

[25] Rosyidi, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari rumah warga terdampak, desa salh satu aktor BATAN, kantor PMII dan seterusnya. Pada waktu itu disusun rencana dan strategi yang akan dipakai. Artinya keterlibatan PMII sangat inten dan memiliki posisi urgen dalam jaringan BATAN.

Misalnya dalam hal audiensi, PMII yang membangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah Sumenep. Hal-hal seputar prosedur perijinan, administrasi, surat-menyurat semuanya diwakili dan menggunakan PMII secara kelembagaan. Karena BATAN sifatnya bukan organisasi yang sudah terstruktur, maka BATAN tidak memiliki akte notaris pendirian, tidak memiliki stempel, tidak memiliki susunan kepengurusan yang kaku dan definitif, maka mereka membutuhkan wadah untuk mengurusi persoalan administrasi. Pentingnya peran PMII secara kelembagaan dalam gerakan bersama BATAN diakui juga oleh K Dardiri selaku salah satu tokoh sentral BATAN "PMII secara organisasi karena yang komunikasi dan dipakai untuk berhubungan secara resmi dengan pemerintah ya PMII. Karena ada stempelnya kan. Kalo Batan kan tidak ada stempel, akta notaris dan semacamnya. Karena kadang kan ribet, jadi persoalan ini pakai PMII".[26]

PMII baik secara perorangan atau organisasi juga berperan besar dalam membangun opini publik lewat Media Sosial dan Media Massa lokal baik online maupun cetak. Setiap kali ada temuan baru seputar tanah, mereka selalu mengunggahnya di media sosial, seperti misalnya warga yang tidak bersedia menjual tanahnya meskipun dengan tawaran tinggi, atau modus-modus yang digunakan oleh makelar "pribumi" untuk mendapatkan tanah yang di incar.

[26] K Dardiri, *Wawancara*, Sumenep 21 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian PMII berperan juga dalam membangun informasi publik antar aktor-aktor dalam jaringan BATAN.

5. Sastra Melawan

Munculnya komunitas "Sastra Melawan" adalah bukti lain beragamnya model dan media yang digunakan oleh BATAN untuk mencapai targetnya. Sebelum beralih pada kronologi terbentuknya Sastra Melawan, penting diketahui bahwa di daerah Sumenep banyak orang-orang yang menyukai sastra, mereka biasanya sudah memiliki ikatan atau perkenalan dengan K Dardiri (salah satu Pelopor BATAN) yang juga merupakan sastrawan Sumenep.

Para sastrawan tersebut memutuskan untuk ikut serta memberikan kontribusi dalam gerakan penolakan setelah banyak mendengar kabar gerakan penolakan yang dilakukan pihak-pihak yang tergabunga dalam BATAN melalui perbincangan-perbincangan publik dan pembicaraan sehari-hari dan informasi-informasi dalam media sosial maupun media massa. Dengan relasi yang sudah lama terbangun bersama K Dardiri dan orang-orang NU yang *concern* dalam sastra maka mudah untuk mewujudkan sebuah komunitas sastra.

Semangat yang membangkitkan keinginan menyumbangkan kontribusi pada gerakan penolakan tersebut di dasarkan atas keinginan sastrawan untuk ikut mengambil bagian dalam upaya melakukan perlawanan. Selain itu, mereka juga mendasarkan diri pada pemikiran bahwa sastra dan puisi yang selama ini dibangun bukan sastra yang dekat denga masyarakat. Karena itu, untuk membuat sastra Madura lebih kongkrit perlu dilakukan perubahan orientasi pada persoalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseharian yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu bisa dimulai dengan mengangkat ide tentang problem agraria di Sumenep.[27]

Langkah awal pembentukan komunitas Sastra Melawan dilakukan dengan diadakannya *workshop* sastra yang dilaksanakan pada Januari 2016. Peserta *workshop* adalah para siswa Sekolah Menegah Atas, terutama santri yang ada di Ponpes Nasy'atul Mutaallimin dimana K Dardiri merupakan salah satu petingginya. Peserta *workshop* tidak hanya dari santri Nasyatul Mutaallimin, tapi juga dari siswa sekolah lain seperti dari Gapura.

Komunitas Sastra Melawan beranggotakan sekitar 20 orang yang terdiri dari siswa, orang dewasa berumur di bawah 30, dan diatas 30. Anggota yang bukan siswa, berasal dari berbagai profesi seperti guru, anggota Lemsbumi Sumenep. Dari semua itu, mayoritas memiliki hubungan dengan K Dardiri, baik hubungan sebagai teman atau terlibat dalam hubungan guru-murid atau santri-kiai, seperti salah satu pelopor terbentuknya komunitas Sastra Melawan yang merupakan santri Nasyatul Mutaallimin selama beberapa tahun dan diangkat menjadi tenaga pengajar di salah satu instansi pendidikam formal Nasyatul Mutaallimin. [28]

Diantara langkah yang dilakukan Sastra Melawan adalah karya puisi-puisi tentang darurat agraria yang dikumpulkan dalam satu buku[29] berbentuk ontologi. Rencananya, puisi-puisi tersebut akan dibacakan dalam acara-acara sosial-keagamaan masyarakat secara bergiliran, mereka berencana melakukan *roadshow*.

[27] Umam, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2017
[28] Matroni, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2017
[29] Sampai penelitian ini dilakukan, buku masih dalam tahap percetakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dibacakan di tengah masyarakat, puisi tersebut direncanakan akan dibacakan juga di depan gedung DPRD dan Kantor Bupati Sumenep.

C. Bentuk Keterlibatan Pemuda

Partisipasi pemuda dalam berbagai aksi penolakan dan perlawanan atas jual-beli tanah dan pembangunan tambak udang di Sumenep salah satunya terwujud dalam bentuk advokasi, audiensi dan dialog dengan pihak pemerintah. Contoh nyata adalah organisasi kemahasiswaan PMII Sumenep yang juga tergabung dalam jaringan BATAN. PMII adalah "senjata" jaringan BATAN untuk menyuarakan pembentukan peraturan hukum yang dapat melindungi tanah-tanah di Sumenep. Salah satu tujuan besar BATAN sendiri adalah pengawalan atas kebijakan pemerintah yang dapat menjamin masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya tanpa harus kehilangan hak milik. Dalam area pengawalan kebijakan publik inilah PMII sekali lagi memberikan kontribusinya sebagai lembaga yang secara resmi mewakili kepentingan BATAN untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah Sumenep, baik Eksekutif dalam hal ini Bupati atau Legislatif/DPRD. Seperti persoalan surat-menyurat misalnya, saat BATAN mengalami kesulitan, maka PMII yang mengatasi persoalan tersebut seperti yang disampaikan salah satu anggota PMII "…PMII secara organisasi karena yang komunikasi dan dipakai untuk berhubungan secara resmi dengan pemerintah ya PMII. Karena ada stempelnya kan. Kalo Batan kan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stempel, akta notaris dan semacamnya. Karena kadang kan ribet, jadi persoalan ini pakai PMII".[30]

BATAN yang komposisinya terdiri dari aktor-aktor NU, Ansor, aktifis pemuda Sumenep, Mahasiswa Sumenep yang secara kultural adalah orang NU dan mayoritas orang pesantren tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan ke dalam konflik agraria. Karena akan beresiko membawa institusi NU berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah daerah Sumenep yang dipimpin KH Busyro. Secara kultural seorang kiai di Sumenep mayoritas adalah orang-orang NU, begitupula dengan KH Busyro. Dalam konteks politik daerah, basis utama dukungan KH Busyro sebagai pemimpin daerah adalah masyarakat NU. Dengan demikian, melibatkan NU secara struktural dalam konflik agraria beresiko membuat kegaduhan dan perpecahan di masyarakat semakin meruncing. Karena itu posisi BATAN sebagai komunitas dan PMII sebagai kelembagaan akan membantu mengatasi potensi konflik tersebut.

Keterlibatan Pemuda dalam upaya penolakan atas jual-beli tanah oleh investor juga mencakup advokasi dan pendampingan masyarakat saat berhadapan dengan pemerintah desa atau investor. Contoh kasusnya adalah aktifis KEN yang mendampingi masyarakat beserta tokoh agama yang tidak setuju dengan rencana pembangunan tambak udang di Dapenda. Mereka mewakili masyarakat yang tidak mampu berbicara dalam forum-forum formal, apalagi forum yang melibatkan pemerintah desa. Karena pengaruh kepala desa di madura sangat besar, sehingga kehadirannya saja bisa memberikan tekanan pada masyarakat. Hartono adalah salah datu pemuda yang terlibat dalam pendampingan masyarakat

[30] Rosyidi, Wawancara 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika acara sosialisasi antara investor, masyarakat dan pemerintah desa. Bersama dengan Bayjuri (Sekretaris KEN) dan beberapa aktifis KEN lainnya mereka berhadap-hadapan dengan investor dan pemerintah desa di acara yang dihadiri MUSPIKA tersebut. Hartono bercerita sebagai berikut;

> Bentroknya kadhi nekah, ketika di undang dalam sebuah forum, forum itu di fasilitasi investor dan orangnya kepala desa yang mengundang saya, kemudian ada kepala desa yang datang, ada banyak tokoh masyarakat, orang-orang kepala desa disitu semua hadir, perangkat desa, pemilik tanah, baik yang setuju atau tidak setuju, termasuk MUSPIKA yang datang. Jadi prolognya disampaikan pak camat, kemudian diserahkan pada investor, dua orang investor bersama dengan asisten yang insinyur pertambakan. Jadi di sampaikan bahwa mereka memang berminat, jatuh hati pada lokasi Dapendah, dan mereka menjanjikan bahwa limbah itu tidak merusak lingkungan, kemudian tanbak itu ramah lingkungan, lebih dari itu juga akan (ada) penerangan listrik di sepanjang jalan menuju tambak, ada juga dibilang akan membantu masyarakat, sumbangan apa-apa itu, iming-iming mereka seperti itu.[31]

Sosialisasi semacam itu dilakukan sebanyak dua kali, jika yang pertama dilaksanakan di desa Dapenda, maka yang kedua ini berlokasi di Kecamatan Batang-Batang. Acara di hadiri aktifis KEN, investor, pemilik tanah serta tokoh masyarakat baik yang pro terhadap investor atau yang kontra. Bayjuri mengatakan bahwa acara sosialisasi yang kedua berlangsung panas dan saling “gertak” pun terjadi antara aktifis KEN dan tokoh masyarakat yang pro invsetor;

> …apa yang di sampaikan sampena-sampean ini saya tolak semua, arumentasi sampean bahwa tambak ini begini-begini saya tolak”…Jadi kita tetap bersikukuh tidak bisa, sampe disitu panas dan saling gertak, muso salah satu tokoh yang pro investor, pak haji itu, tokoh agama., tokoh kharismatik sebenarnya disini, sampe saya di tuding-tuding. Forum memanas akhirnya bubar juga tanpa menghasilkan apapun. Alhamdulillah sampai sekarang investornya itu tidak mau kabarnya, karena kondisi di bawah tidak kondusif, ada warga yang menentang, kan investor nekah tak mau ribet-ribet. Ghy mun sakeranah anu, ella lajuh dhinah nyareah laen…[32]

Bentuk partisipasi pemuda dalam jaringan gerakan perlawanan secara keseluruhan juga sangat menonjol dalam bentuk aksi atau demonstrasi. Kontribusi

[31] Hartono, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2017
[32] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda dalam aksi dan demonstrasi bisa dilihat pada kasus Pemuda Peduli Sumenep yang berhasil mengumpulkan mahasiswa asal Sumenep dari berbagai perguruan tinggi di kota-kota besar Jawa untuk “turun ke jalan” dan melakukan aksi di depan kantor pemerintah daerah Sumenep. Meskipun aksi mereka hanya sekali, namun ini menambah rentetan protes atas fenomena jual-beli tanah dan pembangunan tambak. Demonstrasi dan aksi turun ke jalan tersebut menjadi penting karena dalam rangka mengantarkan ‘petisi” yang telah di tandatangani oleh masyarakat. Petisi tersebut adalah hasil kerja KEN pada acara silaturrahmi Ikatan Alumni AN-Nuqoyah Legung dan sekitarnya. Jadi, mereka adalah simbol perlawanan masyarakat atas problem agraria di Sumenep.

Peran pemuda berkaitan dengan demonstrasi dan aksi “turum ke jalan” semakin menguat dengan bergabungnya PMII dalam jaringan gerakan BATAN. Terutama yang terjadi pada bulan April 2017, dimana PMII yang bekerja bersama-sama dengan orang-orang jaringan BATAN berhasil memobilisasi massa dari berbagai daerah terdampak. Keberhasilan tersebut menunjukkan bagaimana pemuda (PMII) mampu menyuplai panggung dan kesempatan untuk kebutuhan aksi kolektif masyarakat karena merasa resah dan khawatir dengan fenomena jual-beli tanah dan pembangunan tambak udang. Selain itu, PMII berhasil melakukan komunikasi dengan tokoh yang berpengaruh di tingkat bawah, sehingga mudah melakukan mobilisasi.

Selain kontribusi dalam bentuk aksi dan demonstrasi, bentuk keterlibatan pemuda yang lain yaitu dalam hal pengumpulan data, informasi dan investigasi seperti yang di sampaikan oleh salah satu anggota Ansor yang bergabung dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan BATAN "kalau teman-teman se ghik ngude kayak PMII dan mahasiswa lainnya itu kemaren yang melakukan investigasi ke bawah, berapa tanah yang sudah terlepas, siapa pembelinya dan bagaimana modusnya". K Dardiri juga mengatakan dalam konteks gerkaran jaringan BATAN;

> Anak-anak muda itu kan sebenarnya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengaruh, mereka lebih mudah memperoleh akses informasi, jadi anak muda dalam kontekas gerakan kita itu tugasnya lebih kepada ngolah informasi, bangun informasi publik, memasok data pada tokoh yang berpengaruh di bawah, disamping juga membangun jejaring dengan warga dilokasi yang terdampak, kalau kebetulan warga punya pikiran sama dengan kita2 saja. Kalau konsolidasi warga, pengorganisasian warga, ini butuh tokoh lain yang berpengaruh. Kemaren tahu ya, rokat desa, itu sampe ada yang naik truk, berarti bekerja tokoh2 yang di bawah untuk mobilisasi warga datang ke rokat desa. Jadi tokoh lokal itu kuat sebenarnya.[33]

Salah satu kasus dimana pemuda sangat berperan dalam pengumpulan data, investigasi dan informasi di tingkat masyarakat akar rumput adalah realisasi *"rokat desa"* di desa Batuputih Daya Kecamatan Batuputih. Sebenarnya banyak dimensi kenapa terjadi konflik agraria di Batuputih Daya dan sekitarnya. Para anggota BATAN yang diantaranya juga merupakan anggota PAC Ansor Batuputih dan juga dari kalangan mahasiswa Batuputih menemukan fakta bahwa salah satu tanah yang menjadi akses menuju wisata batu Kapur di desa Badur tengah menjadi incaran "investor". Investigasi dan pengumpulan informasi oleh aktor-aktor Ansor dan mahasiswa di Batuputih menemukan kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat sekitar atas rencana pembelian tanah di sekitar Wisata batu kapur.

Pada tahap selanjutnya, para tokoh masyarakat setempat dihubungkan pada jaringan BATAN oleh aktor-aktor PAC Ansor Batuputih. Setelah beberapa

[33] K Dardiri, Wawancara 21 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat maka disepakati konsep acara *"rokat desa"*. Pada acara tersebut sekitar seribu warga dari desa Batuputih Daya dan sekitarnya hadir untuk meramaikan acara yang juga dihadiri tokoh-tokoh agama setempat, Ketua PC Ansor Sumenep dan orang-orang BATAN. Kesuksesan acara juga ditentukan oleh isu yang diusung yaitu "Tolak Wisata Yang Menyengsarakan Rakyat: Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh". Agenda acara yang dilaksanakan pada 13 Januari 2017 tersebut adalah *Istighosah*, *sholawat* dan *hadrah* bersama, ceramah dan orasi agraria, pembacaan Puisi Melawan –yang akhirnya menjadi Sastra Melawan- dan aksi menanam pohon.

Pada kasus KEN misalnya, anggota KEN yang relatif berumur di bawah 30 tahun menjadi aktor yang mengumpulkan informasi tentang tanah yang akan dibeli investor, siapa pemilik tanah tersebut sekaligus siapa pembelinya. Mereka mendapatkan informasi lewat percakapan sehari-hari dengan masyarakat lain, tokoh masyarakat yang kontra atas tambak udang, atau dari teman-teman yang memiliki pandangan serupa dengan KEN. Informasi dan data tersebut lalu disampaikan pada anggota KEN yang lain.

Dari informasi tersebut, KEN menyusun rencana untuk menggagalkan pembelian. Jika si pemilik tanah adalah orang yang dekat dengan anggota KEN, maka anggota KEN tersebut yang akan memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang dampak penjualan tanah tersebut, baik untuk lingkungan alam dan sosial atau untuk anak cucu mereka di masa depan. Namun, apabila si pemilik tanah adalah orang yang tidak memiliki ikatan dengan anggota KEN, maka KEN berusahan mencari orang yang sepaham yang memiliki huubungan dengan sei

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik tanah untuk memberikan pemahaman. Langkah ini memang tidak selalu sukses, karena tidak sedikit juga masyarakat yang menjual tanahnya, terutama dengan alasan kebutuhan finansial.

Bentuk lain keterlibatan pemuda dalam jaringan gerakan BATANadalah pembangunan opini melalui media sosial, seperti Facebook dan Web. Salah satu bentuk kontribusi pemuda dalam membangun opini adalah Daulat Tanah yang merupakan kelompok mahasiswa dan pemuda sumenep yang ada di perantauan. Daulat tanah terbentuk setelah acara seminar agraria yang dilaksanakan di kantor NU pada kisaran bulan Juli 2016. Daulat Tanah membangun opini publik lewat unggahan-unggahan di WEB seputar dinamika problem agraria di Sumenep. Selain itu, pemuda-pemuda yang bergabung dalam BATAN juga seringkali membuat unggahan di media sosial secara perorangan setiap ada perkembangan mengenai persoalan agraria.

D. Motif Keterlibatan Pemuda

Gerakan jaringan orang-orang NU yang menentang “pemborongan” tanah oleh investor seperti telah dipaparkan sebelumnya banyak mellibatkan pemuda, baik dari kalangan Mahasiswa atau aktifis lokal, baik perorangan atau kelembagaan dan kelompok komunitas. Keterlibatan orang-orang muda yang secara kultural mengidentifikasi diri mereka dengan NU (PMII, NU, Ansor Alumnus Pondok Pesantren) memiliki faktor-faktor pendorong yang membentang sepanjang keikutsertaan atau keterlibatan mereka dalam dinamika gerakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat komposisi pemuda yang terlibat Gerakan jaringan NU dalam melawan "penguasaan" tanah Sumenep, terdapat pola relasi yang telah eksis sebelumnya. Relasi antar aktor-aktor pemuda dan individu lain dalam gerakan melawan "pemborongan" tanah ini menunjukkan adanya faktor *networking* yang memfasilitasi orang-orang muda tersebut untuk terlibat dalam gerakan jaringan NU. *Networking* terlihat di hampir seluruh keterlibatan pemuda baik dalam Komunitas Eman Nak Potoh (KEN), Sastra Melawan, Pemuda Peduli Sumenep (PPS), PMII Sumenep dan Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh (BATAN) sebagai komunitas yang mewadahi seluruh jaringan gerakan perlawanan di Sumenep.

Pada KEN misalnya, kebanyakan orang-orang KEN adalah Alumnus Pondok Pesantren An-nuqoyah guluk-guluk. Sehingga ada satu ikatan yang telah eksis sebelumnya, yaitu sebagai alumni an-nuqoyah, ada hubungan senior-junior atau pertemanan antara pemuda dengan individu lain dalam keanggotaan KEN. *Networking* Alumni an-Nuqoyah yang berasal dari daerah Legung dan sekitarnya termasuk Dapenda ini berfungsi membentuk kecenderungan awal para alumni tersebut untuk ikut terlibat. Jaringan dengan An-nuqoyah secara kelembagaan juga ikut membantu dalam membentuk identitas diri anggota KEN.

Namun faktor *networking* saja tidak cukup, karena tidak sedikit keluarga dari para aktifis KEN yang secara mengejutkan bersikap pro terhadap investor. Para anggota KEN selain banyak yang memiliki riwayat pondok pesantren yang sama, mereka juga memiliki riwayat "aktifis" lokal di daerahnya masing-masing. Identitas ke-aktifis-an terbentuk dari pengalaman subyektif sebelumnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

interaksi sosial individu dengan aktifis lain. Mengutip Donatella dan Mario Diani *"Identity emerges from the processes of self-identification and external recognition"* yang secara sederhana menunjukkan identitas adalah proses identifikasi diri dan pengakuan eksternal.[34]

Identifikasi sebagai orang Dapenda khususnya dan Madura pada umumnya juga menjadi faktor pendorong pemuda-pemuda Dapenda dan sekitarnya bergabung dengan komunitas KEN. Mereka menganggap orang-orang Dapenda dan sekitarnya hanya tidak tahu potensi kerusakan sosial dan lingkungan dari penguasaan tanah oleh "orang luar". Seperti pernyataan Hartono, salah seorang aktifis KEN;

> saya sebenarnya tidak dapat apa-apa memprotes pembangunan tambak ini, malah yang ada cacian dan ancaman dari para broker, tapi saya tidak rela melihat Dapenda, tanah kelahiran saya ini dikuasai orang luar. Mau kerja apa nanti masyarakat itu, jangan-jangan nanti kita sama kayak orang betawi di jakarta itu, ada di pinggiran kota, rumahnya kumuh. Sementara orang-orang pendatangnya tinggal di rumah gedongan.[35]

Identitas sebagai orang Dapenda melahirkan rasa kecintaan atas tanah kelahirannya, serta solidaritas terhadap nasib warga lain yang juga beresiko terusir dari tanahnya sendiri. Karena itu, meskipun tanah yang dibeli bukan tanahnya sendiri atau tanah kerabatnya, mereka tetap melakukan penolakan. Seperti yang disampaikan Bayjuri yang sering mendengar komentar komentar bernada negatif terhadap para aktifis KEN "malah kauleh dikecam sareng pihak yang mau menjual dan para makelarnya, "anuh ajhueleh tanah tak ebeghy so bayjuri, reken tana nah mamaknah, tak norok andik tana pas tak ebeghy". Dengan demikian,

---

[34] Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movement; An Introduction*, (Oxford; Blackwell Publishing, 2006), 105.
[35] Harrtono, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat identitas kolektif ke-daerah-an, ke-aktifis-an dan ke-pondok pesantren-an yang mengikat antar anggota KEN. Disini *networking* bekerja sebagai medium sosialisasi seseorang yang pada gilirannya akan membantu pembentukan dan penguatan identitasnya (identifikasi).

Pada tahap selanjutnya *networking* bekerja sebagai media yang mendekatkan para calon partisipan dengan gerakan jaringan NU atau *structural-connection*. Kasus pada komunitas Pemuda Peduli Sumenep (PPS) dan Sastra Melawan menunjukkan bahwa jaringan atau ikatan terhadap orang-orang yang bergabung terlebih dahulu dalam KEN atau BATAN berfungsi mendorong kemunculan kedua komunitas tersebut. Lahirnya komunitas PPS dan Sastra Melawan erat kaitannya dengan hubungan yang terbangun sebelumnya antara aktor-aktor PPS atau Sastra Melawan dengan KEN atau BATAN baik secara kelembagaan atau perorangan.

Namun sebelum memutuskan terlibat dalam gerakan jaringan NU, sudah ada keinginan dan pemikiran yang sama tentang penguasaan tanah oleh “orang luar”. Seperti yang disampaikan Sayuti, salah seorang anggota PPS mengatakan bahwa mereka sebelum pulang ke Sumenep untuk berlibur, sudah banyak mengetahui praktek-praktek jual-beli tanah melalui media online, media sosial dan informasi dari pertemanan dengan aktifis Sumenep lain. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari orang-orang Sumenep yang tengah terancam dikuasai oleh orang luar. Perasaan cinta atas tanah kelahiran melahirkan rasa kekhawatiran dan solidaritas sebagai sesama orang Sumenep. Sayuti bercerita kenapa pemuda-pemuda di PPS memutuskan terlibat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> …setelah tanah-tanah itu dijual, anak-anak potonah mau dapat kerja dan tempat tinggal dimana? Apakah mau menjadi tamu di negeri sendiri, apakah menjadi tamu di rumah sendiri, misalnya legung dikuasai masyarakat luar, atau misal masyarakat bangkalan menguasai legung, lah oreng legung dhibik deddi tamui, ini kemudian yang kita bela bagaimana orang disitu tetap menjadi tuan rumah. Saya sampaikan bagaimana kecintaan teman-teman disini (mahasiswa sumenep diluar daerah) terhadap sumenep itu tinggi… ketika tanah di sumenep banyak dikuasai asing, masyarakat bukan lebih maju, tapi malah tertindas, tertindas dalam artian ketika ada pekerjaan, itu hanya menjadi pekerja, bukan menjadi tuan tanah. Itu kenapa kami melakukan perlawanan. Kecintaan kami atas tanah kelahirn sangat kuat…".[36]

Melihat komposisi PPS yang terdiri dari para mahasiswa aktifis dalam berbagai organisasi-organisasi kehamasiswaan di berbagai kota besar yang berasal dari Sumenep, disana terdapat identitas kolektif ke-aktifis-an yang terjalin melalui *networking* pertemanan satu daerah, pertemanan satu pondok yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk terlibat. Berada dalam kategori "mahasiswa-aktifis" asal Sumenep membuat mereka merasa perlu memberikan kontribusi dalam upaya melawan "penguasaan" tanah di tanah kelahiran mereka. Dengan demikian, identitas kolektif ke-aktifis-an dan ke-daerah-an mempengaruhi pertimbangan mereka untuk terlibat sebagaimana pernyataan salah satu anggota PPS "…Saya dan teman2 melihat di masyarakat sendiri ada perlawanan, maka teman2 aktifis dan mahasiswa harus mengawali, kita mencontoh sejarah pendiri bangsa, saya bilang ke teman2, pemuda harus ada di garda paling depan, ini kemudian yang jadi semngat saya berjuang di sumenep…".[37] Identitas kolektif ke-daerah-an melahirkan rasa solidaritas mereka terhadap masyarakat yang tengah terancam akan terpinggirkan.

[36] Sayuti, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017
[37] Abdillah, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identitas ke-daerah-an dan ke-aktifis-an juga tampak menjadi faktor yang dominan dalam mendorong anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sumenep (PMII) hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyatakan sikap penolakan secara kelembagaan dan membawa PMII bergabung dalam barisan jaringan gerakan NU bersama BATAN. Setelah terlibat dalam banyak peristiwa pemborongan tanah warga, anggota PMII tersebut merasa memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumenep. Mereka berpandangan bahwa penguasaan tanah oleh asing hanya akan merugikan masyarakat Sumenep, sebaliknya keuntungan besar akan tetap dipegang oleh pemilik modal atau investor.

Jaringan atau hubungan dengan orang-orang yang berada dalam BATAN semakin mendekatkan PMII dengan gerakan penolakan. Banyak orang-orang BATAN yang merupakan senior PMII di Sumenep, biasanya para senior tersebut adalah aktro-aktor PC Ansor Sumenep dan anggota LSM di Sumenep. Pada tahap ini, *Networking* dengan orang-orang BATAN (termasuk juga KEN) melalui hubungan senior-junior organisasi, atau pertemanan dari pondok pesantren yang sama bekerja sebagai salah satu *structural-connection* yang menghubungkan aktor-aktor PMII dengan kesempatan untuk melakukan gerakan perlawanan bersama-sama.

Menjadi anggota PMII sendiri sudah berarti masuk dalam sebuah jaringan sosial ke-aktifis-an. *Networking* ke-aktifis-an ini akan menjadi ruang interaksi dengan aktor aktifis lain yang pada giliranya akan membentuk identitas seseorang. Dalam relasi ke-aktifis-an tersebut seseorang akan mengidentifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya sebagai bagian dari kategori "para aktifis" yang diakui oleh yang lain. Mengutip Passy Identitas dibentuk dan mewujud melalui relasi sosial yang berinteraksi terus-menerus, sehingga identitas mengalami penguatan, hal ini memberikan individu kesadaran (politis) yang akan membawanya lebih dekat secara ideologis pada isu yang sedang berlangsung.[38]

Begitupula dengan komunitas Sastra Melawan, ada ikatan yang telah eksis jauh sebelum kemunculan komunitas yang merupakan bagian dari BATAN tersebut. Sebagian memiliki hubungan guru-murid dengan K Dardiri, dan sebagian memiliki hubungan pertemanan. Rekrutmen juga dilakukan pada orang-orang yang dikenal sebelumnya. Namun sekali lagi *networking* saja tidak cukup, seperti pengakuan salah satu anggota komunitas Sastra Melawan Matroni, bahwa sebelum terbentuknya Sastra Melawan, dia pernah dilibatkan dalam kejadian tawar-menawar antara "makelar" dengan salah satu kerabatnya. Matroni merasakan bagaimana "makelar" dapat melakukan apapun termasuk ancaman untuk mendapatkan tanah yang di inginkan.[39] Pengalaman subyektif tersebut akhirnya menimbulkan rasa solidaritas pada sesama orang Sumenep. Sebagai Sesama orang Sumenep ia merasa harus membantu warga yang dianggapnya tidak tahu tentang dampak penguasaan tanah oleh investor dengan cara bergabung dalam jaringan BATAN. Pemikiran "sebagai sesama orang Sumenep" berarti dia mengidentifikasi dirinya dengan orang Sumenep sebagai sebuah kelompok

[38] Florence Passy, "Individual Network", dalam *Social Movement and Network; Relational Approaches to Collective Action*, ed. Mario Diani dan Doug McAdam, (New York; Oxford University Press, 2003), 24.
[39] Matroni, *Wawancara*, Sumenep 24 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, disini identitas kolektif ke-daerah-an menjadi faktor lain disamping hubungan yang telah ada sebelumnya dengan orang-orang BATAN dan NU.[40]

Keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU melawan penguasaan tanah di Sumenep dengan demikian banyak melibatkan faktor *networking* sebagaimana bisa dilihat dari proses rekrutmen dan komposisi keanggotaan setiap kelompok-kelompok jaringan NU, baik KEN, BATAN, PMII, PPS dan Sastra Melawan. Hubungan tersebut, dapat berupa hubungan pertemanan, kerabat, guru-murid atau senior-junior. Pada tahap ini sebagaimana disebutkan sebelumnya *networking* berfungsi sebagai ruang sosialisasi. Jejaring sosial pada tahap ini berfungsi membentuk identitas kolektif individu pemuda sebagai identitas ke-aktifis-an dan identitas ke-daerah-an.

Pada tahap selanjutnya, *networking* menyediakan kesempatan-kesempatan bagi pemuda untuk melakukan aksi bersama-bersama dengan aktor lain dan masyarakat yang tergabung dalam jaringan gerakan NU. Akhirnya *networking* membantu individu pemuda memutuskan berpartisipasi dalam aksi. Preferensi-preferensi atau pilihan-pilihan yang tersedia bagi individu melalui interaksi sosial dalam sebuah jaringan sosial akan membantu seseorang untuk akhirnya benar-benar memutuskan terlibat.

Sedangkan identitas kolektif dalam konteks gerakan jaringan NU di Sumenep terbentuk dan semakin menguat seiring dinamika yang terjadi di lapangan. Identitas kolektif menguat dengan kemunculan dan eksistensi kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas penentang “penguasaan” tanah oleh investor. Kelompok dan komunitas yang tergabung dalam BATAN berfungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembatas struktural atau *Boundary* dengan kelompok yang ditentang, dalam hal ini investor "asing" beserta orang-orang yang bekerja sama dengan investor.

Investor yang di persepsikan secara kuat sebagai orang luar Sumenep menjadi pembatas yang membedakan dengan para aktifis yang merupakan orang Sumenep, pada tahap ini identitas ke-daerah-an menguat. Keberadaan komunitas tersebut juga membatasi antara orang Madura yang bekerjasama dengan investor dan yang menolak investor, pada tataran ini, identitas ke-aktifis-an meningkat. Namun dalam konteks BATAN, batas tersebut tidak diberlakukan pada pemimpin pemerintah daerah Sumenep, yaitu Bupati. Karena bagi mereka, yang patut dicurigai adalah orang-orang di bawah Bupati hingga pemerintah desa. Sebab jika pembatas juga ditujukan pada Bupati yang merupakan Kiai, potensi perpecahan dalam tubuh NU akan semakin besar. Dengan menekankan perbedaan-perbedaan antara dua kelompok diatas, maka akan semakin jelas definisi "kita" dan "mereka", siapa *in-group* dan siapa *out-group*. Jadi keberadaan komunitas beserta atribusi dan makna-makna yang dikembangkan akan menciptakan *"collective self"* dan *"collevtive other"*.

Identitas kolektif juga menguat seiring tumbuhnya kesadaran kelompok (*group conciousness*). Pengalaman-pengalaman subyektif setiap anggota yang terlibat sepanjang aktifitas perlawanan terhadap penguasaan tanah, konfrontasi dengan investor atau orang-orang lokal yang bekerjasama dengan investor akan membentuk kesadaran kelompok atau *political conciousness* (kesadaran politik). Kabar-kabar media massa, cerita atau laporan anggota lain tentang aktifitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlawanan membangkitkan kesadaran kelompok atau kesadaran politik para pemuda yang tergabung dalam gerakan jaringan NU Sumenep, seperti laporan Surat Kabar Radar Madura tentang ancaman terhadap aktifis KEN.[41] Kesadaran kolektif juga terbentuk melalui interaksi dengan pihak "antagonis" dari kelompok yang berlawanan dan juga keterlibatan langsung para pemuda dalam aksi-aksi kolektif bersama. Acara *"rokat desa"*, aksi demonstrasi, audiensi dengan pihak pemerintah, pendampingan masyarakat dalam sosialisasi dengan pemerintah desa membantu menguatkan kesadaran kelompok.

Terakhir identitas kolektif akan ikut dibentuk melalui *negotiation*. Identitas kolektif pada dasarnya bukan hanya atribut individual, lebih dari itu, ia adalah representasi kultural, serangkaian makna-makna bersama yang melewati fase produksi-reproduksi, negosiasi-renegosiasi dalam interkasi individu yang telah menyatu dalam konteks sosio-kultural tertentu. Identitas kolektif merupakan definisi bersama yang bersifat interaktif, dihasilkan oleh indiviud-individu yang saling berinteraksi. Sampai disini, *networking* bekerja untuk menyediakan ruang interaksi. Identitas kolektif dengan demikian adalah proses para aktor melahirkan kerangka kognitif umum yang pada gilirannya membuat mereka dapat mengevaluasi lingkungan mereka dan melakukan kalkulasi atas aksi mereka.

Dalam kasus gerakan jaringan NU di Sumenep, para aktor melakukan negosiasi arti agama yang tidak hanya dibatasi pada ritus-ritus ibadah. Mereka mengembangkan pemikiran bahwa agama harus hadir dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi landasan aktor-aktor yang berasal dari NU untuk bergerak menolak "penguasaan" tanah oleh orang

[41]Luq, "Penolak Tambak Udang Dapat Ancaman", *Radar Madura*, (16 Maret 2016), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing. Untuk membentuk sebuah identitas kolektif, mereka membutuhkan *common enemy* yang berfungsi dipersalahkan atas keadaan yang sedang ditentang. Biasanya dalam banyak literatur pihak yang dipersalahkan adalah rezim yang berkuasa sebagai pemegang kebijakan. Aktor-aktor gerakan jaringan NU pada tataran ini, tidak memposisikan Bupati sebagai pemimpin eksekutif Kabupaten Sumenep dalam posisi yang dipersalahkan. Sebaliknya, mereka melakukan negosiasi mengenai *common enemy* yang pantas dipersalahkan. Pada akhirnya mereka menemukan investor sebagai pihak yang pantas dipersalahkan.

Aktor-aktor gerakan jaringan NU, ingin menghindari permusuhan secara langsung dengan pimpinan eksekutif, karena bagaimanapun juga, Bupati adalah bagian dari mereka (NU, orang pesantren dan sekaligus Kiai). Pada level pemerintahan, mereka menganggap orang-orang level kedua yang berada di sekitar Bupati yang lebih pantut dicurigai. Merujuk pada pengakuan salah satu anggota BATAN, setiap kali pertemuan atau rapat berlangsung, selalu ditekankan bahwa, gerakan tidak boleh menyerang Bupati secara personal, kritik ditujukan pada kebijakan. Bagi mereka, kebijakan adalah produk orang banyak yang ada di sekitar Bupati. Berdasarkan pengakuan beberapa anggota BATAN, mereka bergerak melakukan aksi penolakan untuk mengingatkan Bupati tentang kondisi di masyarakat akar rumput, bukan mempersalahkan.

Dengan meletakkan investor sebagai *common enemy* mereka berhasil menciptakan identitas kolektif “aktifis NU yang peduli Sumenep” tanpa harus berbenturan dengan simbol ke-NU-an seperti Kiai. Sedangkan masyarakat yang mendukung terhadap pembelian tanah, mereka menganggapnya sebagai akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kepolosan masyarakat atas maksud serta akibat “penguasaan” tanah oleh investor. Bagi mereka, masyarakat yang menjual tanah tidak sepenuhnya dalam keadaan “sadar”. Praktek pembelian tanah yang banyak diwarnai dengan “iming-iming”, tipu daya dengan simbol-simbol kultural hingga intimidasi bagi aktor-aktor BATAN adalah tindakan pembodohan.

Para aktor juga melakukan negosiasi arti tanah bagi kehidupan masyarakat, *tana sangkol* yang dulu hanya diartikan warisan, berubah artinya menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat Sumenep, agar tidak terjajah secara ekonomi dan sosial di tanah kelahiran mereka sendiri. *Tana sangkol* yang dulu memiliki arti *sekep* atau *jimat* dalam arti yang mistis, maka aktor-aktor BATAN memberikan sentuhan material. Tanah menjadi senjata bagi masyarakat Madura untuk melindungi diri dari usaha peminggirin masyarakat asli Sumenep dari tanahnya sendiri, dan menjadikan tanah sebagai senjata yang dapat memberikan kesejahteraan dengan memanfaatkan apa yang ada di dalam perut bumi atau menyewakannya, bukan melepas kepemilikannya.

Identitas kolektif ke-daerah-an sebagai orang Sumenep atau sebagai orang desa tertentu di Sumenep yang terbentuk melalui interaksi kehidupan sehari-hari dan identittas ke-aktifis-an atau ke-pondok pesantren-an yang terbentuk melalui *networking* secara kelembagaan atau perorangan (dengan aktor-aktor organisasi lain, lembaga pondok tertentu dan NU) terkadang hanya relevan dalam menjelaskan keterlibatan pemuda hingga level tertentu. Tidak sedikit para aktor baik dari KEN, BATAN secara keseluruhan, aktor dari Ansor dan PMII yang mendapat ancaman dari kelompok-kelompok lawan. Upaya-upaya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberhentikan aktor-aktor yang tergabung dalam BATAN untuk terus terlibat dalam gerakan penolakan investor bervariasi.

Upaya-upaya tersebut bisa berubah-rubah, mulai dari penawaran bersifat material hingga ancaman dan intimidasi terhadap para aktor. Biasanya, para aktor-aktor akan ditawari sejumlah "kompensasi" untuk berhenti melakukan gerakan perlawanan. Kompensasi tersebut bisa berupa uang *cash* atau barupa tawaran untuk masuk dalam jaringan kelompok orang-orang investor. Mereka yang ditawari masuk dalam barisan kelompok orang-orang investor akan diminta untuk menjadi "makelar" tanah, dengan begitu dia akan mendapat keuntungan dari penjualan tanah warga. Salah satu anggota PMII bercerita;

> kemaren waktu aksi penolakan rame-ramenya diberitakan di media, saya pernah ditawari oleh salah satu oknum orang-orang investor, waktu itu saya nongkrong dan dapat telepon dari nomor baru, saya diminta untuk tidak melakukan gerakan apapun terkait jual-beli tanah ini, intinya diminta mengkondisikan PMII supaya tidak ikut-ikut seperti yang dilakukan K Dardiri.[42]

Senada dengan yang disampaikan oleh salah satu aktifis KEN yang banyak mendapatkan tawaran hingga ancaman agar berhenti melakukan gerakan perlawanan, ia mengatakan sebagai berikut;

> …Kauleh diam tidak untung tidak rugi, tetapi tetap ada korban. Makanya saya bergerak dengan teman2, tidak boleh ada yang nerima tawaran. Tawaran bukan tidak datang, banyak…Ngocak brokerah "buh la beknah, bede riyah ka beknah (bagiannya)". Pade epameloh kauleh. "ongghuen lek, ebherrinah pagghun". Karena kauleh memang tidak menunjukkan sikap permusuhan. Benyak se ngocak bejhik ke kauleh, se esambhelieh…[43]

Apabila upaya "halus"-meminjam istilah aktor gerakan- tidak berhasil, biasanya upaya selanjutnya bersifat agresif dalam bentuk ancaman dan intimidasi

[42] Alif, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017
[43] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap para aktor. Salah satu anggota PMII yang juga mempunyai jaringan dengan anggota KEN (karena berasal dari pondok An-Nuqoyah) menceritakan bagaimana dia melakukan investigasi dan mencari informasi pembelian tanah di tingkat masyarakat bawah harus ditemani oleh salah satu anggota KEN dengan membawa *cade'* atau senjata untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan dari pihak yang berseberangan.

Ancaman-ancaman tersebut sampai pada aktor gerakan lewat cerita orang-orang, ancaman secara langsung atau melalui pesan elektronik. Banyak kiriman pesan elektronik berupa SMS dari nomor tidak dikenal dengan nada "sindiran" hingga "ancaman" menyasar para aktor gerakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh aktor Ansor yang bergabung dengan BATAN;

> kemarin itu tahu kamu, setelah acara "Rokat Desa", itu kan yang nampak juga teman-teman Ansor, saya juga salah satunya, banyak SMS nyasar masuk ke saya, nomornya saya tidak kenal. Ya isinya macam-macam, di sindir lah, ancaman lah…bahkan saya pernah dibilangi langsung sama orang-orangnya kepala desa, "mak alakoh engak jiyah kakeh lek, ella lah", tapi saya satu, masyarakat kan sebenarnya butuh bantuan buat melawan, karena kalau sudah berhadapan dengan kepala desa kan sulit, se tak nyaman lah.[44]

Contoh lain tindakan intimidasi adalah penghadangan pada salah satu aktifis KEN oleh orang tidak dikenal, namun karena tempat kejadian masih berdekatan dengan pemukiman warga, maka tidak sampai terjadi tindakan kekerasan. Peristiwa ini bahkan dimuat oleh media lokal Radar Madura. Kecaman dan sindiran terkadang juga terjadi dalam dunia media sosial terutama Facebook, tidak jarang para aktor gerakan yang tergabung dalam BATAN dituduh sebagai orang-orang yang dibayar oleh pihak-pihak pesaing Investor untuk melakukan perlawanan.

[44] Pendik, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok yang pro terhadap investor tidak berhasil merubah aktor-aktor gerakan jaringan NU. Terutama mereka yang sudah terlibat gerakan dalam waktu lama dan merupakan bagian orang-orang berpengaruh baik dalam organisasi PMII, BATAN atau KEN. Konsistensi para aktor yang sering mendapat ancaman tersebut seringkali melibatkan tidak hanya motif identitas kolektif, solidaritas dan komitmen. Lebih dari itu, faktor-faktor seperti prestis, reputasi dan pengakuan dari sesama aktifis menjadi faktor lain disamping komitmen dan solidaritas terhadap gerakan jaringan NU.

Meminjam istilah Olson, pertimbangan-pertimbangan seperti prestis, penghormatan, pertemanan dan tujuan-tujuan bersifat psikologi-sosial lain adalah insentif sosial yang merupakan bentuk insentif lain disamping insentif bersifat ekonomi.[45] Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor gerakan adalah aktor rasional yang mendasarkan pertimbangannya –paling tidak- bukan hanya pada faktor identitas kolektif *an sich* pada level partisipasi yang lebih inten. Seperti pengakuan salah satu aktor gerakan sebagai berikut;

> Diam saja kauleh tidak dapat apa2, mau jadi makelar hati dan pikiran tak endek, merasa menggadaikan nasib bangsa ini, rakyat ini. Kerja seperti itu nyaman lakar…artenah karena kauleh menolak jadi broker, san misan melawan sekaleh. Menyatakan sikap sakaleh, e kabejhi'ih ghy tak napah, tidak ada pilihan lain, saya diam mereka jadi korban. Kauleh diam tidak untung tidak rugi, tetapi tetap ada korban. Makanya saya bergerak dengan teman2, tidak boleh ada yang nerima tawaran. **Tawaran bukan tidak datang, banyak, tetapi kan orang akan berpikir bahwa bayjuri pecundang, "wak bileh eberrik pesse pas neng ngeneng…**"[46]

Petikan diatas menyiratkan bagaimana aktor menolak tawaran masuk dalam barisan pendukung "penguasaan" tanah atau paling tidak bersikap diam atas

[45] Mancur Olson, *The Logic of Collective Action; Public Good and The Theory of Groups*, Cet 11, (Cambridge; Harvard university Press, 2002), 60.
[46] Baijuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek tersebut juga mempertimbangkan opini masyarakat, mereka tidak jarang juga mepertimbangkan reputasi sebagai aktifis. Fakta ini selaras dengan temuan Chong sebagaimana dikutip Poletta bahwa identitas kolektif juga bisa terdiri dari kepentingan personal daripada hanya kewajiban moral,

> Chong (1991:50) argues that self-interested "reputational concerns" motivate participation. Since "people expect consistency from us, we tend to oblige by forging and living up to our reputations. And as Socrates advised, the easiest way to maintain a reputation is to become the person you want others to think you are." Participation is a rational bid to gain the benefits that accrue to those who share a collective identity.[47]

Sebagian aktor memilih untuk tetap berkomitmen terlibat dalam gerakan jaringan NU karena merasa "tidak nyaman" pada teman-temannya, mereka tidak mau dianggap sebagai "pengkhianat" dengan menerima tawaran dari kelompok lawan sebagaimana pengakuan salah satu anggota PMII.[48] Dengan demikian, ada faktor lain selain identitas kolektif, yang dapat berupa solidaritas dan komitmen pada gerakan. Pada tahap tertentu, rasa solidaritas dan komitmen juga dapat berkaitan dengan-meminjam istilah Olson- insentif-insentif yang bersifat sosial. Dalam kasus ini, *social sanction* dan *social reward*[49] juga menjadi insentif sosial yang mendorong aktor untuk tetap berkomitmen.

Dalam konteks sanksi sosial dan ganjaran sosial sebagai pendorong motivasi untuk tetap berkomitmen dapat dikaitkan dengan faktor *networking*. Sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, aktor-aktor gerakan

---

[47] Polletta dan James M. Jasper "Collective Identity and Social Movement", *Annual Review of Sociology*, 290

[48] Alif, *Wawancara*, Sumenep 23 April 2017

[49] Mancur Olson menjelaskan bagaimana *social sanction and social reward* bekerja sebagai insentif sosial yang dapat digunakan untuk memobilisasi terutama pada kelompok laten. Dengan adanya *reward* dan *sacntion* tersebut, individu yang "bandel" dan tidak koperatif akan dikeluarkan dari lingkaran kelompok tertentu. Sebaliknya individu yang kooperatif dan memberikan jasanya akan ditarik dalam lingkaran kelompok. (Lihat Mancur Olson, *The Logic of Collective Action; Public Good and The Theory of Groups*, Cambridge; Harvard university Press, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan NU memiliki keterkaitan satu sama lain, baik melalui hubungan pertemanan, senior-junior dalam sebuah struktur hirarki keorganisasian atau lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. *Networking* dengan aktor-aktor aktifis lain, lembaga-lembaga organisasi lain membuat individu tersebut masuk dalam jaringan ke-aktifis-an. Sehingga tindakan seperti menerima tawaran dari kelompok lawan akan membuat individu tersebut dikucilkan dalam jaringan ke-organisasi-an dan dikecam dalam jaringan ke-aktifis-an dalam skala yang lebih luas. Sebaliknya, memilih tetap bergerak bersama-sama akan mendatangkan rasa hormat dari sesama aktifis dan meneguhkan identitas ke-aktifis-annya. Tidak jarang, orang akan memilih keuntungan sosial daripada keuntungan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan Olson.

E. Strategi Gerakan

Secara keseluruhan, gerakan jaringan NU di Sumenep yang tergabung dalam BATAN memakai dua strategi untuk mencapai tujuannya, yaitu melindugi tanah Sumenep dari upaya "penguasaan" oleh orang luar Sumenep. Pertama adalah strategi kultural. Dimaksudkan dengan strategi kultural yaitu pendekatan ke bawah, berupa sosialisasi, penyadaran dan pemahaman langsung terhadap masyarakat akar rumput. Dalam melaksanakan strategi kultural ini, gerakan jaringan NU banyak memanfaatkan infrastruktur-infrastruktur sosio-religius berupa, pengajian-pengajian, *kompolan-kompolan* dan acara-acara NU seperti *bahsul masail*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena memakai infrastruktur sosio-religius, maka aktifis BATAN, KEN, aktor-aktor Ansor dan PMII membangun komunikasi dan kesepahaman dengan para tokoh agama. Jika kebetulan tokoh agama tersebut adalah pengurus NU struktural, maka dengan mudah aktor menitipkan pesan-pesan untuk menjaga tanah. Tidak semua tokoh agama setuju dan memihak pada gerakan penolakan, sebab sebagian dari tokoh agama tersebut juga terlibat menjadi bagian dari orang-orang investor. Ironisnya, tidak jarang mereka juga menggunakan media pengajian dan *kompolan* untuk melakukan transaksi.

Karena Identitas ke-madura-an sangat identik dengan agama khususnya Islam, maka pendekatan kultural menjadi penting untuk menanamkan kesadaran urgensi tanah atas masyarakat. Salah satu media transmisi nilai-nilai kultural tentang pentingnya tanah adalah *kompolan Terak Bulan*. Orang-orang BATAN biasanya akan menitipkan ide tentang *Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh* pada si tokoh agama untuk disampaikan kepada para *jema'ah*nya, masyarakat diajak untuk memikirkan nasib masa depan anak cucunya.

Melalui *kompolan-kompolan*, pengjian-pengajian, *rokat desa*, BATAN berusaha membangkitkan kembali makna *tana sangkol* dan menempatkannya dalam konteks modernitas. Salah satu contoh adalah penyampaian K Muhammad Sholahuddin atau K Mamak dalam acara *kompolan Tera' Bulan* yang menafsirkan bentuk "durhaka" pada orang tua dalam dunia modern sekarang ini salah satunya adalah menjual *tana sangkol*. Jadi, mereka berusaha mengaktifasi mitos-mitos seputar *tana sangkol* lewat orang-orang yang memiliki legitimasi secara sosial dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara-cara penyampaian oleh tokoh agama pada masyarakat biasanya menekankan bahaya penguasaan tanah oleh investor di Sumenep. Bahaya tersebut meliputi bahaya terhadap lingkungan, bahaya ekonomi dan bahaya sosio-kultural masyarakat terutama agama. Pengalaman-pengalaman penguasaan tanah yang telah ada, seperti cerita-cerita dampak pembangunan tambak oleh investor bagi sawah petani dan akses nelayan ke laut yang sulit, penggusuran kuburan oleh investor memberikan kesan yang menambah buruk citra investor. K Mursyid bercerita bagaimana dia menyampaikan pesan pada *jema'ah kompolan*nya sebagai berikut;

> …Saya sampaikan mencoba meyakinkan ada dampak ekonomi, bahwa mereka setelah datang tidak akan peduli kita, pasti itu, dan kita hanya akan jadi bagian tenaga kasarnya. Yang kedua pasti ada dampak lingkungan, mereka tidak akan peduli lingkungan kita, alam. Yang ketiga pasti ada dampak agama. Deddhi kehidupan keberagamaan kita pasti terganggu tapi dalam bahasa madura. Karena mereka datang bukan hanya dengan uang, tapi dengan budaya mereka, pakaian mereka seperti apa gitu. Nekah bhebejeh ke agama, mereka bhekal deteng kalaben pakaian se tak padeh ben kita, mereka bhekal odi' kalaben odi' se bideh sareng kita, bahkan mungkin aghemah mereka bideh, bisa saja suatu saat mereka mengembangkan aghema mereka disini.[50]

Begitu juga dengan K Muktar, tokoh agama yang mempunyai *kompolan* hingga di luar desanya tersebut menyampaikan pesannya pada jema'ah diantaranya seperti di di bawah ini;

> Engghy beden kaule kadhi nekha, karena pada umumnya investor nekah benni deri kalangan muslim. Dan kita melihat ke belakang, dimana pada masa penjajahan dhimin kaentoh kan para penjajah dhimin tidak menguasai tanah, hanya mengambil sebagian hasil yang ada di bumi kita. Mun samangken kan lebih kejam dari dulu, samangken kan memiliki tanahnya. Itu yang kita khawatirkan. Dan lambat laun meski belum jelas, tapi yang pasti mereka itu ingin menguasai segala-galanya… Justru se paleng ekabetereh kadintoh mereka membawa budaya baru sehingga budaya lokal nekah terkikis habis diganti dengan budaya baru seperti budaya yang tidak islami...[51]

[50] K Mursyid, *Wawancara*, Sumenep 18 Januari 2017
[51] K Muktar, *Wawanvara*, Sumenep 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penekanan-penekanan tentang perbedaan antara orang Madura dengan investor jika diletakkan dalam kerangka konstruksi identitas kolektif, akan bekerja sebagai pembatas antara kelompok orang Madura dengan ciri khasnya dengan "investor" yang memiliki karakter berbeda. Pengalaman-pengalaman masyarakat yang telah ada, ditambah kesan Cina sebagai investor membawa masyarakat pada memori kolektif orang Madura tentang Cina yang sangat mendominasi secara ekonomi. Memori kolektif tentang dominasi Cina dalam ekonomi melahirkan "watak perlawanan" atau kesadaran oposisi masyarakat. Perbedaan agama dari agama mayoritas yang dianut orang Madura semakin menambah kuat batas-batas keduanya yang membantu mendefinisikan "kita" dan "mereka". Narasi-narasi, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui juga bekerja membuat kesadaran kelompok semakin terbentuk.

Dengan demikian, *framing* yang tepat akan membantu membangkitkan kolektifitas masyarakat, sehingga menimbulkan sikap ke-waspada-an terhadap keberadaan investor yang berpotensi mengganggu tatanan sosio-kultural masyarakat termasuk agama disamping kesulitan-kesulitan yang telah dialami masyarakat di daerah lain. Pembingkaian isu terancamnya agama dengan kehadiran investor mampu membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat, sehingga tidak jarang pemilik tanah yang berencana melepas tanahnya berubah pikiran;

> Kadintoh bedeh tanah se deddhi akses utama menuju tempat rekreasi, nekah bajingan padahal, tanah seluas 2 Ha etaber 10jt per meter, nekah tak ebeghy. Bede ponapah nekah sampe ebelliyeh 10 jt per meter. Padahal tana ghunung. Karena mereka khawatir nak potonah nanti epadeddhi oreng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> murtad, “dhina engkok bengo’ laparah, tak rapah, tekka’ berempa ebellieh mun investor tak ebeghy bik engkok, dhina etamenna kajuh bik engkok.[52]

Sedangkan Strategi struktural adalah pendekatan kepada pemerintah untuk melindungi tanah di Sumenep, sehingga tanah tersebut tidak kuasai oleh orang luar dan dapat mensejahterakan masyarakat tanpa harus kehilangan hak milik atas tanah tersebut. Strategi struktural ini terutama sekali dimaksudkan untuk mendorong dan mengawal kebijakan publik pemerintah daerah yang dapat melindungi tanah dari “penguasaan” penuh oleh investor. Sehingga dengan adanya kebijakan publik tersebut tanah di Sumenep dapat memberikan ruang kehidupan bagi masyarakat, bukan sebaliknya, mengusir masyarakat ke pinggiran karena penguasaan tanah oleh investor. Gerakan jaringan NU tidak ingin apa yang terjadi atas penduduk asli Jakarta misalnya, terjadi pula pada masyarakat Sumenep.

Pada strategi struktural ini sebenarnya peran pemuda sangat dominan. Pendekatan “ke atas” ini banyak melibatkan pemuda-pemuda yang tergabung dalam jaringan BATAN lewat aksi demonstrasi, aksi turun ke jalan, komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mobilisasi massa, pengumpulan data dan informasi hingga audiensi dan dialog dengan pihak Bupati dan DPRD. Pendekatan struktural ini salah satunya menghasilkan Perbup perlindungan tanah meskipun pada akhirnya ditolak oleh pemerintah provinsi karena dianggap melampaui kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Bagi BATAN sendiri, kehadiran Perbup yang disusun oleh pihak pemerintah bukanlah upaya yang serius untuk melindungi tanah. Mereka

[52] K Muktar, *Wawancara*, Sumenep 16 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap upaya itu hanya “main-main”. Karena sangat mencurigakan orang-orang di pemerintahan kabupaten tidak mengetahui aspek hukum yang dibenarkan oleh undang-undang. Keberadaan Perbup adalah upaya pemerintah kabupaten mengalihkan perhatian para aktifis jaringan NU pada pemerintah provinsi, dengan penolakan Perbup, sebenarnya pemerintah kabupaten Sumenep berharap medan konflik akan beralih ke provinsi sebagai pihak yang menolak.

Adapun Perbup tersebut adalah Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sumenep. Perbup tersebut terdiri dari lima BAB. BAB pertama berisi tentang pengertian yang memperjelas maksud dari terma Pemerintah Daerah, Bupati dan Sekretaris Daerah. Bagian kedua berisi Maksud dan Tujuan yang intinya menjelaskan tujuan dan maksud dari pemberian pertimbangan dalam transaksi jual-beli tanah. Diantara tujuannya adalah menjamin dan memberikan perlindungan secara ekonomi dan sosial kepada warga masyarakat pemilik tanah yang akan menjual tanahnya. BAB kedua adalah Ruang lingkup yang berisi penjelasan tentang ruang lingkup Perbup yaitu jual beli tanah oleh warga masyarakat atau badan. BAB ketiga adalah Objek dan Subjek Jual Beli yang menjelaskan objek jual beli, yaitu tanah dengan luas diatas 5000 meter persegi atau dibawah 5000 meter persegi yang direncanakan untuk kegiatan usaha, baik perseorangan atau badan di wilayah Sumenep. BAB keempat adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan jual beli tanah yang berisi tiga pasal yaitu pasal 6, 7 dan 8. Pasal 6 terdiri dari empat ayat;[53]

1) Setiap jual beli tanah di kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan.
2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dalam bentuk rekomendasi
3) Sekretaris Daerah dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan saran Camat
4) Camat dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan saran Kepala Desa/Lurah

Pasal tujuh berbunyi "Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bersifat mengikat". Sedangkan pasal 8 terdiri dari tiga ayat;

1) Warga masyarakat baik perseorangan maupun badan yang akan melakukan jual beli tanah menyampaikan surat permohonan pertimbangan kepada Bupati melalui Camat
2) Camat meneliti surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat saran dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menerbitkan rekomendasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya berkas dari Camat secara lengkap.

[53] Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima berisi Penutup. Namun akhirnya Perbup tersebut dibatalakn oleh pemerintah provinsi Jawa Timur lewat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/163.K/KPTS/013/2016 Tentang Pembatalan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sumenep. Pembatalan tersebut mewajibkan pemerintah daerah Sumenep untuk Mencabut Perbup nomor 24 tahun 2016 tersebut dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sumenep.

Gerakan jaringan NU yang tergabung dalam BATAN menilai Perbup tersebut tidak benar-benar ingin melindungi tanah-tanah di Sumenep, karena memang kontennya sangat berpotensi ditolak di tingkat provinsi. Padahal menurut BATAN, masih ada mekanisme hukum yang lain untuk melindungi tanah Sumenep agar tidak terlepas begitu saja ke tangan investor dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karena itu, Gerakan jaringan NU Sumenep yang tergabugn dalam BATAN (PMII, KEN Sastra melawan, aktor-aktor Ansor) melakukan audiensi dan dialog pada bulan April lalu untuk mengkaji lagi kemungkinan mekanisme hukum. BATAN berpendapat perlindungan tanah melalui hukum harus dilakukan secara komprehensif dan cerdas, mereka menekankan investasi tetap dapat dilakukan, hanya saja dengan pengaturan yang lebih memihak pada kepentingan masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Makna Tanah dalam Perspektif Gerakan Jaringan NU Sumenep

1. Sebagai Benteng Pertahanan

Sikap penolakan yang muncul dari elemen masyarakat NU Sumenep terhadap pembelian tanah besar-besaran salah satunya karena bagi mereka tanah adalah benteng pertahanan. Demi kepentingan melindungi keberlanjutan generasi berikutnya (*nak potoh*) baik secara ekonomi atau agama. Melindungi *nak potoh* secara ekonomi bertujuan menjamin ketersediaan tanah, lahan atau aset yang bisa dipakai untuk modal kehidupan. Penolakan terhadap tambak khususnya dan pembelian tanah oleh orang luar Sumenep umumnya bertujuan untuk melindungi lingkungan agar tetap kondusif dan produktif bagi generasi selanjutnya tanpa harus kehilangan alat produksi. Sehingga masyarakat dan keturunannya tidak harus bekerja pada orang lain lewat sistem industrialisasi. Tujuan selanjutnya adalah menghindarkan masyarakat dan *nak potoh* dari kemungkinan terpinggirkan dari tanah kelahirannya sendiri. Sebagaimana penuturan salah satu anggota KEN

> "Karena memang ada keyakinan tanah itu *adek tokonah*, terbersit niat ingin *nyangkoleh* anak *potoh, terro esangkolaghiyeh* agar kelak bisa di manfaatkan tanpa harus menjual. Kemudian terlalu murah kalau harga segitu dibanding dengan ditanami cemara udang dan menghasilkan tanpa harus menjual tanah…Memanjang dari lombang ke Lapataman sampe Dapendah *nekah esse* pohon cemara udang, cemara udang itu dikirim ke jakarta menjadi pohon hias. Dan itu mata pencaharian bagi masyarakat. Karena kekhawatiran-kekhawatiran terhadap dampak lingkungan serta dampak kepemilikan, istilahnya pada akhirnya nanti akan menggeser penduduk setempat, ini prediksi kita kan. Ketika kemudian tanah-tanah yang dikuasai asing itu kemudian di pagar, maka sedikit demi sedikit kan aktifitas warga *nekah* dibatasi, sekedar untuk lewat saja bisa-bisa dibatasi"[54]

[54] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam aspek agama, sikap penolakan terhadap pembelian tanah secara umum adalah upaya untuk menghindari sebuah kondisi yang dapat mengganggu moral dan nilai agama yang sudah mapan di tengah masyarakat Sumenep. Sikap penolakan elemen masyarakat NU yang tergabung dalam BATAN didasarkan pada pemikiran tentang kemungkinan pengalihfungsian lahan menjadi proyek-proyek wisata. Proyek wisata yang dijalankan oleh pemodal dari luar Sumenep tersebut lambat laun akan membawa perubahan pada moral dan nilai agama generasi selanjutnya ke arah yang negatif. Bayjuri menjelaskan tujuan dari penolakan berkaitan dengan perlindungan agama sebagai berikut

> " Kemudian ke khawatiran lain kalau tidak ke tambang ya ke tempat tempat sejenis hotel, kafe yang berimplikasi pada rusaknya moral generasi muda Sumenep. Itu kemudian yang kita khawatirkan, dampak generasi mendatang nak cucu kita mereka sudah benar benar menghadapi zaman yang benar benar edan, tidak ada batasan antara moral dan sebagainya itu. Itu yang mendorong kami bergerak melawan… Ada juga kekhawatiran takut dijadikan apa-apa, misalnya hotel, kafe untuk pengembangan wisata, resort kemudian yang datang pakai bikini-bikini, *niser* ke nak potoh *pagghik*, bagaimana moralnya mereka kelak tempat ini disulap jadi tempat tempat seperti itu. Itu salah satu kekhawatiran tokoh agama dan masyarakat yang pro kita."[55]

Tujuan penolakan seperti yang dijelaskan diatas mengandung spirit yang sama dengan surat al-Nisa ayat 9, yaitu mengupayakan kesejahteraan untuk generasi selanjutnya;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

> Artinya; Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

[55] Bayjuri, *Wawancara*, Sumenep 23 Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlindungan Terhadap Lingkungan Alam Dan Sosial Masyarakat

Tujuan besar lain dari sikap penolakan elemen-elemen NU Sumenep yang tergabung dalam BATAN adalah untuk melindungi lingkungan terutama Laut dan tambak. Perpindahan kepemilikan lahan tambak yang ada di pinggir pantai dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut karena limbah tambak, sehingga masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan yang mengandalkan perairan di pinggir pantai akan terancam, sebagaimana yang tertulis dalam himbauan KEN. Selain itu, pembelian tanah besar-besaran terutama di pinggir pantai akan mengurangi lahan budidaya cemara udang yang sudah menjadi sumber ekonomi sebagaian besar masyarakat pinggir pantai.

Dengan kata lain, tujuan besar lain dari sikap penolakan terhadap pembelian tanah besar-besaran adalah untuk melindungi sistem ekonomi tradisional masyarakat setempat. Salah satu anggota PPS menjelaskan;

> "Di sana kan masyarakat mata pencahariannya cemara udang, kalau ada tambak ya rusak nanti, dan lagi saya berpikir di tambak udang itu hanya ada kepentingan asing, saya yakin bukan hanya udang, jangan-jangan ada yang lain, SDA lain. masyarakat akan terpinggirkan…Ini untuk jangka panjang, setelah tanah tanah itu dijual, anak anak potonah mau dapat kerja dan tempat tinggal dimana? Apakah mau menjadi tamu di negeri sendiri, apakah menjadi tamu di rumah sendiri, misalnya legung dikuasai masyarakat luar, atau misal masyarakat bangkalan menguasai legung, lah oreng legung dhibik deddi tamui, ini kemudian yang kita bela bagaimana orang disitu tetap menjadi tuan rumah"[56]

[56] Sayuti, *Wawancara*, Sumenep 20 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari paparan pada bab III dan BAB IV, penelitian merumuskan beberapa kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Keterlibatan atau partisipasi pemuda dalam gerakan jaringan NU yang tersebar dalam PMII, KEN (Komunitas Eman Nak Potoh), PPS (Pemuda Peduli Sumenep), Kelompok Sastra Melawan, Aktor-aktor Ansor dan tergabung dalam satu wadah yaitu BATAN (Barisan Ajaga Tana Ajaga Nak Potoh) sebenarnya hampir ditemukan pada semua level. Namun peran mereka pada level tertentu yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung tidak terlalu signifikan. Keterlibatan pemuda terutama sekali terlihat dominan dalam aksi demonstrasi, aksi turun ke jalan dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan tersebut berupa audiensi atau dialog dengan pemerintah, baik dari pihak DPRD Kabupaten Sumenep atau Bupati sebagai pimpinan eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. mereka juga sering terlibat dalam advokasi atau pendampingan masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah desa seperti yang pernah dilakukan aktifis KEN. Secara kelembagaan, PMII yang merupakan organisasi Mahasiswa juga merupakan lembaga yang mewakili kepentingan gerakan jaringan NU yang tergabung dalam BATAN untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah, misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti prosedur perizinan. Dominasi peran pemuda dalam hal yang telah disebutkan diatas karena berkaitan dengan strategi struktural, yaitu upaya melindungi tanah Sumenep melalui mekanisme hukum baik berupa Perda, Perbup dan segala kemungkinan perlindungan tanah Sumenep secara hukum.

Selain itu, peran pemuda yang tergabung dalam gerakan jaringan NU juga sangat dominan dalam melakukan investigasi, pencarian informasi dan pengumpulan data. Informasi dan data tersebut meliputi lokasi-lokasi terjadinya pembelian tanah, pemilik tanah dan pembeli atan calon pembeli tanah. Mereka juga mencari informasi seputar pihak-pihak yang terlibat dalam pratek jual-beli tanah hingga modus dan cara yang dipakai makelar untuk mendapatkan tanah yang di inginkan.

Pada momen-momen tertentu, para pemuda juga melakukan komunikasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan konsolidasi perihal aksi atau acara tertentu, seperti aksi demo pada bulan April 2017 yang melibatkan warga dari daerah terdampak, dan "rokat desa" dimana aktor Ansor menjadi penghubung antara warga dan BATAN.

2. Melihat komposisi dari berbagai komunitas dan lembaga yang tergabung dalam BATAN, banyak ditemukan relasi atau ikatan yang telah terbangun sebelumnya antara para anggotanya dengan anggota dan aktor lain. Hubungan tersebut terdiri dari hubungan kerabat, pertemanan, senior-junior hingga guru-murid. *Networking* ini membantu mendekatkan para pemuda melakukan identifikasi terhadap gerakan jaringan NU yang tergabung dalam BATAN. Identitas sosial yang dimiliki, seperti ke-darerah-an, ke-NU-an, ke-aktifis-an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat mereka lebih dekat dengan kolektifitas melalui proses identifikasi kelompok. Jaringan dengan anggota lain yang telah lebih dulu aktif dalam melawan "penguasaan" tanah oleh investor memfasilitasi individu melakukan proses identifikasi dengan kelompok. Banyak dari para pemuda tersebut, merasa memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam aksi penolakan karena tidak menghendaki masyarakat terpinggirkan dari tanahnya sendiri. Identitas kolektif ke-daerah-an dengan identifikasi diri pada kategori masyarakat daerah Sumenep menimbulkan rasa solidaritas. Sebagai seorang aktifis, mereka merasa perlu melakukan aksi dan berada pada garda terdepan. Identitas sosial sebagai aktifis dan identifikasi diri dalam kategori aktifis mengaktifkan motivasi para pemuda tersebut untuk terlibat. *Networking* dengan aktifis dan aktor gerakan jaringan NU yang tergabugn dalam BATAN lebih jauh lagi berfungsi mendekatkan para pemuda untuk masuk dalam gerakan dan melakukan aksi. Rasa solidaritas sebagai sesama aktifis yang peduli terhadap tanah dan masa depan Sumenep lahir dari identitas kolektif ke-aktifis-an dan pengalaman-pengalaman subyektif aksi-aksi yang telah dilalui. Seperti yang terjadi pada KEN yang memutuskan untuk bergabung dengan BATAN demi menyuarakan persoalan tanah dalam skala lebih besar, walaupun awalnya KEN dibentuk untuk merespon persoalan tanah di Dapenda.

Namun pada level yang lebih jauh, konsistensi keterlibatan pemuda dalam gerakan jaringan NU juga sedikit banyak berkaitan dengan faktor *selective incentive*. Sikap konsistensi, penolakan terhadap berbagai tawaran hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahanan dari adanya caci maki dan ancaman tidak jarang ikut ditentukan oleh faktor -meminjam istilah Olson- *social incentive*. Selain identitas kolektif, mereka juga mendasarkan keputusan pada faktor reputasi, penghormatan, dan menghindarkan diri dari sanksi sosial sehingga mereka memilih tetap konsisten berpartisipasi dalam gerakan.

3. Gerakan jaringan NU yang tergabung dalam BATAN memiliki strategi yang bersifat struktural dan kultural. Mereka beranggapan bahwa untuk mencapai target, mereka tidak bisa hanya mengandalkan itikad baik pemerintah, sebab itu strategi "ke bawah" melalui pendekatan kultur perlu dilakukan.

   Strategi struktural dimaksudkan untuk menargetkan perlindungan secara hukum tanah agar dapat mensejahterakan masyarakat tanpa harus melepas hak milik atas tanah. Strategi struktural banyak melibatkan pemuda dan mahasiswa khususnya PMII. Dalam menjalankan strategi struktural, gerakan jaringan NU yang tergabung dalam BATAN berusaha memberikan tekanan pada pihak pemerintah lewat aksi-aksi dan demonstrasi, pemberitaan lewat media massa dan pembangunan opini melalui media sosial. semua itu dilakukan untuk menopang upaya audiensi atau dialog antara gerakan jaringan NU yang terdiri dari PMII, KEN, Sastra Melawan, PPS, aktor-aktor Ansor yang tergabung dalam BATAN, dengan pihak pemerintah baik eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya atau dengan pihak DPRD Kabupaten Sumenep. Sejauh ini, upaya struktural paling tidak telah berhasil memaksa pihak pemrintah daerah menerbitkan Perbup No 24 Tahun 2016 tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep. Walaupun akhirnya dicabut karena mendapat penolakan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya bagi gerakan jaringan NU, Perbup tersebut tidak mencerminkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk membuat mekanisme perlindungan hukum atas tanah. bagi mereka perlindungan tanah dapat dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan cerdas sehingga tidak menabrak ketentuan hukum. Salah satu solusi yang ditawarkan gerakan jarinan NU yang tergabung dalam BATAN adalah melalui Perda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW).

Sedangkan strategi kultural dimaksudkan untuk langkah-langkah "ke bawah". Langkah-langkah penyadaran dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pemilik tanah. langkah-langkah tersebut banyak menggunakan infrastruktur-infrastruktur rutinitas keagamaan masyarakat. Pendekatan "ke bawah" ini merangkul para kiai lokal dan tokoh agama setempat untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan akibat yang di timbulkan dari pembelian tanah secara besar-besaran. Tokoh agama dan kiai lokal tersebut akan memberikan pemahaman pada masyarakat melalui *kompolan*, pengajian dan waktu-waktu setelah sholat Jumat. Salah satu *kompolan* besar yang juga seringkali menjadi media "dakwah" gerakan BATAN adalah *kompolan Tera' Bulan*, sebuah *kompolan* yang sudah memiliki basis kuat di masyarakat dan pelaksanaannya berkeliling hingga menjangkau kepulauan. Strategi kultural juga. Terkadang para kiai dan tokoh agama tersebut juga memberikan nasehat dan pemahaman secara langsung pada orang-orang yang memiliki hubungan guru-murid atau kiai-santri. Selain itu, pendekatan kultural juga dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pengumpulan karya-karya sastra berupa puisi yang berkaitan dengan persoalan agraria Sumenep lewat pembentukan Komunitas Sastra Melawan.

B. Saran

Salah satu kendala besar yang dihadapi gerakan jaringan NU adalah keikutsertaan beberapa tokoh agama dalam barisan pendukung investor. Sehingga seringkali terjadi konflik antar tokoh agama setempat, konsekwensinya masyarakat pun menjadi terbelah. Dukungan dari para tokoh agama lokal akan memberikan basis legitimasi sosial untuk berjejaring dengan warga setempat. Terpecahnya para tokoh agama di beberapa daerah di Sumenep menunjukkan bahwa gerakan jaringan NU tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari tokoh agama di tingkat bawah dan itu menyulitkan mereka dalam menjalankan strategi kultural.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Benford, Robert D. dan Snow, David A. "Annual Review Of Sociology". *Framing Processes And Social Movement; An Overview And Assesment*. Vol. 26. 2000.

BPS. Kabupaten Sumenep. *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*. Sumenep; BPS Kab. Sumenep, tt.

BPS Kab. Sumenep. *Sumenep Dalam Angka.* Sumenep; BPS Kab. Sumenep, 2016.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles; Sage Publication, 2013.

Cristiansen, Jonathan. *The Sociology reference Guide: Theories Of Social Movements*. California; Salim Press, 2011.

De Jonge, Huub. *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Della Porta, Donatella dan Mario Diani. *Social Movement; An Introduction*. Oxford; Blackwell Publishing, 2006.

Diani, Mario. "Network and Participation", dalam *The Blacwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow. Victoria; Blackwell Publishing, 2006.

Ebaugh, Helen Rose. *The Gulen Movement*. London dan New York; Spinger, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Flynn, Simon I. “Narrative and Social Movement”, dalam *Sociology Reference Guide Theories Of Social Movements,* ed. Salem Press. California; Salem Press, 2011.

Foweraker, Joe. *Theorizing Social Movement In Latin America.* London; Pluto Press, 1995.

Gamson, William A. “Commitment and Agency in Social Movement”, *Sociological Forum*, Vol. 6. No. 1, Maret, 1991.

Henning, Christoph. “Ideology”, dalam *Philososiologhy; The Blackwell Encyclopeia Of Sociology*, 4, ed. George Ritzer, et al. Oxford; Blackwell Publishing, 2009.

Hilmy, Masdar. “The Political Economy Of Sunni-Shi’ah Conflict In Sampang Madura “, *Al-Jami’ah; Journal Of Islamic Studies*, Vol. 51, No 01, 2015.

Hunt, Scott A. “Solidarity, Commitment and Collective Identity”, dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow. Victoria; Blackwell Publishing, 2006.

Ian Dey. *Qualitative Data Analysis.* London; Routledge, 1993

Jasper, James M. “Social Movement”, dalam *Philososiologhy;The Blackwell Encyclopeia Of Sociology*, 4, ed. George Ritzer, et al. Oxford; Blackwell Publishing, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurdi, Syarifudin. *Sosiologi Nusantara; Memahami Sosiologi Integralistik.* Jakarta; Kencana, 2013.

Klandersmen, B. "The Demand and Supply od Participation; Social-psychological Correlates of Participation in Social Movements", dalam *The Blackwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow. Victoria; Blackwell Publishing, 2006.

Kolip, Usman dan Elly M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta; Kencana, 2013.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta Renika Cipta, 2003.

Melucci, Alberto. "The Process Of Collective Identity", dalam *Social Movement and Culture*, ed. Hank Johnston dan Bert Klandermans. Minneapolis; University of Minnesota Press, 2004.

Melucci, Alberto. *Challenging The Codes.* London; Cambridge University Press, tt.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.

Nasution, S. *Metode Research; Penelitian Ilmiah.* Jakarta; Bumi Aksara, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Olson, Mancur. *The Logic of Collective Action; Public Good and The Theory of Groups*, Cet 11. Cambridge; Harvard university Press, 2002.

Opp, Karl-Dieter. *Theories Of Political Protest and Social Movement; A Multidisciplinary Introduction, Critique and Synthesis*. New York; Routledge, 2009.

Passy, Florence. "Individual Network", dalam, *Social Movement and Network; Relational Approaches to Collective Action*, ed. Mario Diani dan Doug McAdam. New York; Oxford University Press, 2003.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pertimbangan Dalam Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Sumenep

Polletta, F. dan James M. Jasper. "Collective Identity and Social Movement", *Annual Review of Sociology*. Vol. 27, 2001.

Rozaki, Abdur. "Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura", *Kyoto Review Of Southeast Asia Issue*, 11, Desember, 2009.

Saunders, Clare. "Double Edged Swords? Collective Identity and Solidarity in the Environment movement", *The British Journal od Sociology*, Vol. 59, 2008.

Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Snow, David A. “Framing Processes, Ideology and Discursive Fields”, dalam *The Blacwell Companion to Social Movement*, ed. David Snow. Victoria; Blackwell Publishing, 2006.

Stekelenburg, Jacquelin Van dan B. Klandersmen. “Individual in Movement; A Social Psychology of Contention”, dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, ed. B. Klandermen dan Conny Roggeband. New York; Spinger, 2007.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008.

----------. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualtatif dan R&D.* Bandung; Alfabeta, 2007.

----------. *Metode Penelitian Kualitatif* dan R&D. Bandung; Alfabeta, 2008

Sukmana, Oman. “Konvergensi Resource Mobilization Theory dan Identity-Oriented Theory”, dalam *Sosiologi Reflektif*, Vol. 08, No. 01, 2013.

Surakhmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung; Tarsito, 1994.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, ter, Alimandan. Jakarta; Prenada, 2011.

Taylor, Verta dan Nancy Whittier. “Collective Identity In Social Movement Communities; Lesbian Feminist Mobilization”, dalam *Frontiers of Social Movement Theory*, ed. Aldon Morris. London; Yale University Press, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahyudi, Muhtar. “Jurus Ombak dan Angin; Komunikasi Politik Si Pencari Ikan” dalam *Madura; Masyarakat, Budaya, Media dan Politik*, ed. Surokim. Bangkalan; Puskakom Publik, 2015

Whooley, Owen. “Collective Identity”, dalam *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 4. Ed George Ritzer, et al, Malden USA; Blackwell Publishing, 2009.

Wiktorowicz, Quintan. *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach*. Indiana; Indiana University Press, 2004

Zainuddin Syarif, “Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan”. Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id